SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Dairi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang memuat arah kebijakan, strategi, progam kegiatan dan rencana aksi yang disertai dengan pendanaan indikatif sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2025- 2029.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD, sebagai berikut:

a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
c. memandu intervensi program bagi Perangkat daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD sebagai pedoman dalam:

a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah;
b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap proses/langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan; dan
d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 5

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH
BAB IV : PRIORITAS PROGRAM
BAB V : LOKASI PRIORITAS
BAB VI : PENUTUP.

(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan Tahun 2025-2029.

(3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah dilaporkan Bupati Dairi kepada Gubernur Sumatera Utara selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Desember 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 28 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

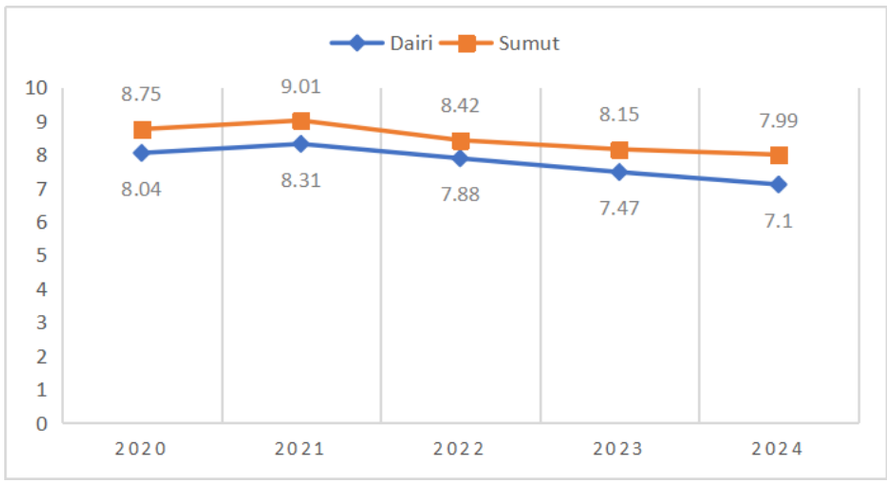
Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang. Hampir setiap negara memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase dan jumlah masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk menanggulangi kemiskinan, program stabilisasi harga dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi kemiskinan di Indonesia.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi masyarakat.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelarasan Kerja, Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's), serta mengintegrasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Skenario pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi mengalami penurunan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik Tahun 2024. Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 8,04 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan hingga Tahun 2024 hingga mencapai 7,10%.

Gambar 1.1
Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024 (%)

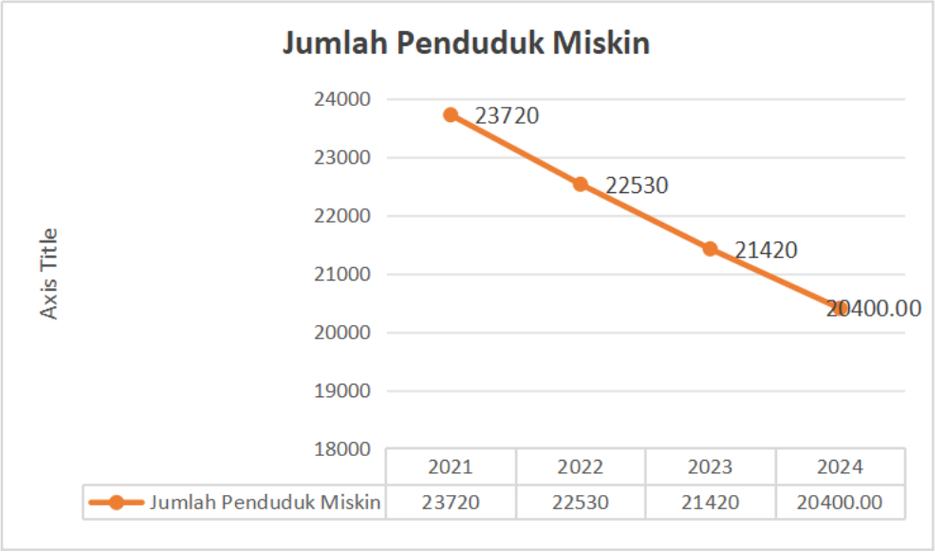


Sumber : Dairi Dalam Angka, BPS Kabupaten Dairi 2025.

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa trend persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 cukup

fluktuatif dimana berada di angka 8,04% pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 naik menjadi 8,31% dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7,88% dan terjadi penurunan pada Tahun 2023 menjadi 7,47% kemudian pada Tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi 7,10%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020–2024 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara di mana pada Tahun 2020 menurun menjadi 8,75% sedangkan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 9,01% dan pada Tahun 2022 kembali menurun menjadi 8,42% dan semakin menurun pada Tahun 2023 ke angka 8,15%, dan pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 7,99%.

Gambar 1. 2
Jumlah Penduduk Miskin Kab Dairi Tahun 2021-2024



Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan secara komprehensif dan kolaboratif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, stakeholders terkait serta masyarakat melalui Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin, Pengembangan dan Jaminan Keberlanjutan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Serta Sinergitas Kebijakan dan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan capaian Provinsi, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi.

Untuk itu dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dairi perlu segera disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai sebuah perencanaan strategis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Dairi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diselaraskan atau dipadukan dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Dairi merupakan perwujudan kebijakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan. Selain itu juga menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat miskin itu sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RPKD

1.2.1. MAKSUD

Maksud penyusunan RPKD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini adalah:

- Memperluas kesempatan dan keterlibatan stakeholders dalam perencanaan program baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

- Memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan seluruh *stakeholders*;
- Mendorong Pemerintah Kabupaten Dairi untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin *(pro poor);*
- Mendorong kemandirian Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.

1.2.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan RPKD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini adalah:

- Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha, Lembaga Internasional, dan pihak-pihak pemangku kepentingan *(stakeholders)* untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Dairi;

- Membangun sinergitas untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan;
- Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals)* terutama pada Pilar Pembangunan Sosial dan Tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan;
- Sebagai dasar kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah, untuk menyusun rencana aksi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinasi yang lebih mantap, komprehensif, sinergis, akseleratif dan berkelanjutan;

- Terintegrasinya RPKD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2024-2029.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPKD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional ;
9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30/2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);

15. Keputusan Bupati Dairi Nomor : 84/400.9.14/III/2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Dairi Tahun 2025.

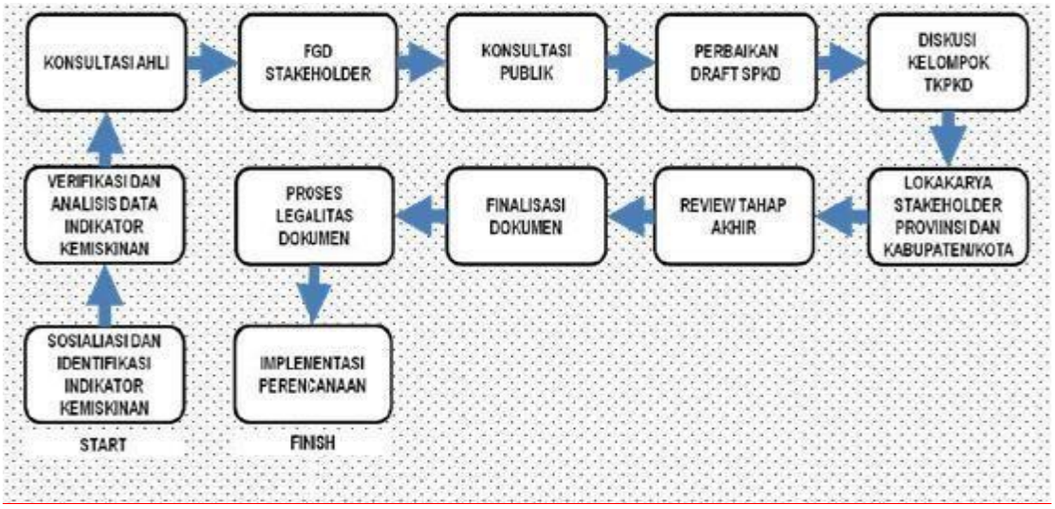
1.4. METODE PENYUSUNAN RPKD

Metode yang dipakai dalam menyusun dokumen RPKD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah mengacu pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, Petunjuk Teknis Penyusunan RPKD dan Buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Dairi serta dokumen/kertas hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Tahapan Penyusunan RPKD Kabupaten Dairi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Evaluasi dan analisa data sekunder yang berkaitan dengan kemiskinan;
b. Telaahan terhadap dokumen lain yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara partisipatif;
c. FGD *stakeholders*, yaitu diskusi antara dengan OPD/Instansi (pelaku program) dengan melibatkan berbagai unsur *stakeholders*;
d. Konsultasi Publik (perwakilan *stakeholders*);
e. Draft dokumen RPKD berdasarkan masukan-masukan hasil FGD *stakeholders;*
f. Diskusi pemantapan draft dokumen OPD (internal TKPK Kabupaten Dairi);
g. Rapat koordinasi TKPK Kabupaten Dairi;
h. Review tahap akhir dan finalisasi dokumen RPKD berdasarkan masukan- masukan yang disampaikan dalam rapat koordinasi dilakukan penyempurnaan/finalisasi dokumen RPKD;
i. Legalisasi dokumen RPKD Kabupaten Dairi agar dokumen RPKD ini bisa menjadi pengikat dan acuan bagi seluruh pelaku penanggulangan kemiskinan maka perlu adanya Peraturan Bupati.

Gambar 1. 3
Bagan Alur Penyusunan RPKD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029



1.5. DAFTAR ISTILAH

1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Headcount Index penduduk yang dikategorikan miskin. BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Sejak Desember 1998, penghitungan penduduk miskin telah menggunakan standar baru yang lebih dinamis. Perbedaan standar baru ini dengan standar sebelumnya (tahun 1996) adalah pada perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar.
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yaitu merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yaitu memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.
5. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, yaitu Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.
6. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja *(supply side)*. Dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kelebihan dari sisi *supply* dikurangi dengan *demand* adalah penganggur.
7. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhdap total kesempatan kerja, yaitu Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk usia 15+ yang bekerja yang berstatus berusaha sendiri,pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15+ yang bekerja, dinyatakan dalam persentase.
8. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian (KPPNP), yaitu KPPNP adalah perbandingan antara pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian terhadap total pekerja upahan di sektor tersebut, dan dinyatakan dalam

persentase. Sektor non pertanian adalah semua sektor kegiatan ekonomi di luar pertanian sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sektor non pertanian yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/ bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan, dan lainnya (*real estate*, penyedia air, dll).

9. Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu Angka Kematian Bayi atau AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut : 70 Sangat tinggi, 40–70 Tinggi, 20-39 sedang dan <20 rendah.
10. Angka Kematian Balita (AKBA), yaitu AKBA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba adalah sebagai berikut : >140 sangat tinggi, antara 71–140 tinggi, 20-70 sedang dan < 20 rendah.
11. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), yaitu AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI memperhitungkan juga kematian ibu pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan.
12. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (BKG), yaitu BKG adalah perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Kategori status gizi ditentukan dengan menggunakan standar WHO Tahun 2005 yang telah diadopsi oleh kementerian kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No.1995/Menkes/SK/XII/2010

tentang standar antropometri penilaian status gizi anak, yang dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan Z-score yaitu :

(1) Gizi lebih (Z-score >= +2);
(2) Gizi baik (-2 < Z-score <+2);
(3) Gizi kurang (-3 < Z-score <-2);
(4) Gizi buruk (Z-score <= -3).

13. Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak, yaitu Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan.
14. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, yaitu Proporsi Pertolongan Kelahiran (PPK) oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (TKT) adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase.
15. Cakupan pelayanan antenatal (K4), yaitu Cakupan pelayanan antenatal satu kali (K1) adalah jumlah kunjungan layanan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan terlatih sebanyak 1 kali pada trimester pertama. Cakupan pelayanan antenatal empat kali (K4) adalah jumlah kunjungan layanan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan terlatih sebanyak 4 dengan frekuensi 1 kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga.
16. Angka pemakaian kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun, yaitu Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.
17. Tingkat kelahiran pada remaja (perempuan usia 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate*-ASFR) per 1.000 perempuan

usia 15-19 tahun, yaitu Banyaknya kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun pada periode tertentu, dibagi jumlah penduduk perempuan usia 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1000 perempuan 15-19 tahun.

18. *Unmet Need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi), yaitu Proporsi wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
19. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun, yaitu Human Immunodeficiency Virus/HIV adalah virus penyebab AIDS. Virus ini menyerang dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh tidak mampu melindungi diri dari penyakit lain. Prevalensi HIV adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15-24 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada usia yang sama (yaitu 15-49 tahun), dikalikan dengan 100%.
20. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk, yaitu Angka kejadian malaria adalah jumlah kasus malaria positif per 1.000 penduduk. Angka Kematian (AKM) yang disebabkan oleh malaria adalah banyaknya kematian per 100.000 penduduk karena malaria.
21. Angka kejadian tuberculosis per 100.000 penduduk, yaitu Angka kejadian tuberculosis adalah banyaknya kasus baru TB per 100.000 penduduk. Prevalensi Tuberkulosis (PTB) adalah banyaknya semua kasus TB per 100.000 penduduk. Angka kematian karena TB (AKTB) adalah banyaknya kematian karena TB per 100.000 penduduk Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara mikroskopis atau didiagnosis menderita TB.
22. Proporsi kasus tuberculosis yang disembuhkan melalui DOTS, yaitu Proporsi jumlah kasus TB yang diobati dan sembuh adalah jumlah penderita baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan baik sembuh maupun pengobatan

lengkap dengan strategi *Directly Observed Treatment Short Course* (DOTS), dinyatakan dalam persentase.

23. Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu Angka partisipasi murni SD/MI sederajat adalah perbandingan antara murid SD/MI sederajat usia 7-12 tahun dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi murni SMP/MTs Sederajat adalah perbandingan antara murid SMP/MTs sederajat usia 13-15 tahun dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA Sederajat adalah perbandingan antara murid SMA/SMK/MA sederajat usia 16-18 tahun dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

24. Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu Angka partisipasi kasar SD/MI sederajat adalah perbandingan antara murid SD/MI sederajat dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi kasar SMP/MTs Sederajat adalah perbandingan antara murid SMP/MTs sederajat dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase, dinyatakan dalam persentase. Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2009 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

25. Rata-Rata Lama Sekolah, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah/Mean Year of Schooling (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang :

    - Partisipasi sekolah;

- Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki Ijazah tertinggi yang dimiliki;
- Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki.

26. Rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat pendidikan dasar dan menengah, yaitu Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM murid laki-laki pada setiap jenjang dan jalur pendidikan, dinyatakan dalam persentase. RAPM meliputi jenjang pendidikan :
    a. Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar :
    - RAPM-SD adalah perbandingan antara APM tingkat SD (SD, MI, Salafiah Ula, dan paket A setara SD) perempuan terhadap APM tingkat SD laki-laki, dinyatakan dalam persentase;
    - RAPM-SMP adalah perbandingan antara APM tingkat SMP (SMP, MTs, Salafiah wustha, dan paket B setara SMP) perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki, dinyatakan dalam persentase.
    b. Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan menengah (RAPM-SM) adalah perbandingan antara APM tingkat SD, MI, Salafiah Ula dan SMP, MTs, Salafiah wustha, Paket A setara SD dan Paket B setara SMP laki-laki, dinyatakan dalam persentase.
27. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten, yaitu Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan adalah perbandingan banyaknya kursi DPRD yang diduduki perempuan terhadap total kursi DPRD, dan dinyatakan dalam persentase.
28. Akses sanitasi layak, yaitu Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik *(septic tank)*/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Proporsi penduduk atau rumah tangga

dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

29. Akses air minum layak, yaitu Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.
30. Proporsi rumah tidak layak huni, yaitu Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.
31. Rasio elektrifikasi, yaitu Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.
32. Perkembangan harga beras bahan kebutuhan pokok utama lokal lainnya, yaitu Jumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu kesatuan benda tertentu/harga transaksi antara penjual dan pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kepada pihak lain.
33. Produksi/Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (PP-BPU), yaitu Produksi/produktivitas adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per unit.

34. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum, yaitu Konsumsi rata-rata energi yang dianjurkan 2000 kkal per kapita per hari (AKG=Angka kecukupan gizi). Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (1400 kalori per kapita per hari).

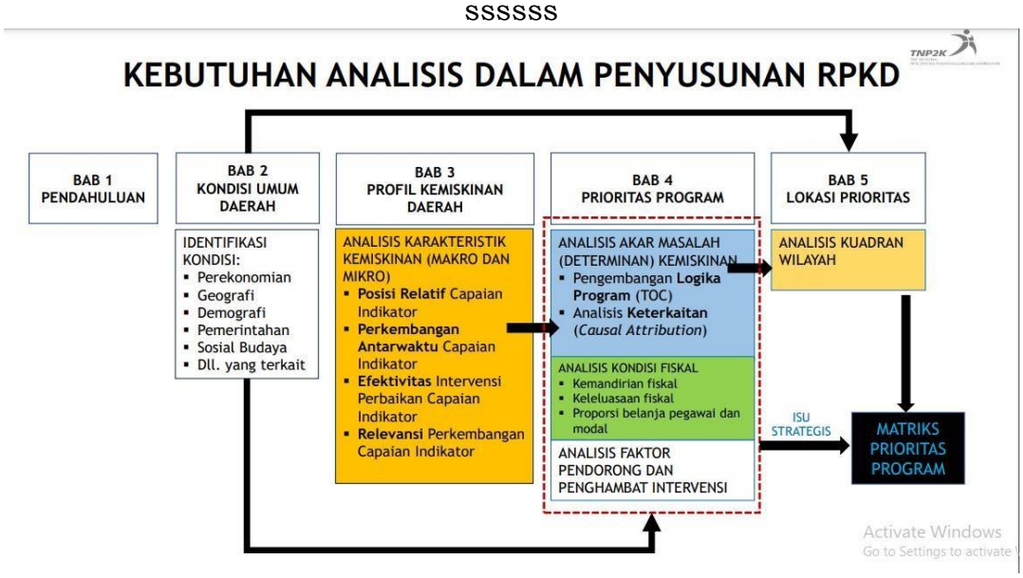
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPKD

RPKD sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan;
2. Kondisi Umum Daerah;
3. Profil Kemiskinan Daerah;
4. Prioritas Program;
5. Lokasi Prioritas;
6. Penutup

Gambar 1. 4
Mekanisme Penyusunan RPKD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

ssssss



1.7. PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN RPKD

Bupati Dairi dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membentuk TKPK Kabupaten Dairi dengan Keputusan Bupati.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Dairi

Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Kabupaten;
b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8. SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN DAIRI

Penanggung Jawab	:	Bupati Dairi
Ketua	:	Wakil Bupati Dairi
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
Sekretaris	:	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan
Wakil Sekretaris	:	- Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial - Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; - Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Kelompok Pengelola Program :

- Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
- Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

Anggota :

- Kepala dan unsur Perangkat Daerah kabupaten yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
- Perwakilan masyarakat;
- Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Dairi memiliki wilayah yang berada pada pegunungan di dataran tinggi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1.927,80 km^2 atau sekitar 2,69 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang, dengan 15 (lima belas) kecamatan dan 169 desa/ kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km2/ sq.km)	Persentase Luas Kabupaten (Persen)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	70,67	3,67
2.	Sitinjo	Sitinjo	4	53,15	2,76
3.	Berampu	Berampu	5	40,85	2,12
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	235,40	12,21
5.	Sumbul	Sumbul	19	192,58	9,99
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	75,62	3,92
7.	Silima Punggapungga	Parongil	16	88,35	4,58
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	42,75	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	60,15	3,12
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	93,93	4,87
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	105,62	5,48
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	197,00	10,22
13.	Gunung Sitember	Gunung Sitember	8	77,00	3,99
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	155,33	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	439,40	22,79
Total			**169**	**1.927,80**	**100,00**

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2024

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara)

Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir

Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat

Sebelah Barat : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Selatan)

Gambar 2. 1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Dairi merupakan salah satu wilayah yang memiliki **letak yang cukup strategis, yakni dengan jarak sekitar 153 km dari** Kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam yang membuat aksessibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai *Primary City* Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu jalur menuju Provinsi Aceh.

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut (dpl) atau sekitar 200 meter diatas permukaan Danau Toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui beberapa sungai-sungainya.

Topografi tersebut memengaruhi daya dukung untuk pertanian dan perkebunan, namun membutuhkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta strategi mitigasi perubahan iklim terhadap risiko bencana longsor dan banjir.

Kabupaten Dairi didominasi kelerengan berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal, dengan karakter kelerengan sebagai berikut:

- Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
- Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha sekitar 14,43% dari luas Kabupaten Dairi;
- Kelerengan terjal lebih kurang 88.097 ha atau sekitar 45,70% dari luas Kabupaten Dairi.

Dari karakter topografi dan pola drainase alami wilayah Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi, khususnya di Bagian Tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsoran.

Tabel 2.2
Luas Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelerengan (ha) dan Ketinggian (mdpl)

NO.	KECAMATAN	KELERENGAN					JUMLAH	KETINGGIAN (M. DPL)
		DATAR	BEROMBAK	BERGELOMBANG	CURAM	TERJAL		
1.	Sidikalang	11.165	10.395	4.620	7.315	5.005	38.500	1.068
2.	Sitinjo[1)]	-	-	-	-	-	-	1.080
3.	Berampu[1)]	-	-	-	-	-	-	880
4.	Parbuluan[1)]	-	-	-	-	-	-	1.431
5.	Sumbul	9.119	4.828	6.169	4.828	1.876	26.820	1.021
6.	Silahisabungan[2)]	-	-	-	-	-	-	956
7.	SilimaPunggapungga	1.444	1.444	1.444	1.011	9.097	13.640	596
8.	Lae Parira[3)]	-	-	-	-	-	-	777
9.	Siempat Nempu	1.550	4.134	6.640	2.067	11.449	26.020	655
10.	Siempat Nempu Hulu[4)]	-	-	-	-	-	-	935
11.	Siempat Nempu Hilir[4)]	-	-	-	-	-	-	434
12.	Tigalingga	2.162	1.297	6.054	8.648	25.079	43.240	473
13.	Gunung Sitember[5)]	-	-	-	-	-	-	416
14.	Pegagan Hilir[5)]	-	-	-	-	-	-	1.171
15.	Tanah Pinem	879	1.318	2.197	3.955	35.591	43.940	200
KABUPATEN DAIRI		26.319	23.416	27.124	27.824	88.097	192.780	200-1.431

Sumber: RTRW Kab. Dairi Tahun 2014-2034, Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2025.

Keterangan:[1)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sidikalang; [2)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sumbul; [3)] Masih bergabung dengan Kecamatan Silima Punggapungga; [4)] Masih bergabung dengan

2.1.1.3. Geologi

Stratigrafi terdiri dari formasi/satuan dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan

berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang diatasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan. Diatas batuan ini diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmppt) yang merupakan anggota Parapat yang dicirikan oleh litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Kemudian, secara tidak selaras diatasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

2.1.1.4. Hidrologi

Karakteristik hidrologi memiliki nilai penting dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi risiko bencana, hingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi aliran air permukaan dan air bawah tanah. Aliran air permukaan direpresentasikan dengan Wilayah Sungai (WS) dan aliran air bawah tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT).

1. Wilayah Sungai (WS)

   Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

   - WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
   - WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara – Lintas Provinsi).

Tabel 2.3 Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Punggapungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Punggapungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Punggapungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Punggapungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Punggapungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Sungai – sungai di Kabupaten Dairi dominan mengalir secara gravitasi ke arah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara. Fungsi dari sungai-sungai di Kabupaten Dairi berfungsi sebagai saluran drainase alami yang mengalirkan air hujan diatas permukaan tanah *(surface run off).* Di antara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum.

2. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km^2.

3. Ketahanan Air Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi memiliki jaringan sungai yang luas yang mendukung pertanian, namun juga rentan terhadap banjir tahunan. Perlu ada upaya penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan pengelolaan air untuk memastikan ketahanan air jangka panjang dengan komponen Indeks Ketahanan Air Kabupaten Dairi yaitu kapasitas tampungan air (M^3 /Kapita) dengan target 63,45 pada Tahun 2025.

2.1.1.5. Klimatologi

Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrem berpotensi memperburuk banjir di Kabupaten Dairi. Strategi mitigasi, seperti peningkatan kapasitas sistem drainase dan konservasi lahan kritis, harus segera diimplementasikan untuk mengurangi risiko bencana. Curah hujan di Kabupaten Dairi antara

2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979),* pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Iklim B1

   Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Punggapungga.
2. Iklim C1

   Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.
3. Iklim D1

   Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklim sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 m.dpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 m. dpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 m. dpl.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 192.780 Ha. Hutan negara sebagai tutupan lahan memiliki luasan sebesar 95.603 hektar atau sekitar 49,60 persen. Perkebunan Campuran memiliki luasan penggunaan lahan terluas selanjutnya, yaitu sebesar 77.011,74 hektar atau sekitar 40,00 persen. Penggunaan lahan berupa ladang seluas 10.463 hektar atau sekitar 5,43 persen. Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.755,99 hektar atau sekitar 0,91 persen dari luas Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		(Ha)	(Persen)
1.	Hutan	95.603,00	49,592
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	39,948
3.	Ladang	10.463,39	5,428
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,528
5.	Permukiman	1.755,99	0,911
6.	Sungai	520,29	0,270
7.	Perkebunan Kopi	318	0,165
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,057
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,058
10.	Pertambangan	43,5	0,023
11.	Danau/Waduk	24,33	0,013
13.	Tambak	15,84	0,008
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,005
Kabupaten Dairi		**192.789,45**	**100**

Kabupaten Dairi tentu telah mengalami perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Adanya laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk, menjadi diantara komponen yang turut berkontribusi terhadap dinamika perubahan lahan di Kabupaten Dairi. Dinamika penduduk tersebut yang selanjutnya juga menuntut terhadap ketersedian lahan yang juga semakin meningkat. Dampak selanjutnya maka pembangunan menjadi masif dan tentu berkontribusi dalam memengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumber daya alam Kabupaten Dairi cukup berlimpah. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Dairi 2014-2034 terdapat banyak potensi sumber daya alam yaitu :

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah/sawah adalah:

1. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, pemasaran hasil pertanian (sub terminal agribisnis).
2. Peningkatan produksi pertanian lahan basah/sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat lebih meningkat.

3. Pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktifitas lahan dan kinerja petani.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

Kawasan pertanian tanaman lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya. Pengembangan pertanian lahan kering diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan komoditas unggulan. Prospek hortikultura akan semakin baik, tersebar diseluruh kecamatan, meliputi tanaman jenis sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor.

Program untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal:

1. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering.
2. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan.
3. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan dan optimasi lahan.
4. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan usaha tani, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen.
5. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.

2. Perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Dairi adalah kopi, kakao dan tanaman lainnya. Program untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah:

1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung.
2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan untuk mendukung perkebunan, meliputi:
    a. Subsistem Hulu *(up stream):* sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif).
    b. Subsistem Usaha Tani *(on farm):* produksi pertanian primer (budidaya).
    c. Subsistem Hilir *(down stream):* pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.
    d. Subsistem Kelembagaan *(supporting institution):* perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan lain-lain.

3. Peternakan

Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt). Sedangkan pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.

Program yang dikembangkan untuk perwujudan energi peternakan adalah:

1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu di beberapa kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga, Gunung Sitember dan Siempat Nempu Hulu. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau.

2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.
3. Pengembangan sentra peternakan unggas di seluruh kecamatan.
4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan.
5. Pengembangan kawasan terintegrasi.
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
7. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian lokal.

4. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan. Pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan.

Potensi perikanan di Kabupaten Dairi diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Potensi Perikanan di Kabupaten Dairi

No	Jenis	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)
I.	**Budidaya**		
1.	Kolam Air Tenang	400	217
2.	Mina Padi	450	391,7
3.	Jaring Apung	20	10
II.	**Perairan**		
1.	Sungai	234	234
2.	Danau	500	500
3.	Bendungan	20	14,1
4.	Genangan Air	200	61
Jumlah		**1.824**	**1.426,8**

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi: Perikanan tangkap di Danau Toba (Kecamatan Silahisabungan) dan sungai-sungai di Kabupaten Dairi. Budidaya perikanan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira, meliputi ikan mas, nila, mujahir, ikan jurung (ihan batak), pora-pora, lele, gabus, belut dan sebagainya.

5. Pertambangan

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggappungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir yang didulang masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Mineral Logam di Kabupaten Dairi

No	Mineral Logam	Lokasi	Cadangan	Keterangan
1.	Timah Hitam	Kecamatan Silima Punggapungga, Tanah Pinem, Tigalingga, Siempat Nempu Hilir	Tereka	Cadangan Pb dan Zn Sebesar 6,324 Juta Ton Biji.
2.	Seng		Tereka	
3.	Perak		Tereka	
4.	Emas	Kecamatan Pegagan Hilir	Hipotesa	

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan-kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.Potensi mineral bukan logam dan batuan serta potensi sumber daya mineral di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dairi

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan
1.	Batu Lempung	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 229,960 M^3
2.	Batu Padas/Tufa Riodasit	Tersebar di seluruh Kecamatan	Hipotesa
3.	Batu Gamping	• Kecamatan Sidikalang • Kecamatan Siempat Nempu • Kecamatan Lae Parira • Kecamatan Siempat Nempu Hulu • Kecamatan Tigalingga • Kecamatan Tanah Pinem • Kecamatan Gunung Sitember	Hipotesa Hipotesa Hipotesa Hipotesa Sekitar 676.312,500 M3 Sekitar 73.235.312,500 M3 Sekitar 13.169.209,375 M3
4.	Sirtu	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
5.	Pasir Kuarsa	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
6.	Marmer	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 135.576 M3

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Tabel 2.8
Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Potensi
1.	Sidikalang	Batu Kapur, Granit, Batu Gamping, Marmer, Sirtu
2.	Sitinjo	Pasir Sedimen, Batu Padas
3.	Berampu	Sirtu
4.	Parbuluan	Radioaktif, Pasir Sedimen
5.	Sumbul	Batu Padas, Sirtu
6.	Silahisabungan	Radioaktif, Sirtu
7.	Silima Punggapungga	Timah Hitam Pasir Kuarsa, Emas, Perak, Seng, Batu Gamping, Sirtu
8.	Lae Parira	Batu Gamping, Batu Padas, Pasir Sedimen
9.	Siempat Nempu	Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Padas, Tanah Liat, Pasir Sedimen
10.	Siempat Nempu Hulu	Batu Gamping, Sirtu
11.	Siempat Nempu Hilir	Timah hitan, Dolomit, Perak, Seng, Perak, Sirtu
12.	Tigalingga	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Gamping, Tanah Liat, Batu Padas, Sirtu
13.	Gunung Sitember	Batu Gamping, Sirtu
14.	Pegangan Hilir	Emas, Sirtu
15.	Tanah Pinem	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Lempung, Marmer, Batu Pualam, Dolomit, Sirtu

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

6. Pariwisata

Jenis Pariwisata di Kabupaten Dairi terdiri dari Pariwisata Alam dan Pariwisata Budaya:

➢ Pariwisata Alam

Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata,

taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

- Pariwisata Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel berikut.

Tabel 2.9
Lokasi Obyek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Dairi

No.	Lokasi/ Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
1.	Sidikalang	Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku, Batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik
2.	Sitinjo	Taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pendaroh, Monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang, Danau Sicike-cike
3.	Parbuluan	Danau Sicike-cike merupakan tempat penelitian (flora & fauna), ekowisata, berkemah
4.	Sumbul	Wisata Hutan Lae Pondom, Waduk PLTA Renun, Rumah Adat Pakpak (Sikabeng-kabeng), Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Partulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matahari, Mejan Palalahan
5.	Silahisabungan	Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian, Batu Sigadap, Danau Toba (Perahu Layar, Speed Boat, Berenang), Wisata Gunung (Hiking, Gantole, Camping), Wisata Hutan (Lintas Alam, Kemah)
6.	Silima Punggapungga	Mata Air Situs Sisingamangaraja XII, Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang
7.	Lae Parira	Bantun Kerbo (situs kerbau menjadi batu)
8.	Siempa Nempu Hulu	Letter Z (Kilometer 11), Gua Sitanduk-tanduk, Batu Pangulubalang Sanggapati
9.	Siempat Nempu Hilir	Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornauli, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)
10.	Tigalingga	Lau Belulus, Tank Peninggalan Sejarah, Goa (dalamnya ± 500 meter)
11.	Gunung Sitember	Kendet Liang
12.	Pegagan Hilir	Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan (tempat pemujaan)
13.	Tanah Pinem	Danau/Waduk diatas Gunung (luas ± 3 Ha), Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Adapun program yang diperlukan untuk pengembangan kawasan pariwisata adalah:

1. Pengembangan kawasan wisata terpadu yang dipusatkan di Kota Sidikalang. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata.
   b. Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai even promosi.
   c. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai obyek–obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai obyek wisata.
   b. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata.
   c. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Potensi bencana di Kabupaten Dairi terdiri dari Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuefaksi dan Tanah Longsor (KRB Kab. Dairi, 2025-2029)

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi

dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2015 – 2024, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data tersebut, kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana : Banjir, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Tanah Longsor. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2015-2024

NO	JENIS BENCANA	Jumlah Kejadian	Korban					Kerusakan Rumah		
			Meniggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Berat	Sedang	Ringan
1	Banjir	6	6	1	4	392	95	18	2	67
2	Cuaca Ekstrem	3	0	0	7	5	0	5	0	28
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kekeringan	3	0	0	0	645	0	5	12	129
5	Tanah Longsor	5	9	3	12	42	0	4	0	4
Jumlah		20	15	4	23	1.034	95	32	14	228

Sumber: KRB Kabupaten Dairi 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kejadian yang tercacat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Dairi serta DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) terdapat bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Terlihat bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi dalam kurun waktu 2015-2024 yaitu sebanyak 5 kali, yang mana kejadian tersebut berdampak terhadap Masyarakat dan pemukiman Masyarakat.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				
			KELOMPOK RENTAN				KELAS
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK USIA RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK DISABILITAS	
1	Banjir	8.818	105	1.886	5.124	11	Tinggi
2	Banjir Bandang	7.307	105	1.625	4.322	9	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	216.402	111	46.590	128.255	576	Tinggi
4	Gempa Bumi	329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi
7	Likuefaksi	494	103	114	298	4	Tinggi
8	Tanah longsor	24.904	120	5.645	17.785	96	Sedang
MULTI BAHAYA		329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan per jenis bahaya berada pada kelas tinggi untuk semua jenis bencana yang berpotensi di Kabupaten Dairi, terkecuali bencana likuefakasi yang berada pada kelas sedang. Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan hanya terjadi di kawasan non-pemukiman warga.

Tabel 2.12
Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA	KERUGIAN (JUTA RUPIAH)						KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KELAS FISIK	KERUGIAN EKONOMI	KELAS EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS KERUGIAN	LUAS	KELAS
Banjir	20.719,60	Tinggi	11.603,33	Tinggi	32.322,93	Tinggi	340	Sedang
Banjir Bandang	38.277,53	Tinggi	50.778,60	Tinggi	89.056,10	Tinggi	1.079	Tinggi
Cuaca ekstrim	1.247.948,26	Tinggi	554.326,35	Tinggi	1.802.274,62	Tinggi	-	-
Gempa Bumi	3.955.337,03	Tinggi	1.563.014,91	Tinggi	5.518.351,94	Tinggi	-	-
Kebakaran hutan dan lahan	-	-	737.601,94	Tinggi	737.601,94	Sedang	18.696	Tinggi
Kekeringan	-	-	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah
Likuefaksi	18.114,82	Tinggi	333,34	Tinggi	18.448,17	Tinggi	12	Rendah
Tanah longsor	205.142,10	Tinggi	375.521,35	Tinggi	580.663,45	Tinggi	52.854	Tinggi
Multi	3.958.134,78	Tinggi	1.571.584,45	Tinggi	5.529.719,23	Tinggi	75.766	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis bencana yang ada di Kabupaten Dairi berada pada kelas kerugian rendah, sedang dan tinggi. Total perkiraan jumlah kerugian terbanyak adalah bencana gempabumi sedangkan kerugian terkecil untuk jenis bencana likuefaksi. Jika dilihat dari kelas kerusakan lingkungan tergolong pada kelas rendah, sedanf dan tinggi dimana potensi kerusakan lingkungan terbesar untuk jenis bencana longsor.

Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Kabupaten Dairi, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerentanan lingkungan. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS KERENTANAN
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
4	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	Sedang	Tinggi	Tinggi
6	Kekeringan	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
7	Likuefaksi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
8	Tanah longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Multi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di Kabupaten Dairi terbagi menjadi kelas kerentanan sedang dan tinggi. Untuk potensi bahaya yang tergolong kelas kerentanan sedang yaitu bencana banjir, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor. Sedangkan potensi bahaya tergolong kelas kerentanan tinggi adalah bencana banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan gempa bumi.

2.1.5. Kondisi Umum Demografi

Demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Demografi atau kependudukan memiliki urgensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah karena berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Dengan mengetahui kondisi demografi suatu daerah, dapat membantu merumuskan yang berkualitas dan tepat sasaran terutama dalam penyediaan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah 330.586 jiwa, terdiri dari 165.937 jiwa penduduk laki-laki (50,19%) dan 164.649 jiwa penduduk perempuan (49,80%).

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Dairi adalah sebesar 100,78 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat rata-rata lebih dari 100 penduduk laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi hampir seimbang.

Pada tabel berikut tampak bahwa dari 15 kecamatan pada Tahun 2024, terdapat sembilan kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin 100 persen ke atas, yaitu Kecamatan Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu, Tigalingga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Gunung Sitember, Berampu dan Sitinjo. Hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan-kecamatan tersebut lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara tujuh kecamatan yang lain mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen,yang mempunyai arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Tabel 2.14
Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sidikalang	28.283	29.330	57.612	96,43
2	Berampu	4.908	4.622	9.530	106,19
3	Sitinjo	8.129	7.367	15.496	110,34
4	Parbuluan	13.920	13.999	27.919	99,44
5	Sumbul	24.790	23.032	47.822	107,63
6	Silahisabungan	2.803	3.217	6.020	87,13
7	Silima Punggapungga	7.610	8.024	15.634	94,84
8	Lae Parira	7.490	8.284	15.774	90,42
9	Siempat Nempu	10.776	10.627	21.403	101,40
10	Siempat Nempu Hulu	10.895	10.396	21.294	104,80
11	Siempat Nempu Hilir	6.347	6.218	12.565	102,07
12	Tigalingga	12.893	12.773	25.666	100,94
13	Gunung Sitember	5.943	5.274	11.217	112,86
14	Pegagan Hilir	8.917	9.450	18.367	94,36
15	Tanah Pinem	12.234	12.036	24.270	101,65
Jumlah		165.937	164.649	330.586	100,78

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah yang paling padat di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang dengan jumlah kepadatan sebesar 815,23 jiwa/km^2. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Sidikalang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari

Kabupaten Dairi. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Dairi.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dairi Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km²)	%	
1	Sidikalang	57.612	70,67	17,43	815,23
2	Berampu	9.530	192,58	2,88	236,55
3	Sitinjo	15.496	197,00	4,69	296,90
4	Parbuluan	27.919	60,15	8,45	121,67
5	Sumbul	47.822	88,35	14,47	251,37
6	Silahisabungan	6.020	439,4	1,82	82,43
7	Silima Punggapungga	15.634	93,93	4,73	180,53
8	Lae Parira	15.774	105,62	4,77	376,80
9	Siempat Nempu	21.403	155,33	6,47	360,95
10	Siempat Nempu Hulu	21.294	235,4	6,44	229,79
11	Siempat Nempu Hilir	12.565	42,75	3,80	121,02
12	Tigalingga	25.666	77,00	7,76	131,94
13	Gunung Sitember	11.217	40,85	3,39	147,39
14	Pegagan Hilir	18.367	75,62	5,56	121,05
15	Tanah Pinem	24.270	53,15	7,43	56,14
Jumlah		330.586	1.927,80	100	174,50

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Sidikalang sebagai ibu kota kabupaten.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur ini dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari pengelompokan ini diperoleh informasi penting dan dibutuhkan dalam pengembangan kebijakan kependudukan.

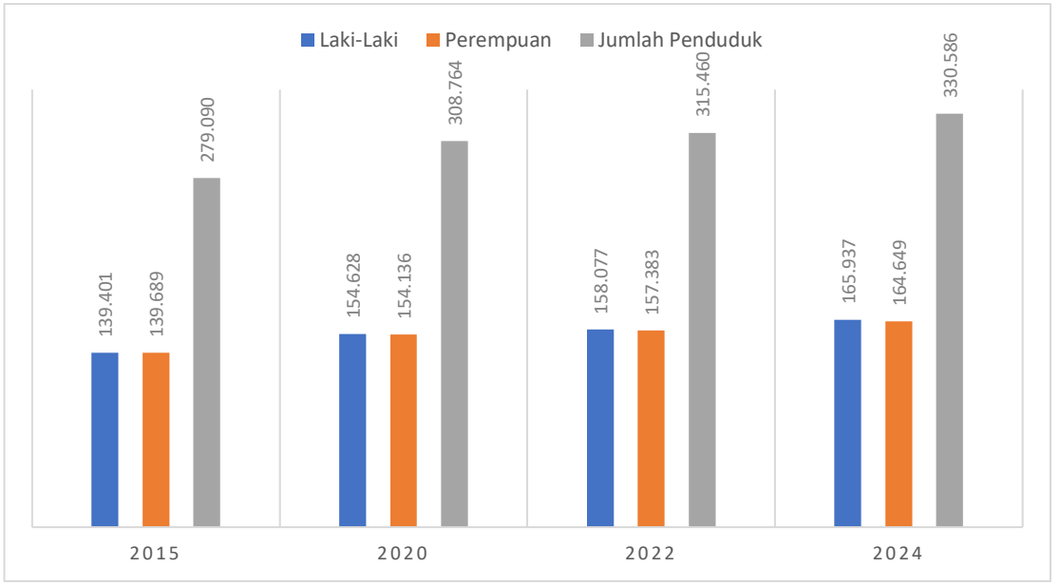
Tabel 2.16
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 4	17.306	16.563	33.869	104,49
2	5 – 9	15.005	14.161	29.166	105,96
3	10 – 14	15.806	15.007	30.813	105,32
4	15 – 19	16.169	15.397	31.566	105,01
5	20 – 24	15.859	15.026	30.885	105,54
6	25 – 29	14.876	13.812	28.688	107,70
7	30 – 34	12.404	11.127	23.531	111,48
8	35 – 39	10.748	9.843	20.591	109,19
9	40 – 44	9.780	9.207	18.987	106,22
10	45 – 49	9.304	8.929	18.233	104,20
11	50 – 54	7.840	7.991	15.831	98,11
12	55 – 59	6.664	7.556	14.220	88,19
13	60 – 64	5.394	6.554	11.948	82,30
14	65 – 69	4.222	5.717	9.939	73,85
15	70 – 74	2.666	4.067	6.733	65,55
16	75 +	1.894	3.692	5.586	51,30
Jumlah		165.937	164.649	330.586	100,78

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Tabel 2.16 di atas menunjukkan penduduk Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif atau pada rentang usia 15-64 tahun, yaitu sebesar 214.480 jiwa. Usia ini merupakan usia yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan. Sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban atau pada rentang usia 0-14 tahun yaitu sebesar 93.848 jiwa dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau pada rentang usia 65 tahun keatas sebesar 22.258 jiwa. Pada umumnya rasio jenis kelamin pada kelompok umur (45-49) tahun hingga di atas 75 tahun yang semakin kecil selain disebabkan oleh tingkat *mortalitas* penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan, juga dapat disebabkan oleh *migrasi* ke luar daerah yang lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan.

Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Dari tahun 2015 hingga 2024, jumlah penduduk Kabupaten Dairi mengalami penambahan setiap periode. Penambahan jumlah penduduk sebesar 1,3 persen sampai 1,84 Persen Pertahun dengan komposisi penambahan penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan. Komposisi penduduk pada tahun 2015 hingga 2024 penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Meskipun demikian, rasio jenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda dengan rentang 100,44-100,78 persen dari tahun 2015 hingga 2024.

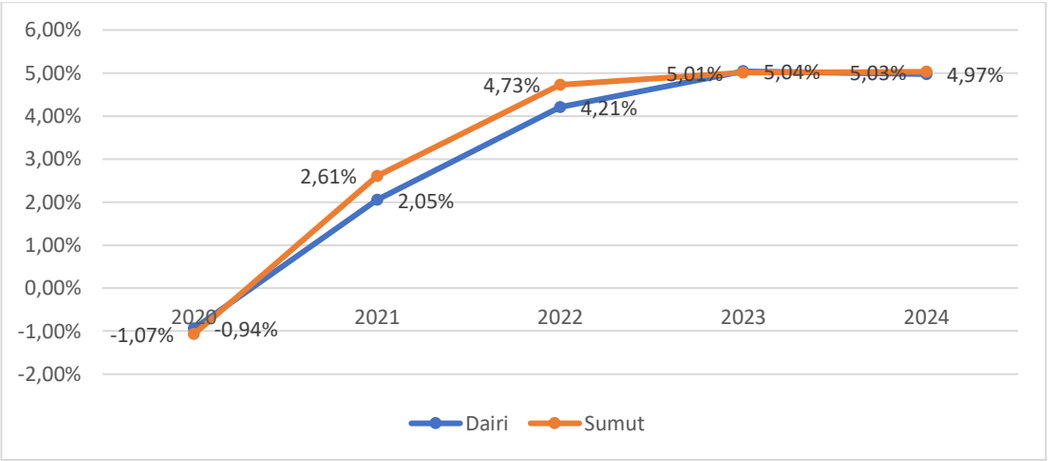
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi selama periode 2020-2024 menunjukkan trend fluktuatif. Pada Tahun 2020 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami kontraksi sebesar -0,94%, hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19, namun pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,05%, dan kembali meningkat di Tahun 2022 menjadi 4,21%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan diangka 5,04%, sementara pada Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan ke angka 4,97%.

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Dairi dan PDRB Sumatera Utara, Tahun 2020-2024
(Persen)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional, perlu dilakukan optimalisasi atas potensi sektor ekonomi, terutama di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial serta Transportasi dan Pergudangan.

2.2.3. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

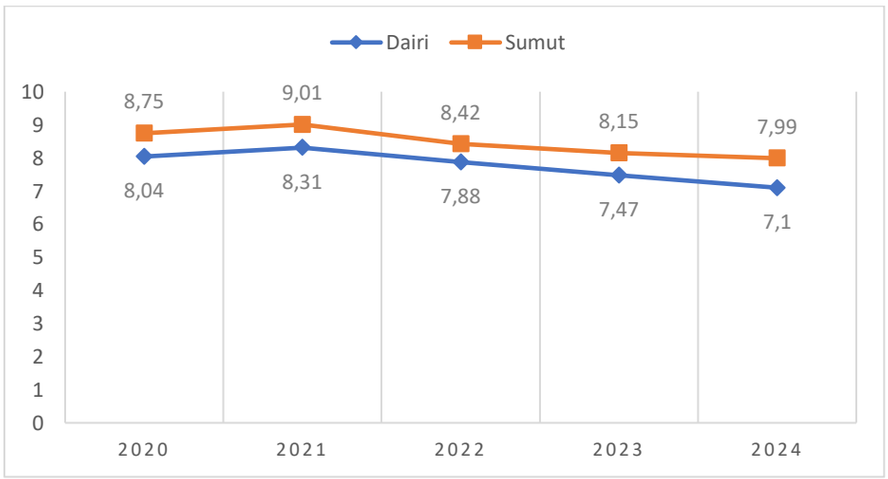
Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimun non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 8,04 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan hingga Tahun 2024 hingga mencapai 7,10%.

Gambar 2.4
Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024 (%)



Sumber : Dairi Dalam Angka, BPS Sumatera Utara 2025.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa trend persentase kemiskinan di kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 cukup fluktuatif dimana berada di angka 8,04% pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 naik menjadi 8,31% dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7,88% dan terjadi penurunan pada Tahun 2023 menjadi 7,47% kemudian pada Tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi 7,10%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020–2024 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera

Utara dimana pada Tahun 2020 menurun menjadi 8,75% pada Tahun 2021 meningkat menjadi 9,01% dan pada Tahun 2022 menurun menjadi 8,42% dan kembali menurun pada Tahun 2023 ke angka 8,15%, kemudian pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 7,99%.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

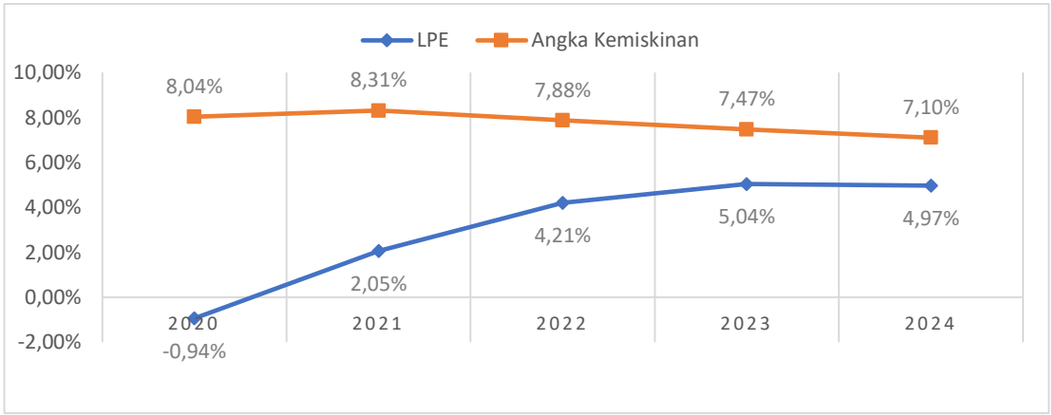
Berdasarkan data pada tabel berikut indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 1,09, pada Tahun 2021 mencapai 1,24, dan pada Tahun 2022 menurun di angka 0,65 dan meningkat ke angka 0,93 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 0,79. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 0,20 dan pada Tahun 2021 meningkat mencapai angka 0,28 dan menurun di angka 0,08 pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,17, kemudian pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,15.

Tabel 2.17
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi, Tahun 2020 – 2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,09	1,24	0,65	0,93	0,79
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,20	0,28	0,08	0,17	0,15

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Gambar 2.5
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, namun kenyataannya hubungan ini tidak selalu linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi menurun diakibatkan oleh pandemik Covid-19 diikuti meningkatnya angka kemiskinan. Namun pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tapi tidak diikuti penurunan angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh pemulihan pasca pandemic Covid-19.

Program penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.18
Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

No.	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran

No.	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
4	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Rehabilitasi Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Penanganan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Mengurangi Beban Pengeluaran
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pendapatan
		Program Hubungan Industrial	Meningkatkan Pendapatan
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Khusus Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Mengurangi Beban Pengeluaran
8	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

No.	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatkan Pendapatan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

2.2.4. PDRB Kabupaten Dairi

2.2.4.1. Nilai PDRB Kabupaten Dairi

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.19
PDRB per kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, 2020-2024 (Ribu Rupiah)

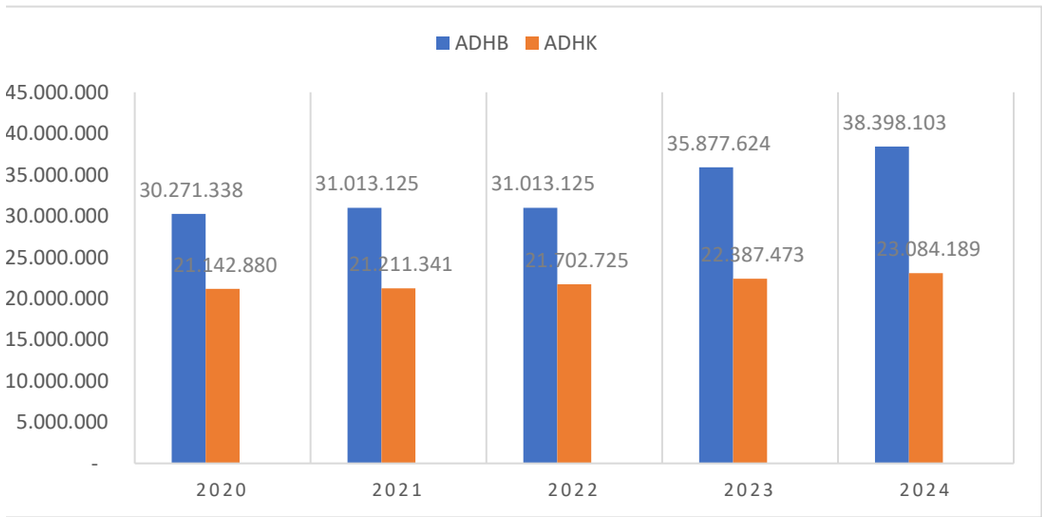
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Atas Dasar Harga Berlaku	30.271.338	31.013.125	31.013.125	35.877.624	38.398.103
Atas Dasar Harga Konstan	21.142.880	21.211.341	21.702.725	22.387.473	23.084.189

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 sebesar 30.271.338, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 nilainya sama menjadi 31.013.125 ribu rupiah pada Tahun 2023 meningkat menjadi 35.877.624, angka tersebut meningkat menjadi 38.398.103 Tahun 2024.

Sementara itu dari perhitungan harga konstan, periode Tahun 2020 sebesar 21.142.880, pada Tahun 2021 sebesar 21.211.341 dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 21.702.725, kemudian pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 22.387.473 dan pada Tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 23.084.189.

Gambar 2.6
PDRB per kapita Kabupaten Dairi berdasarkan ADHB dan ADHK
Tahun 2020-2024 (Rupiah)

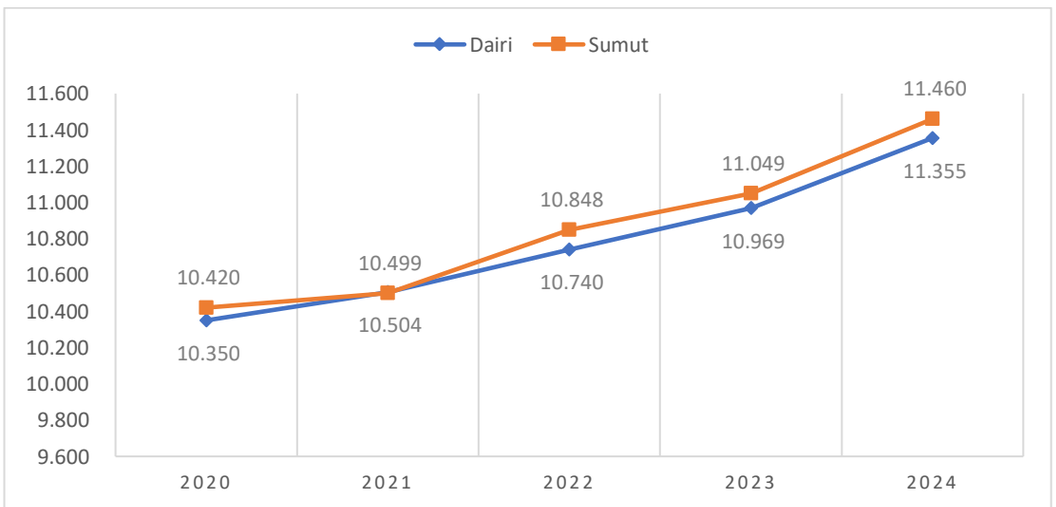


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

2.2.4.2. PDRB Menurut Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.7
Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun 2020 -2024 (ribu rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita penduduk pada Tahun 2020 sebesar 10.350 ribu rupiah per kapita per tahun,

lalu meningkat pada Tahun 2021 menajdi 10.504 ribu rupiah perkapita dan meningkat kembali Tahun 2022 menjadi 10.740 ribu rupiah per kapita. Pada Tahun 2023 pengeluaran perkapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi 10.969 ribu rupiah serta Pada Tahun 2024 pengeluaran perkapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi 11.355 ribu rupiah. Hal serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan.

2.2.4.3. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu mencolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi, bisa berefek pada semakin melebarnya kesenjangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) atau ketimpangan antar daerah (maju dan tertinggal).

Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini digunakan untuk menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu. Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

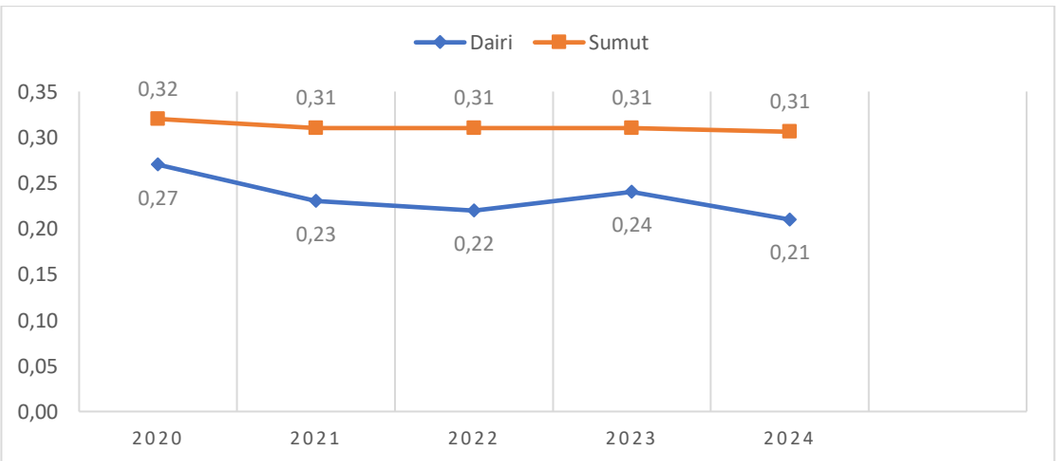
Hasil perhitungan Gini Ratio akan bergerak dari angka nol sampai dengan satu dengan pengertian umum bahwa bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan apabila angka Gini Ratio yang diperoleh mendekati angka satu dikatakan sangat timpang. Angka Gini Ratio umumnya bervariasi, tergantung pada tingkat

pembangunan suatu daerah. Kecendrungan fakta yang terjadi adalah pada daerah perkotaan Gini Ratio akan cenderung lebih tinggi karena lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kebanyakan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah pedesaan akan lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai Gini Ratio yang dimulai dari 0-1 dibagi dalam beberapa kategori. Jika nilai Gini Ratio, G=0, maka di daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan kata lain terjadi pemerataan sempurna. Jika nilai Gini Ratio 0<G<0,3 maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori rendah. Jika nilai Gini Ratio, 0,3<G<0,5 maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori sedang. Jika nilai Gini Ratio, 0,5<G<1 maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori tinggi. Dan jika nilai Gini Ratio, G=1 maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori ketimpangan sempurna.

Mengingat angka Gini Ratio pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, maka peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin dalam daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa angka Gini Ratio akan cenderung tinggi bila jumlah penduduk miskin di daerah bersangkutan juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, angka Gini Ratio akan cenderung lebih rendah bilamana jumlah penduduk miskin berkurang.

Gambar 2.8
Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2020 -2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2025.

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi Tahun 2020 berada pada angka 0,27, nilai gini ratio Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan gini ratio Kabupaten Dairi atau berada pada angka 0,32. Nilai gini ratio Sumatera Utara cenderung stabil diatas angka 0,31 sedangkan nilai gini ratio Kabupaten Dairi cenderung berfluktuasi di bawah angka 0,27.

2.2.5. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.5.1. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang. Garis kemiskinan berguna sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase dan jumlah masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk menanggulangi kemiskinan, program stabilisasi harga dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi kemiskinan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Identifikasi masyarakat rentan miskin di Kabupaten Dairi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 67 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk kategori rentan miskin. Masyarakat rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Klasifikasi rentan miskin juga termasuk mereka juga berasal dari rumah tangga dengan kepala keluarga yang sudah pensiun atau lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan berpenyakit kronis. Saat ini kelompok rentan miskin ini cukup banyak dan didominasi mereka yang usianya antara 18 hingga 35 tahun.

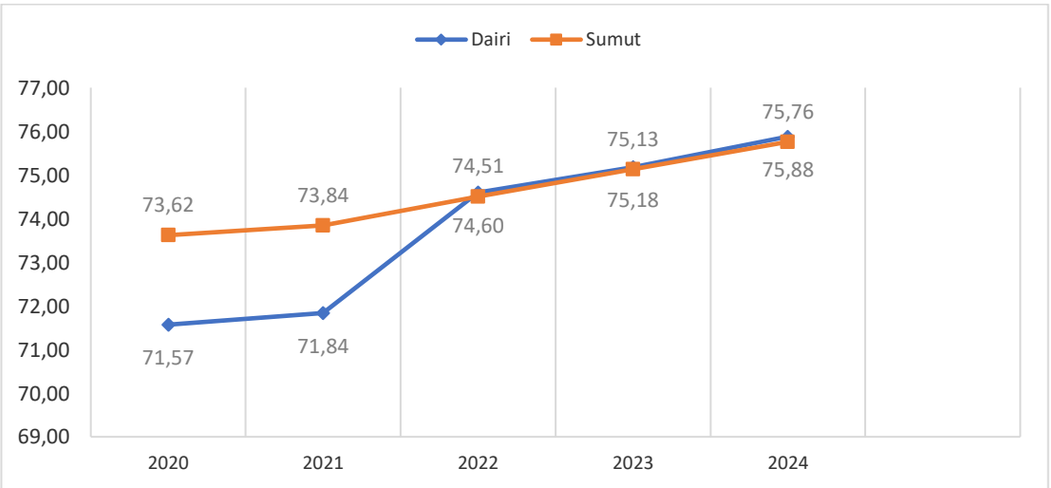
Pemerintah Kabupaten Dairi harus bekerja keras untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan

dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 84/400.9.14/III/2025 tanggal 12 Maret 2025. Berdasarkan Permendagri nomor 53 Tahun 2020 bahwasanya Strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RAT mengacu kepada strategi kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

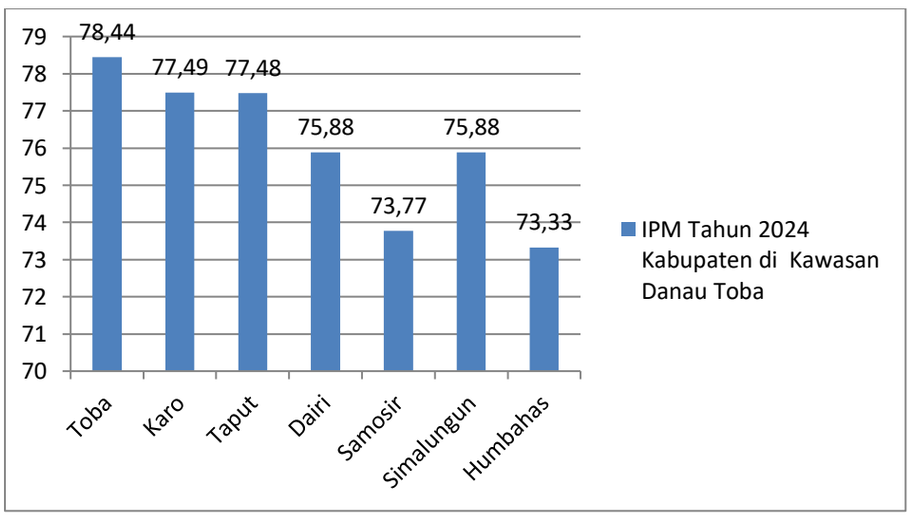
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi sebesar 71,57 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 71,84 dan pada Tahun 2022 sebesar 72,56, pada Tahun 2023 adalah sebesar 75,18, dan pada tahun 2024 sebesar 75,88, meningkat sebanyak 0,93 persen dari tahun sebelumnya. Sejak Tahun 2022 sampai 2024, IPM Kabupaten Dairi berada sedikit diatas IPM Provinsi Sumatera Utara.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak hanya diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat pembangunan dari satu aspek

saja yaitu aspek ekonomi sedangkan aspek yang lainnya tidak diperhitungkan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah seharusnya juga dilihat dari sisi keberhasilan pembangunan manusianya. Konsep pembangunan manusia merupakan konsep yang menginginkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Kualitas hidup masyarakat yang baik mencerminkan terjadinya pemerataan pembangunan di daerah tersebut dimana semua masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tidak hanya pada segelintir orang.

Kabupaten Dairi bersama enam Kabupaten lain, yakni : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir merupakan tujuh Kabupaten yang mendiami kawasan Danau Toba. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada dikawasan Danau Toba, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 berada pada posisi keempat dari tujuh Kabupaten di kawasan Danau Toba.

Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten di Kawasan Danau Toba, Tahun 2024



Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2025.

Tabel 2.20
Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
60 ≤ IPM ≤ 70	Sedang
70 ≤ IPM ≤ 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Dairi masih mencapai angka 77,88 dan berada pada status “tinggi”.

Tabel 2.24 IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi Tahun 2024

Komponen	Nilai
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,38
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,53
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,89
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/Tahun)	Rp. 11.355
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	75,88

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan masyarakat (Angka Harapan Hidup Waktu Lahir), dan daya beli (Pengeluaran Konsumsi).

2.2.5.3. Kondisi Kesehatan

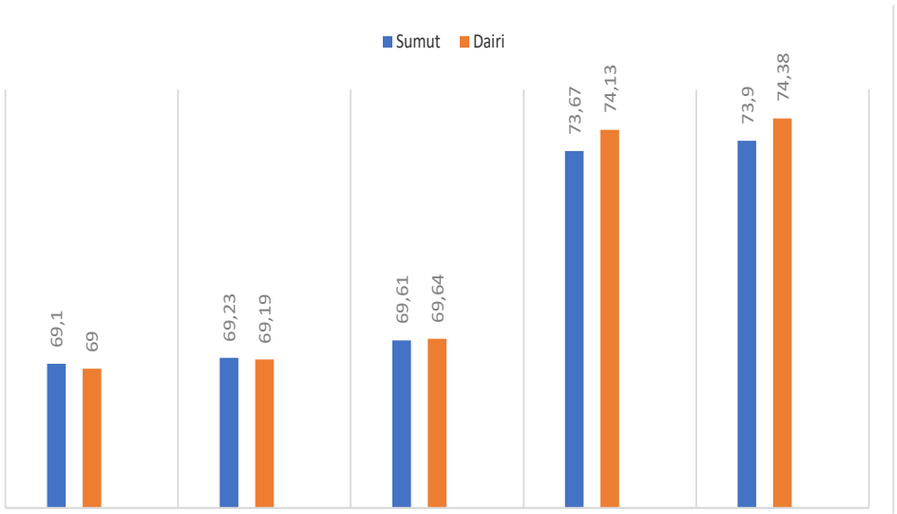
Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

A. Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dua tahun terakhir yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut

Gambar 2.11
Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Angka Usia Harapan Hidup kabupaten Dairi pada Tahun 2024 adalah 74,38 lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yaitu 73,90. Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

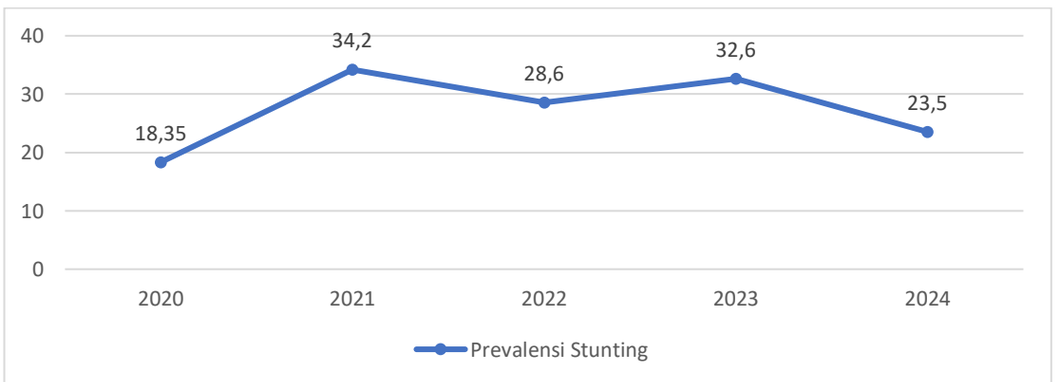
B. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebagai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

C. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target 14 Persen pada tahun 2024. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya. Selama periode lima tahun (2020-2024), di Kabupaten Dairi terjadi peningkatan prevalensi stunting yang cukup signifikan yakni sebanyak 28,06 persen. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan stunting adalah yakni komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting melalui upaya lintas sektor dan fokus pada desa lokus stunting. Selain itu, Kemenkes menetapkan Kabupaten Dairi sebagai lokus penanganan stunting. Ada 20 desa lokus stunting yaitu di Puskesmas Sigalingging 5 desa, Puskesmas Sumbul 3 desa, Puskesmas Bakkal Gajah 2 desa, Puskemas Sopobutar 4 desa, Puskesmas Parongil 1 desa, Puskesmas Gunung Sitembar 2 desa, Puskesmas Bunturaja 2 desa, dan puskesmas kilometer 11 ada 1 desa. Dengan demikian, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Dairi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 12
Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber: SSGI, 2024

D. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 13
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



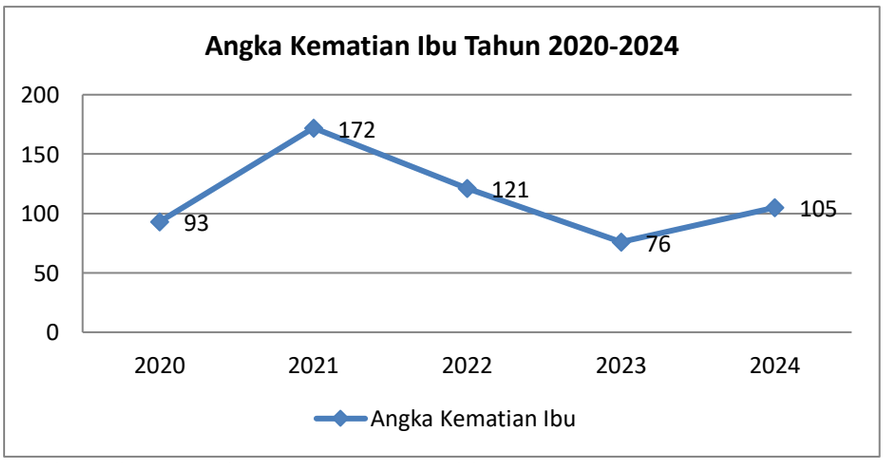
Sumber : LPPD, Kabupaten Dairi

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus, dan meningkat bila dibandingkan dengan pada Tahun 2024 menjadi 10 kasus.

E. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 14
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



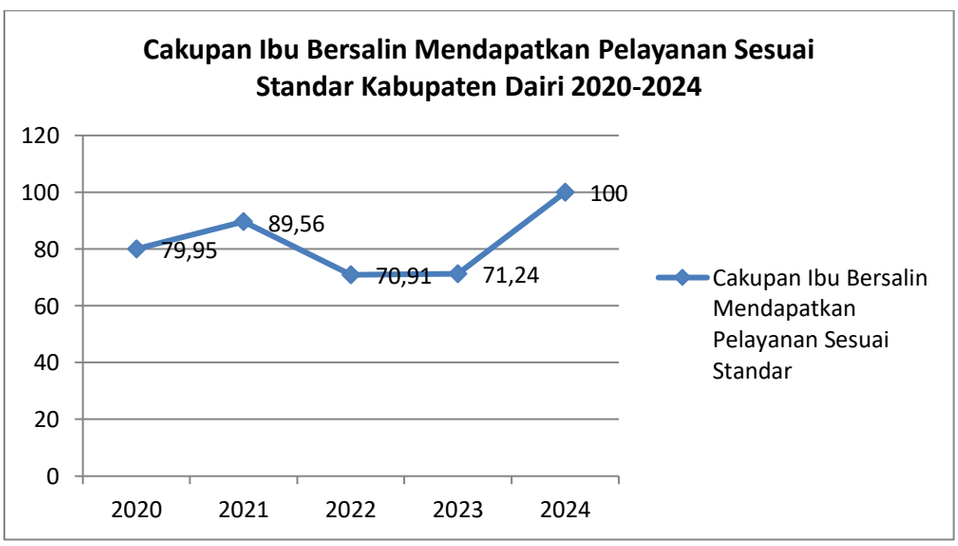
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sangat fluktuatif . AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2024 sebanyak 105 per 100.000 kelahiran hidup Capaian tersebut kurang baik karena sudah berada diatas target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga, upaya penanganan kasus kematian ibu perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (*Antenatal Care*), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (*Postnatal Care*).

F. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 15
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



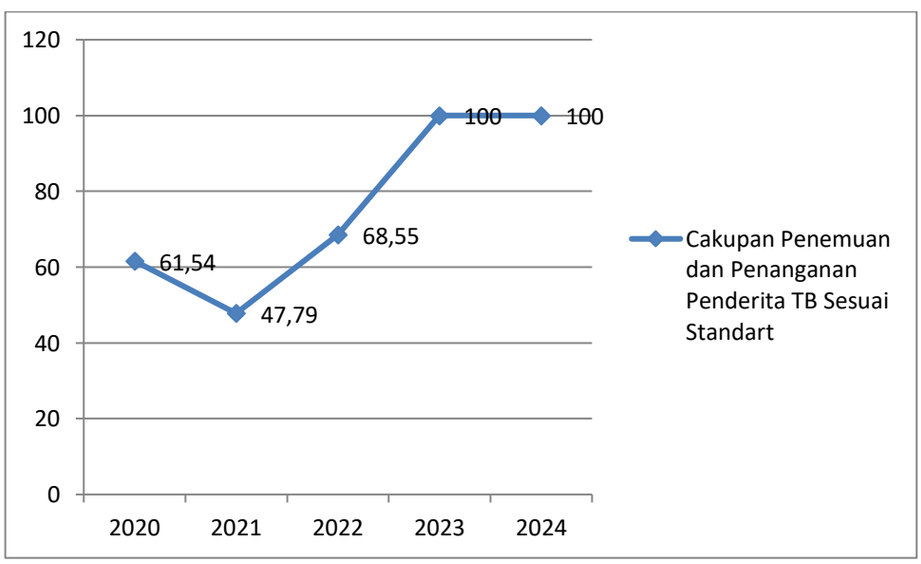
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar sebesar 79,95 persen, meningkat menjadi 89,56 persen pada Tahun 2021 namun pada tahun 2022 menurun menjadi 70,91 dan pada Tahun Tahun 2022 sebesar 100 persen, pada tahun 2023 menjadi 71,24 persen dan pada tahun 2024 menjadi 100 persen. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih meggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan di daerah daerah tersebut.

G. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Jika dilihat dari tabel dibawah terjadi peningkatan Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 61,54 persen,menjadi 100 persen di Tahun 2023 dan 2024.

Gambar 2.16
Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

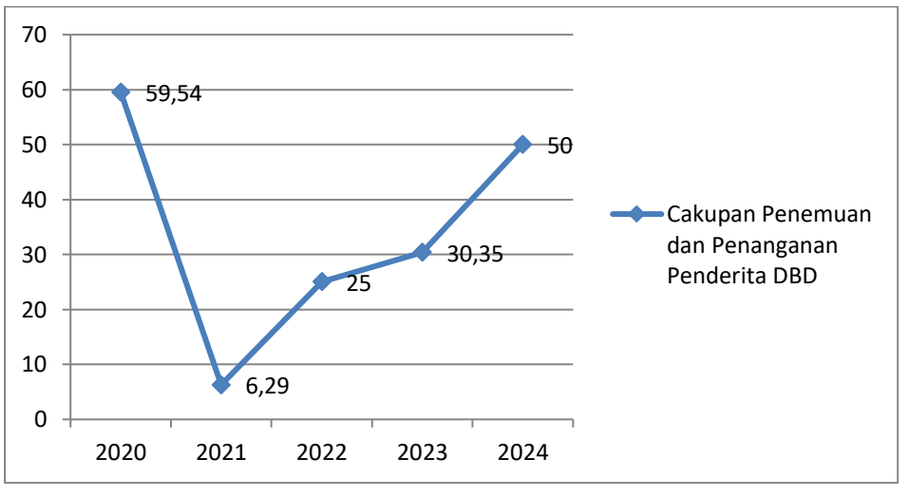


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

H. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 17
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

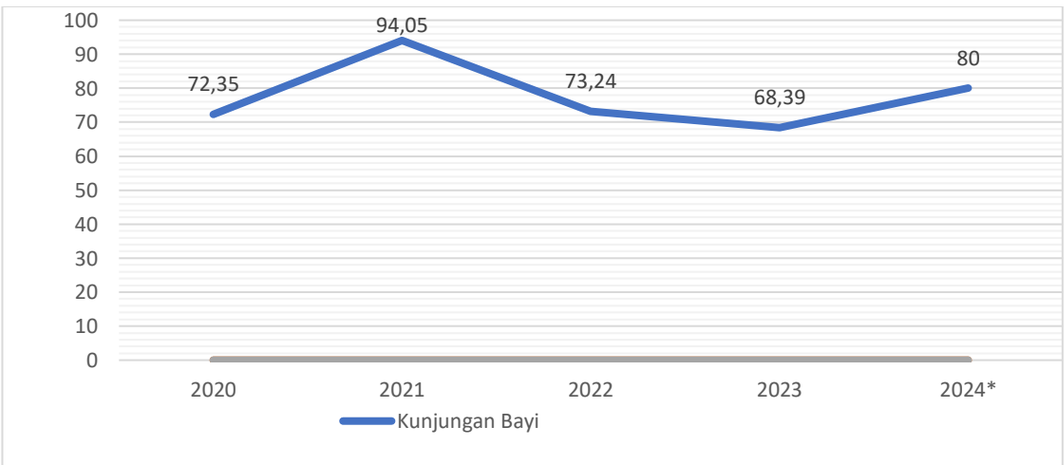


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

I. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.18
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-202



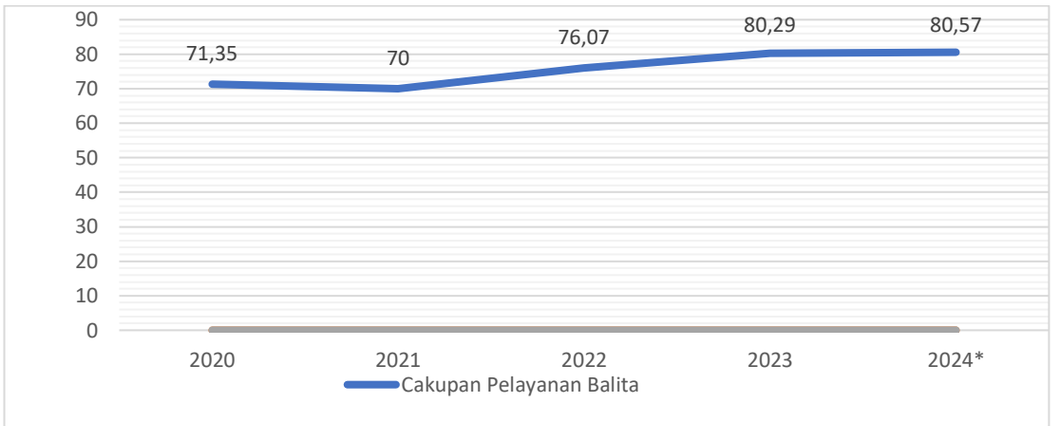
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

J. Cakupan Pelayan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita sebesar 71,35% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00%, pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07%, pada Tahun 2023 kembali

meningkat menjadi 80,29% dan juga pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 80,57%.

Gambar 2.19
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



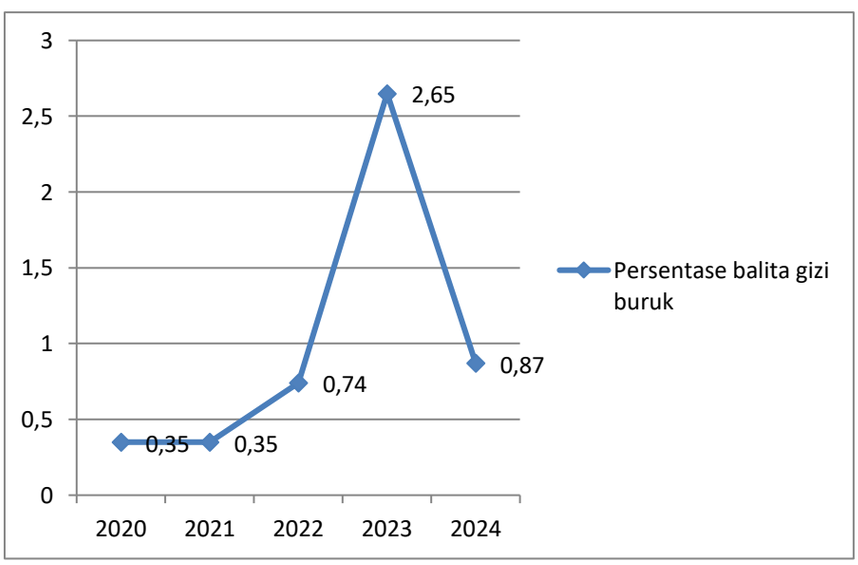
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

K. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal (golden period) terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidakcukupan gizi pada masa golden period tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut:

Gambar 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

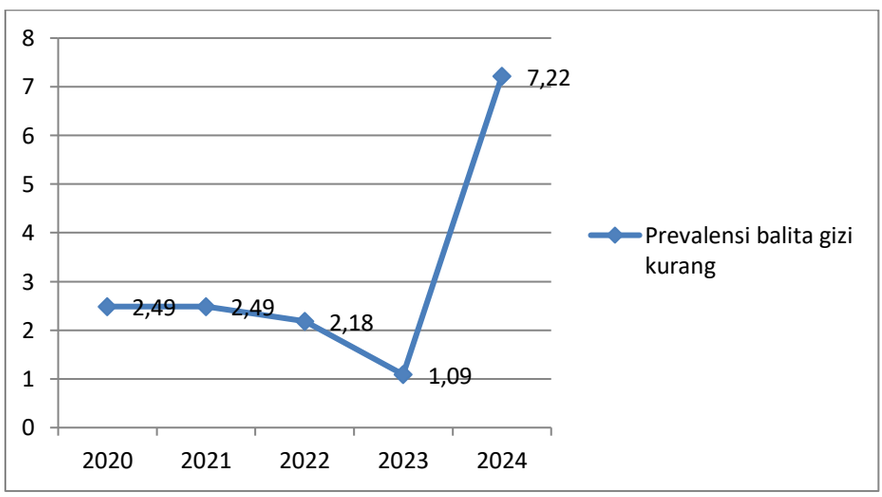
Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Dairi fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 0.35%, ditahun 2021 sebesar 0,35%, kemudian naik menjadi sebesar 0,74% pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 naik menjadi 2,65 namun di tahun 2024 turun menjadi 0,87%, pada Tahun 2024.

L. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya dikemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk.

Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 21
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

M. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebgai gambaran umum terkait

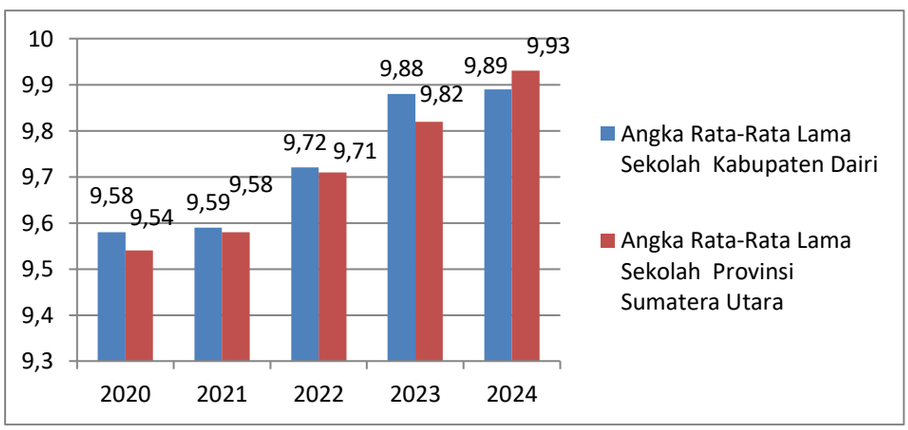
kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan public dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

2.2.5.4. Kondisi Pendidikan

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata. Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Dairi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut:

Gambar 2. 22
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024 (Tahun

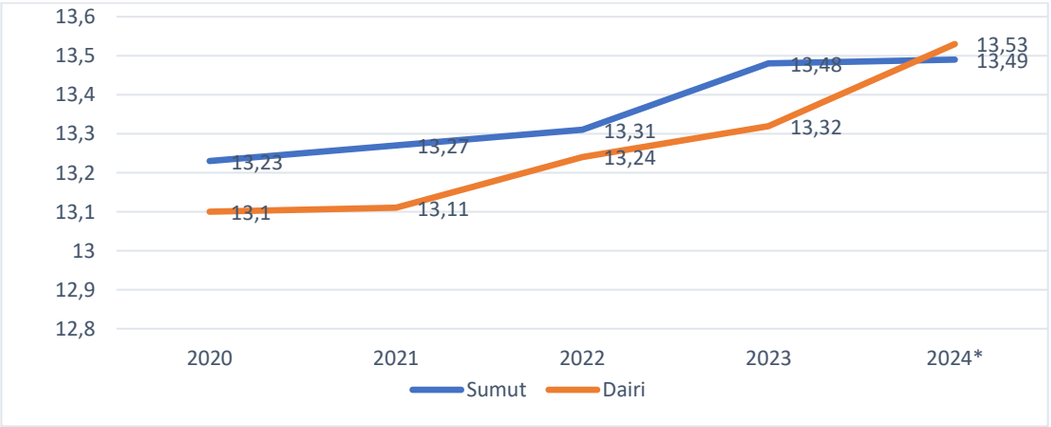


Sumber : BPS Sumatera Utara, Dairi Dalam Angka 2025.

Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 tercatat diangka 9.58 dan pada Tahun 2021 tercatat di angka 9,59 dan tercatat di angka 9,72 pada Tahun 2022, meningkat ke angka 9,88 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dairi menjadi sebesar 9,89 tetapi masih dibawah Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,93. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Dairi telah menempuh pendidikan hingga 9,89 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA kelas 1.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut : Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024



Sumber : BPS Sumatera Utara, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi masih 13,11, sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 13,27. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 13,24 sedangkan rata-rata lama sekolah milik Provinsi Sumatera Utara yaitu 13,31 dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 13,32 dan provinsi menjadi 13,48. Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah yang cukup signifikan ini memberi dampak yang positif kepada Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2024 harapan tersebut meningkat ke jenjang sarjana yaitu 13,53.

Bisa kita simpulkan dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukan adanya peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat petumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian

(stock) dan penambahan *(flow)* sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Dairi.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah dengan menjadi salah satu komponen pembentuk capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan, dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah. Keenam indikator tersebut digunakan untuk melihat gambaran pembangunan dalam aspek pendidikan di Kabupaten Dairi.

1. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/Negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	111,00	98,24	101,79	111.34	101,66
SMP	98,24	99,10	95,82	89,12	94,41

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

Angka Partisipasi kasar SD rata-rata diatas 100%, dimana pada Tahun 2020 sebesar 111,00, pada Tahun 2021 sebesar 98,24 dan pada Tahun 2022 sebesar 101,79, pada Tahun 2023 terjadi

peningkatan menjadi 111,34% dan Tahun 2024 menurun menjadi 101,66%. Capaian APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang telah menempuh sekolah ketika belum cukup umur atau bahkan melebihi umur yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMP rata-rata meningkat setiap tahun dimana pada Tahun 2020 sebesar 98,24 dan pada Tahun 2021 sebesar 99,10%, pada Tahun 2022 sebesar 95,82, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 89,12 % dan Tahun 2024 kembali naik menjadi 94,41%.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan, perkembangan APM Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2. 22
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	99,19	89,40	93,78	99,28	98,95
SMP	90,21	90,18	87,70	77,47	78,14

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2020 sebesar 99,19 pada Tahun 2021 turun menjadi 89,40 dan meningkat kembali pada Tahun 2022 menjadi 93,78 dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 99,28. Tahun 2024 menurun menjadi 98,95. Angka Partisipasi Murni SMP selama Tahun 2020-2024 dimana pada Tahun 2020 sebesar 90,21, pada tahun 2021 menurun menjadi 90,18 dan pada Tahun 2022 menurun kembali menjadi 87,70 dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 77,47. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 78,14.

3. Angka Putus Sekolah

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	0,55	0,57	0,05	0,02	0,11
SMP	0,93	0,94	0,03	0,03	0,05

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024.

Angka Putus Sekolah SD pada Tahun 2020 sebesar 0,55 dan pada Tahun 2021 sebesar 0,57 dan Tahun 2022 sebesar 0,05, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,02 dan meningkat menjadi 0,11 pada Tahun 2024. Angka Putus sekolah SMP pada Tahun 2020 sebesar 0,93 dan pada Tahun 2021 sebesar 0,94 dan pada Tahun 2022 sebesar 0,03 dan pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,03 dan meningkat menjadi 0,05 pada Tahun 2024.

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang pendidikan SD dan SMP dari Tahun 2020-2024 telah mencapai seratus persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024*
SD	100	100	100	100	100
SMP	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA dari Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD ke SMP	124,27	91,49	99,81	99,81	98,82
SMP ke SMA	89,85	97,03	96,59	96,59	105,37

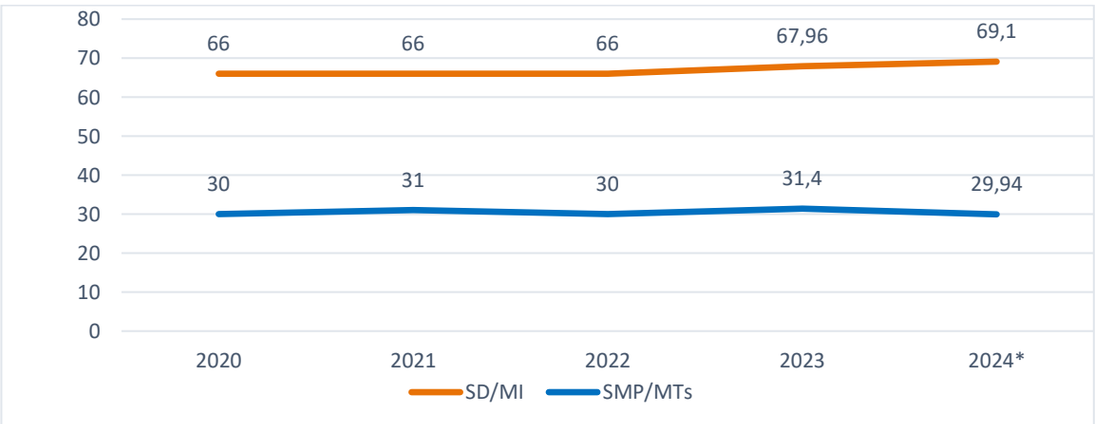
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

Angka Melanjutkan SD ke SMP pada, Tahun 2020 sebesar 124,27, Tahun 2021 sebesar 91,49 dan menjadi 99,81 pada Tahun 2022, Tahun 2023 99,81 dan pada tahun 2024 sebesar 98,82.. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada Tahun 2020 sebesar 89,85, pada Tahun 2021 menjadi 97,03 dan pada Tahun 2022 sebesar 96,59 , Tahun 2023 sebesar 96,59 dan pada tahun 2024 menjadi 105,37.

6. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Tahun 2024 untuk SD/MI adalah 69,10 dan SMP/MTs adalah 29,94.

Gambar 2.23
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024 (%)

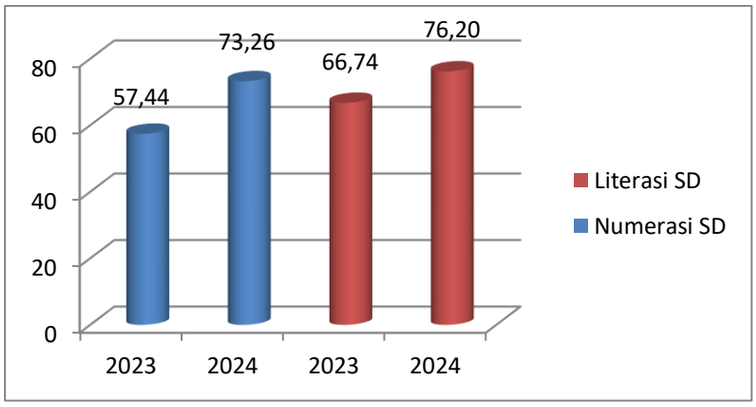


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

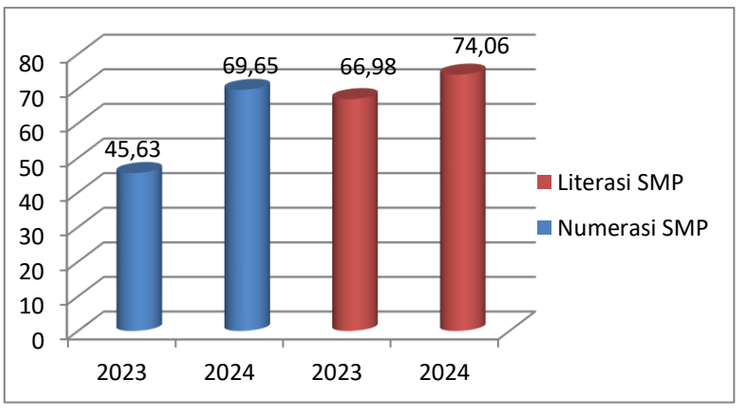
7. Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi numerasi peserta didik di Kabupaten Dairi masih kurang dan masih harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi peserta didik adalah menerapkan model pembelajaran yang dapat menunjang berkembangnya kemampuan tersebut. Penerapan model pembelajaran yang tidak sesuai akan mengakibatkan kemampuan literasi dan numerasi kurang dapat berkembang. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP.

Gambar 2.24
Literasi dan Numerasi SD



Gambar 2.25
Literasi dan Numerasi SMP



2.3.1.2. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.26
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



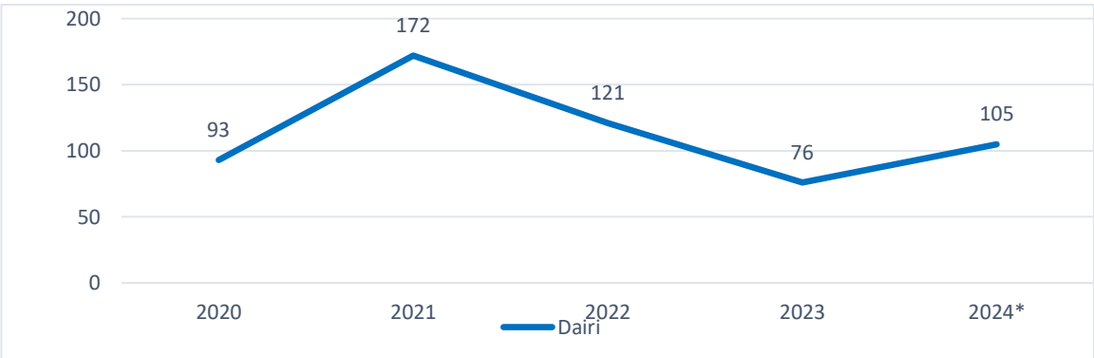
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2024.

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus, dan meningkat bila dibandingkan dengan pada Tahun 2024 menjadi 10 kasus.

2. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.27
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



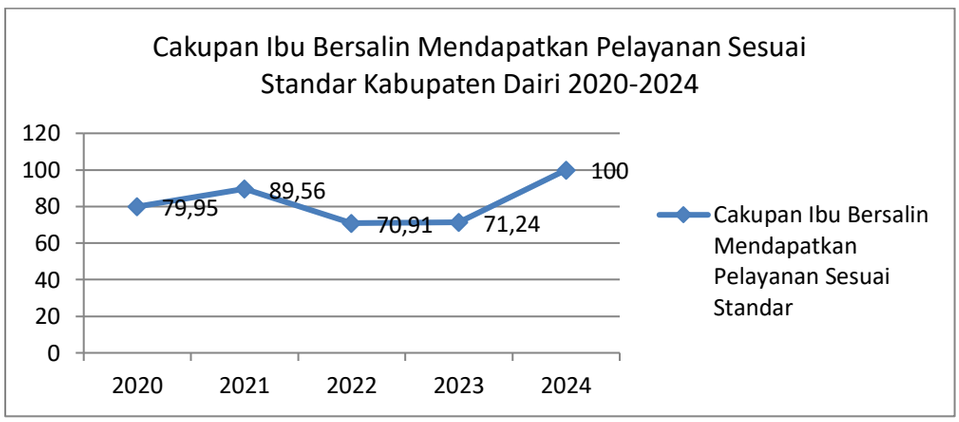
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2024.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sangat fluktuatif dan turun cukup tajam. AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, dan Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup Capaian tersebut cukup baik karena sudah berada dibawah target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 105 per 100.000. Dengan demikian, upaya penanganan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (Antenatal Care), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (Postnatal Care).

3. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.28
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

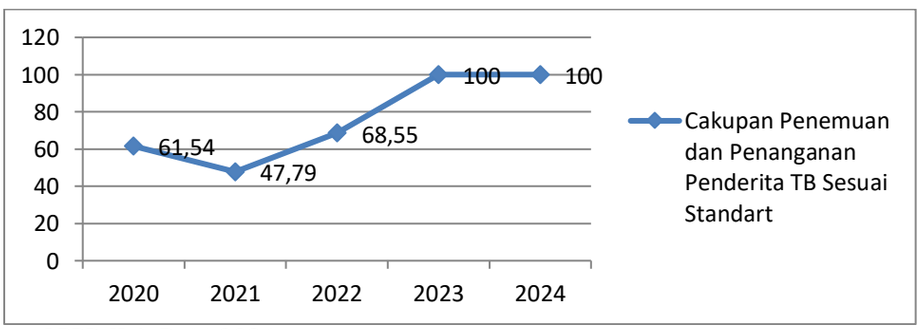


Sumber : LPPD Kab.*Dairi 2024*

4. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Jika dilihat dari tabel dibawah terjadi peningkatan Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 61,54 persen,menjadi 100 persen di Tahun2023 dan 2024.

Gambar 2. 29 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

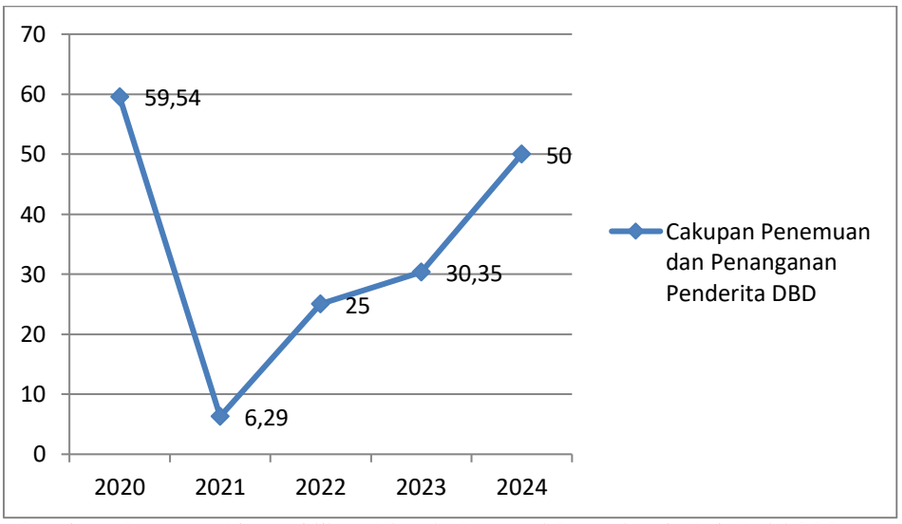


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.30 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

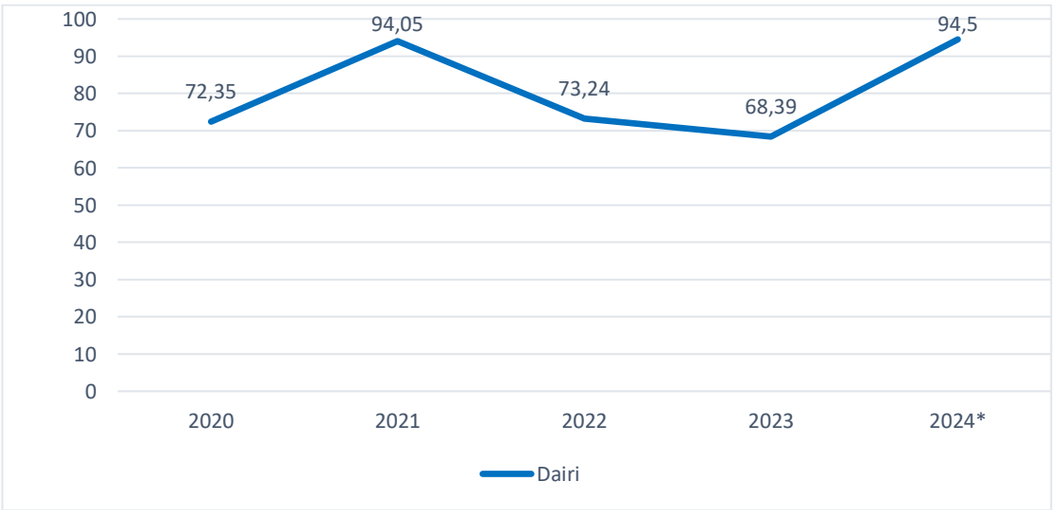


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024.

6. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.31
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



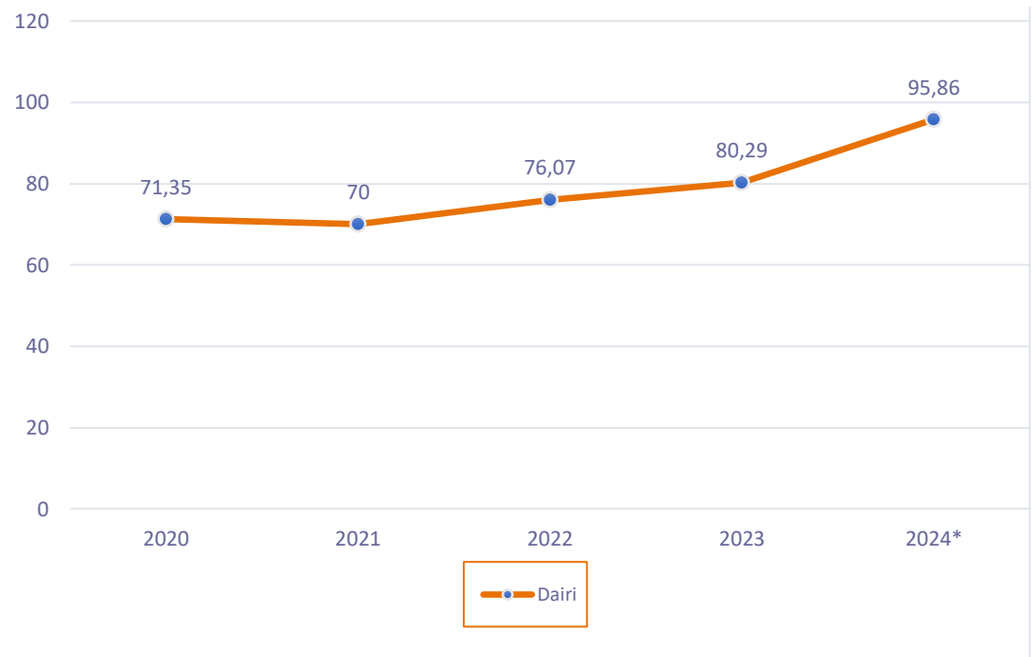
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel diatas Cakupan kunjungan Bayi pada Tahun 2020 sebesar 72,35 persen, pada Tahun 2021 sebesar 94,05 persen dan pada Tahun 2022 mencapai angka 73,24 persen dan pada Tahun 2023 adalah 68,39 persen, sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 94,5 persen.

7. Cakupan Pelayan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita pada Tahun 2019 sebesar 71%, sebesar 71,35% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00%, pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07% dan pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,29% dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 95,86%.

Gambar 2.32
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



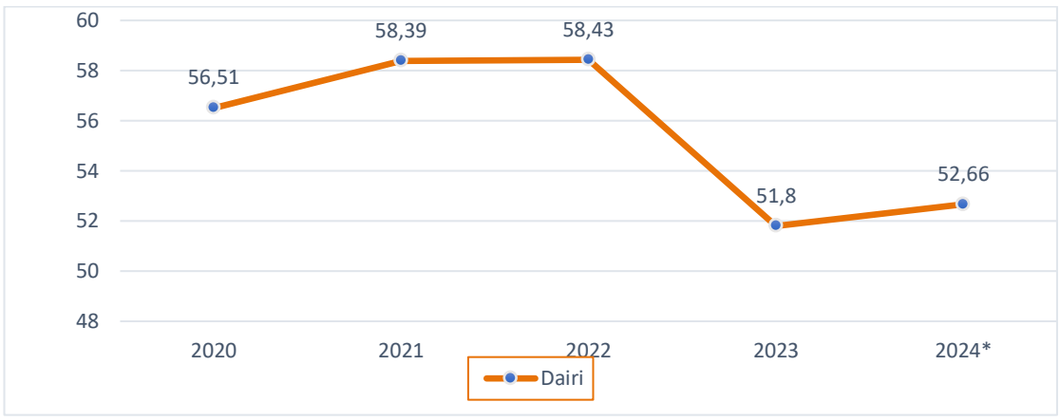
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

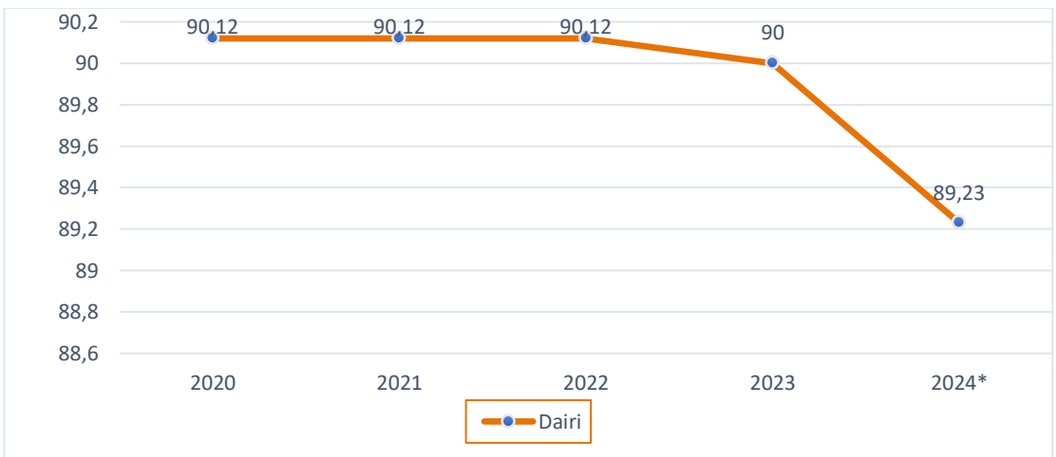
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.33
Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Gambar 2.34 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



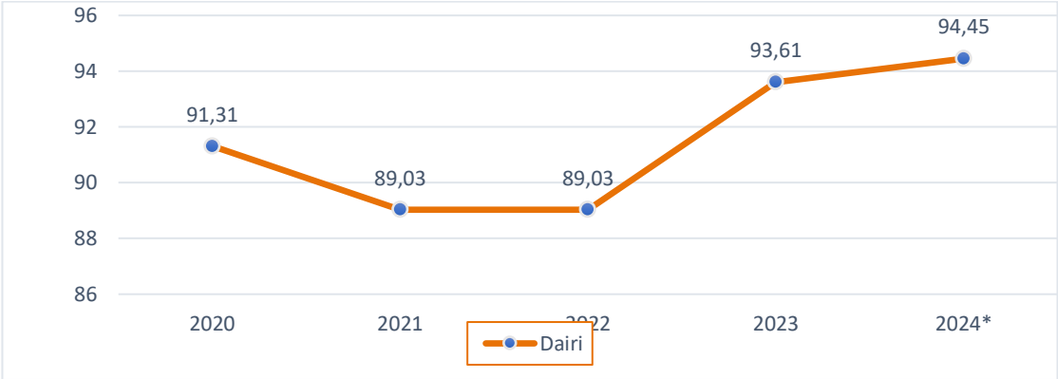
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa persentase jembatan dengan kondisi baik pada Tahun 2020 sebesar 90,12%, persentase jembatan dengan kondisi baik pada Kabupaten Dairi pada kurun waktu Tahun 2021-2022 adalah sebesar 90,12%. Pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 90 dan 89,23 persen.

2. Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024, menunjukkan adanya peningkatan namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.35
Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Luas irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2020 adalah 91,37% dengan luasan 10.211 Ha. Pada Tahun 2021, persentase irigasi dengan kondisi baik menjadi 89,03% dengan luasan 9.949 Ha, Tahun 2022 untuk persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 89,41%, dengan luasan 9.992 Ha dan pada Tahun 2023 persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 93,61% dengan luasan sebesar 10.461 Ha. Pada Tahun 2024 persentase irigasi dalam kondisi baik adalah 94,45% dengan luasan 10.554 Ha.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana yang diharapkan antara lain disebabkan keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi kerusakan bangunan utama dan jaringan irigasi baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana perimbangan dari Pemerintah (DAK/APBN), sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi (OP Irigasi dan rawa), belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tingkat kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi karena sebagian besar bangunan irigasi berada pada punggung perbukitan, dengan kondisi debit aliran yang tidak stabil sehingga terjadinya longsor atau kerusakan kecil tidak dapat tertangani secara menyeluruh.

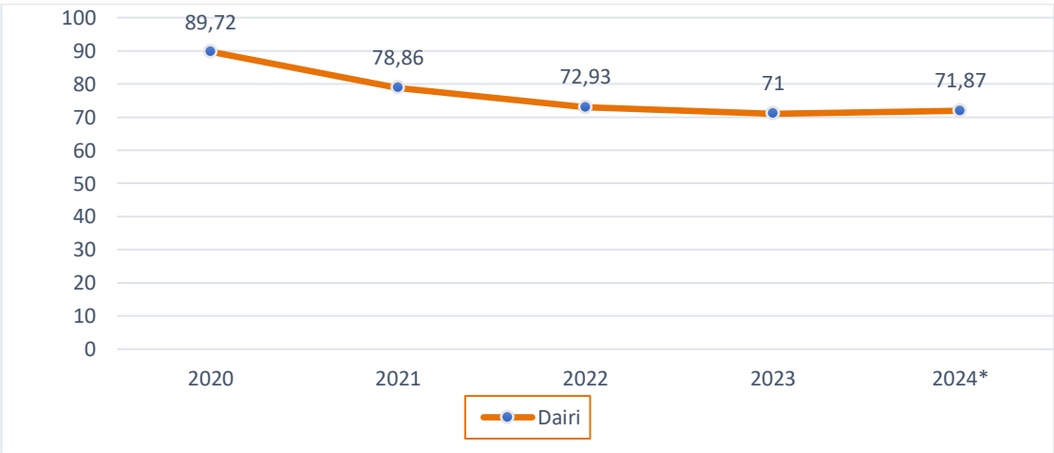
3. Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dana aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Gambar 2. 36 Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih Tahun 2020-2024

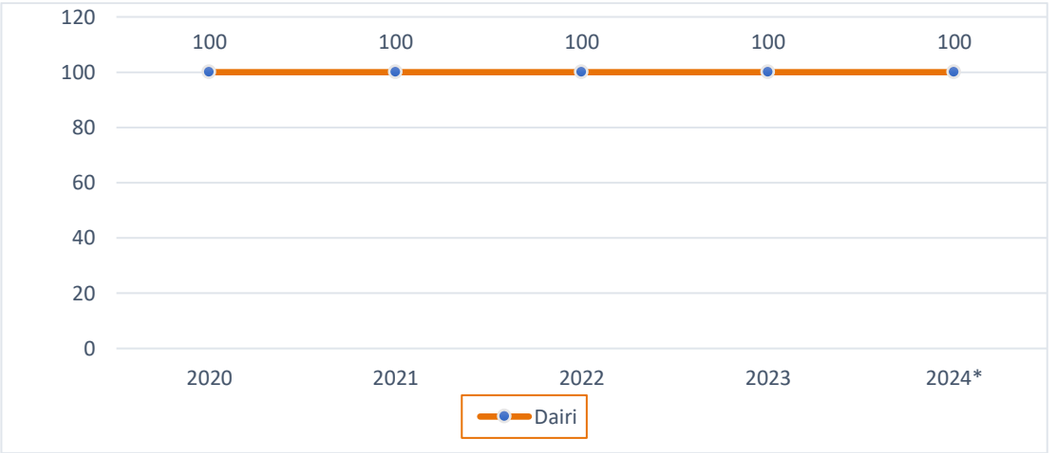


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang stabil, seperti pada Tahun 2022 adalah sebesar 65.273 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 89.495 KK atau sebesar 72,93%, pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 66.480 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 93.630 KK atau sebesar 71,00%. Pada Tahun 2024 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 68.366 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 95.121 KK atau sebesar 71,87%

4. Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Mengurus IMB

Gambar 2 37
Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

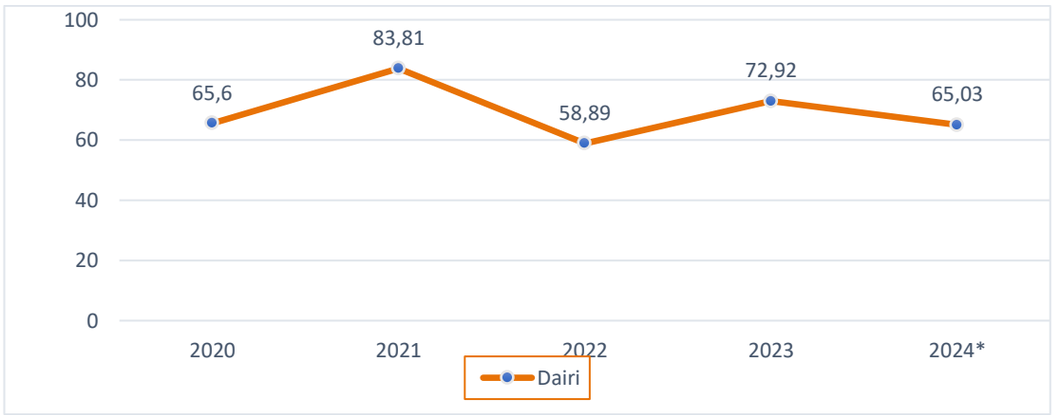
Dari gambar diatas dapat dijelasakan bahwa capaian terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB dari Tahun 2020-2024 tercapai 100%.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Gambar 2. 38 Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2020-2024



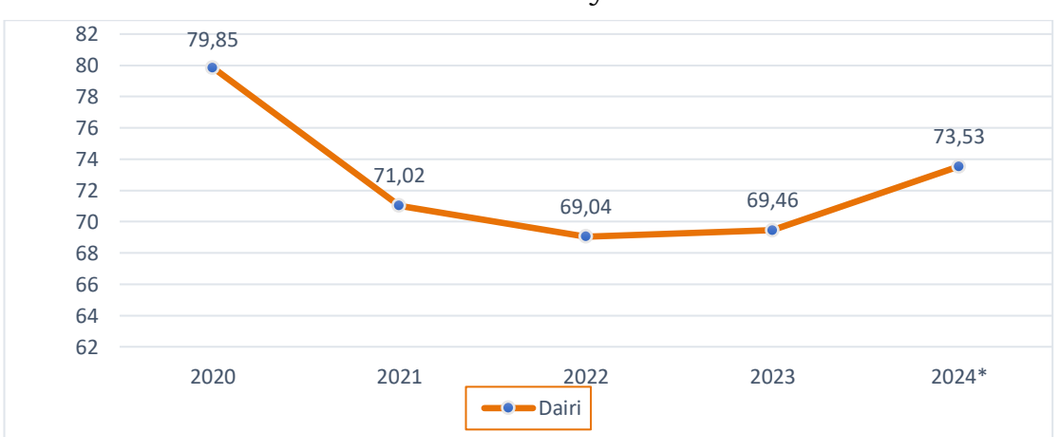
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya pada Tahun 2020 sebesar 65,6%, sebesar 83,81% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 58,89%. Pada Tahun 2023 persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU ditargetkan menjadi sebesar 72,92% sedangkan tahun 2024 adalah sebesar 65,03%.

Belum tertanganinya kawasan kumuh secara optimal karena karena minimnya ketersedian Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan dana untuk pembangunan, oleh karena hal tersebut diwacanakan dilakukan pelimpahan sebagian aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk menjadi kewenangan desa sehingga penanganan PSU dapat lebih optimal dengan didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Persentase Rumah Layak Huni

Gambar 2. 39 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024



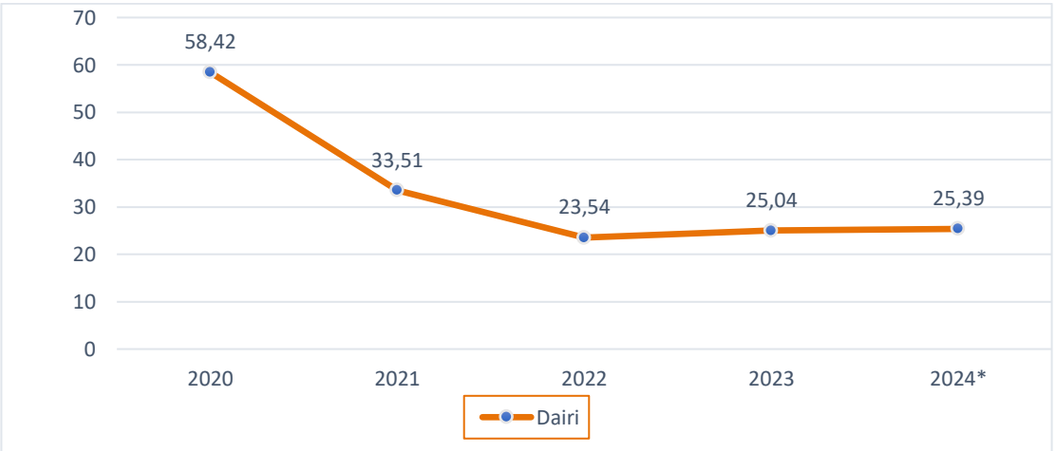
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebesar 79,85% dan pada Tahun 2021 sebesar 71,02% dan sebesar 69,04% pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,46 % dan Tahun 2024 ditargetkan sebesar 73,53%.

3. Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari gambar dibawah dapat dilihat persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebesar 10,97%, sebesar 58,42% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 33,51%. Pada Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh menjadi 161,08 Ha atau sebesar 23,54% dan pada Tahun 2023 maka diperoleh pengurangan kawasan kumuh menjadi 171,37 Ha dari total kawasan kumuh 684,41 Ha atau sebesar 25,04%.

Gambar 2. 40 Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal,

Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam menentukan produktivitas suatu daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut ini merupakan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi.

Jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jenis tenaga kerja dapat dilihat dari sebaran proporsi lapangan pekerjaan utama, serta kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari persentase Angkatan kerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan.

1. Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Dairi, tercatat pada Tahun pada Tahun 2020 69,80%, pada Tahun 2021 23,27% dan pada Tahun 2022 menjadi 6,68%, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 23,96%. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 24,05.

2. Angkatan Kerja

Besaran Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 136.537 orang, pada Tahun 2021 menjadi 168.261 orang, pada Tahun 2022 menjadi 168.291 orang, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 197.395. Pada Tahun 2024 meningkat Kembali menjadi 199.085.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tahun 2020 TPAK Kabupaten Dairi sebesar 87,01% dan Sumatera Utara sebesar 66,58% dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai 85,73% sedangkan Sumatera Utara juga mengalami peningkatan menjadi 69,10%, pada Tahun 2022 kembali mengalami penurunan ke angka 82,01% dan Sumatera Utara di angka 69,53% dan pada Tahun 2023 juga mengalami penurunan ke angka 84,81% sedangkan Sumatera Utara di angka 71,06%, pada

Tahun 2024 tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Dairi menurun menjadi 83,80 sedangkan Sumatera Utara di angka 71,36. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dairi secara keseluruhan masih diatas Provinsi Sumatera Utara.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi sebesar 1,75% pada Tahun 2020 sedangkan Sumatera Utara dengan nilai 6,91 pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,49% dan kembali turun dengan signifikan Tahun 2022 menjadi 0,88% dan Sumatera Utara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 6,16% pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 meningkat menjadi 1,23% sedangkan Provinsi 5,89%. Pada Tahun 2024 TPT di Kabupaten Dairi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,43 sedangkan Provinsi Sumatera Utara menurun menjadi 5,60. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Dairi lebih baik dari TPT Provinsi Sumatera Utara.

2.3.2.2. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, data Tahun 2022 tidak tersedia, sedangkan pada Tahun 2024 ketersediaan Energi per kapita sebesar 93,16% dan jumlah ketersediaan protein per kapita adalah sebesar 97,34%.

2.3.2.3. Lingkungan Hidup

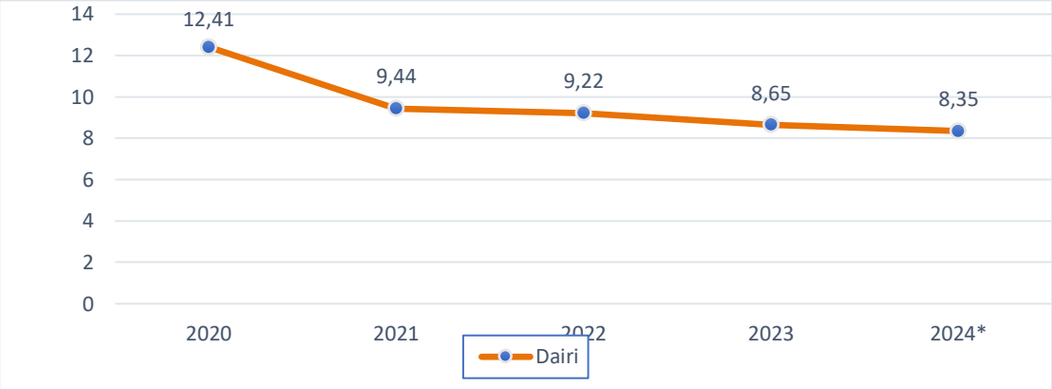
Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kabupaten Dairi, terlebih bagi perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1. Lahan Kritis

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang komplek, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor,

baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat.

Gambar 2. 41
Penurunan Lahan Kritis Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.3.2.4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pegelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

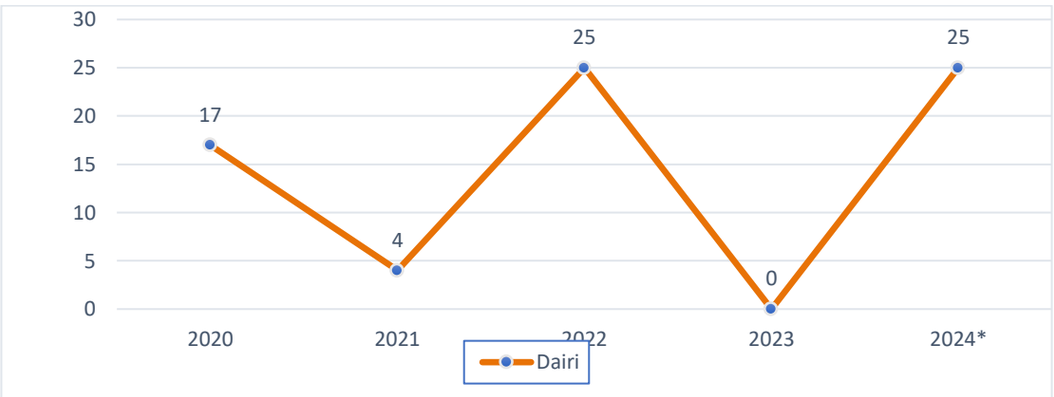
Dari gambar di bawah ini dapat dilihat persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 60,09%, pada Tahun 2021 sebesar 64,75%, pada Tahun 2022 sebesar 69,65%, pada Tahun 2023 sebesar 75,68% dan pada Tahun 2024 sebesar 76,55%

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

1. Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dari gambar di bawah ini dapat dijelasakan banyaknya desa yang terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada Tahun 2020 sebanyak 17 desa, pada Tahun 2021 sebanyak 4 desa dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25 desa. Tahun 2023 tidak didapati data tentang fasiltasi dan pembentukan BUM Desa. Tahun 2024 terdapat 25 BUM Desa yang ditargetkan terfasilitasi dan terbentuk.

Gambar 2.42
Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

3. Posyandu Aktif

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejk dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

4. LSM aktif

LSM, ORMAS dan OKP aktif di Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat tinggi.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung melalui beberapa program, yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan peran perempuan di pedesaan, serta program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

5. Desa mandiri

Desa Mandiri adalah salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Desa mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desanya.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Terdapat beberapa pilar utama yang menopang konsep desa mandiri, di antaranya:

- Kemandirian ekonomi yang ditandai dengan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan menciptakan lapangan kerja.
- Ketahanan sosial yang terwujud dalam kehidupan masyarakat yang harmonis dan gotong royong.
- Kemandirian pangan dan energi yang memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap kebutuhan dasar mereka.

- Lingkungan hidup yang lestari sebagai penopang kehidupan dan sumber daya bagi masyarakat desa.
- Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan, memastikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa mendorong terwujudnya desa mandiri demi mewujudkn ekonomi kerakyatan, dimana desa mandiri memiliki kemampuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup warganya dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi berkelanjutan.

2.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peranan penting dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Dairi. Kinerja penyelengggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dianalisa dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

a) Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari Tahun 2020-2024 adalah 100%. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur tingkat keberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Semakin tinggi tingkat IDG menunjukkan keberdayaan perempuan yang semakin besar pada aspek perekonomian dan politik dikalangan masyarakat. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi.

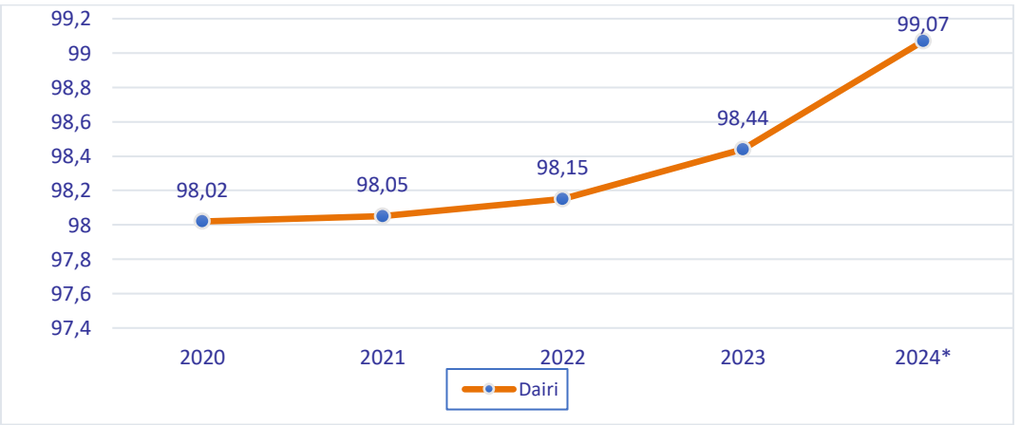
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun. Dibandingkan dengan daerah lain dan rata-rata Provinsi, IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Sama dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perbandingan ini menggambarkan keberdayaan perempuan di Kabupaten Dairi masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya keberdayaan perempuan

dalam kegiatan perekonomian dan politik di Kabupaten Dairi. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa persoalan, antara lain adalah kurang optimalnya akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas publik. Kebijakan yang kurang sensitif gender juga berperan dalam menyebabkan permasalahan ini.

b) Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan perbandingan capaian IPM antara penduduk perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Dairi fluktuatif dan cenderung naik dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata IPG Provinsi Sumatera Utara, IPG Kabupaten Dairi lebih tinggi. Namun, perkembangan IPG Kabupaten Dairi masih berada di bawah IPG Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perkembangan data tersebut menunjukkan kesetaraan capaian penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli di Kabupaten Dairi belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain adalah kurangnya optimalnya upaya pemberdayaan perempuan dan anak.

   Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi.

Gambar 2.43
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Dairi, 2025

c) Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari Tahun 2020-2024 adalah 100%.

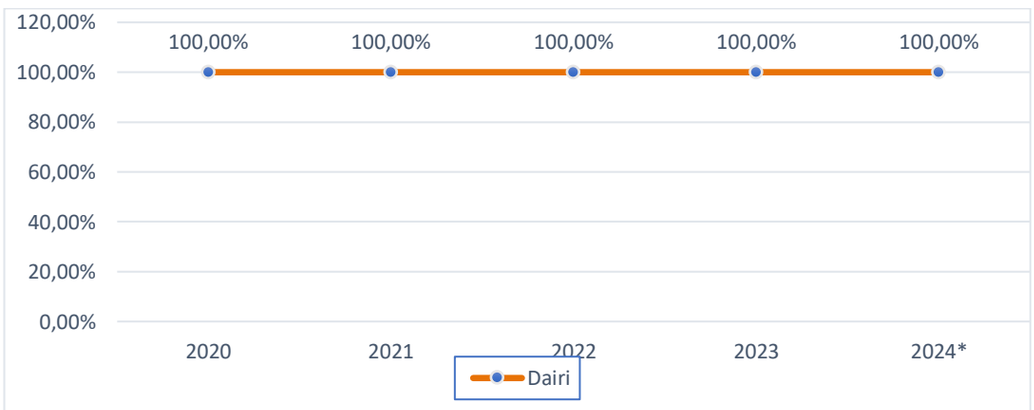
Tujuan dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Penyelengaraan pengendalian penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Penyelenggaraan program keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak.

2.3.2.6. Perhubungan

Fasilitas keselamatan lalu lintas sangat dibutuhkan dalam melengkapi aspek infrastruktur lalu lintas jalan. Semakin optimal dalam pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas, maka semakin memperkecil terjadinya kecelakaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan lainnya dalam berkendara atau berlalu lintas. Fasilitas tersebut mencakup lalu lintas udara, laut dan juga daratan.

1. Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Gambar 2. 44 Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

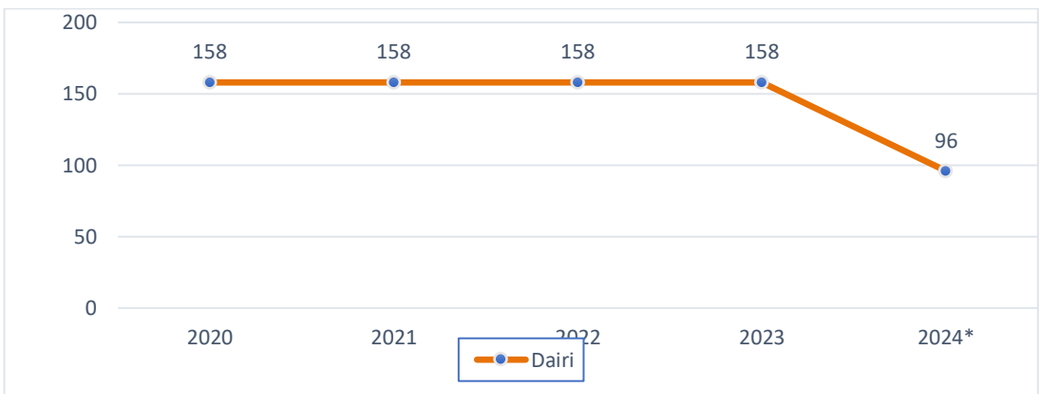
2.3.2.7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti jumlah koperasi aktif dan jumlah usaha mikro berikut ini.

1. Jumlah Koperasi Aktif

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 ada sebanyak 158 unit koperasi aktif, jumlah tertinggi adalah pada kelompok koperasi serba usaha sebanyak 101 unit. Pada Tahun 2024 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi adalah 96 unit, dengan kelompok serba usaha 37 unit.

Gambar 2.45
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2020 – 2024

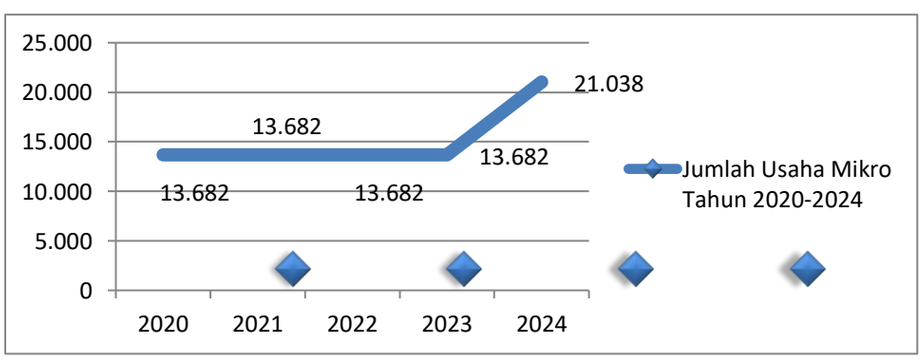


Sumber BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

2. Jumlah Usaha Mikro

Dari gambar di dibawah dapat dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi, pada Tahun 2020 sebanyak 13.682 unit pada tahun 2020 dan menjadi 21.038 unit pada tahun 2024.

Gambar 2. 46
Jumlah Usaha Mikro Tahun 2020-2024



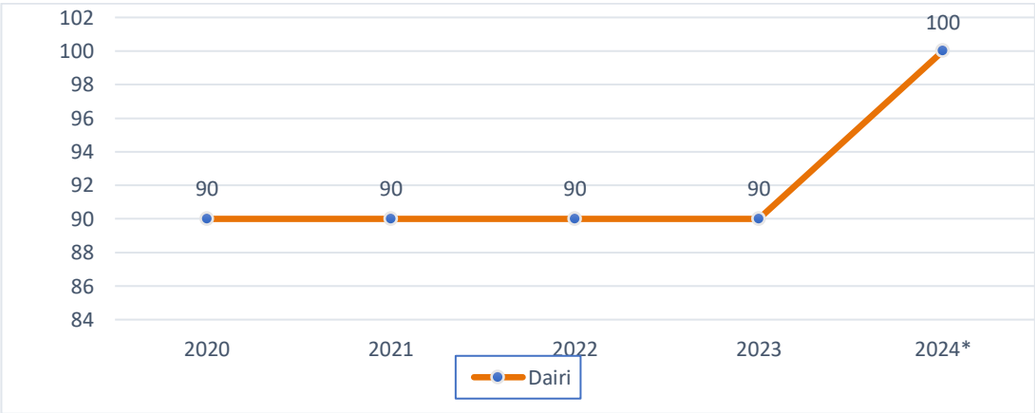
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.3.2.8. Penanaman Modal dan Perizinan

Penanaman modal berperan penting dalam mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator utama seperti realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, Persentase Izin yang diterbitkan sesuai SOP juga berperan dalam menggambarkan kinerja pendukung pelayanan ijin permodalan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Dairi.

1. Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP

Gambar 2.47
Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 90% pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 tetap 90%. Pada Tahun 2024 Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi sebesar 100%.

2. Persentase Peningkatan Investasi

Salah satu motor penggerak bagi pembangunan daerah adalah investasi daerah. Investasi daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Dairi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dairi sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dan mitra terbaik bagi investor guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Indikator realisasi investasi umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan investasi daerah. Berikut adalah data mengenai Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2020 – 2024.

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase kondisi investasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2022-2024 pada Tahun

2022 sebesar 12,86%, terjadi peningkatan pada Tahun 2023 menjadi 13,01%, dan pada tahun 2024 menjasi 14,88%.

Gambar 2.48
Persentase Peningkatan Investasi Kab Dairi 2022-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu tahun 2022-2024 menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun berada pada angka 12,20 pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2022, demikian juga untuk tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 14,88% dari Tahun 2023. Nilai realisasi investasi Kabupaten Dairi masih didominasi oleh investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan investasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi juga saling berkaitan dengan penerapan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pengelolaan perizinan yaitu jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, dan persentase peningkatan jumlah PMA dan PMDN yang diterima.

Upaya untuk meningkatkan investasi daerah Dairi juga perlu didukung dengan adanya pelayanan investasi yang baik, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Bentuk dukungan tersebut sudah diwujudkan pemerintah Kabupaten Dairi.

2.3.3. URUSAN PILIHAN

Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari berbagai urusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus urusan ini terdiri dari beberapa urusan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Beberapa urusan di dalam fokus layanan urusan pilihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

2.3.3.1. Pariwisata

Sektor potensial lainnya yang ada di Kabupaten Dairi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Dairi meliputi didominasi oleh wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Untuk menunjang aktivitas wisata dan menarik wisatawan asing maupun domestik, keberadaan akomodasi sebagai sarana pendukung kepariwisataan sangatlah diperlukan. Hal tersebut bisa terwujud dengan tersedianya fasilitas dukungan yang memadai seperti hotel. Wisatawan yang datang dari luar daerah tentu membutuhkan tempat untuk menginap dan alternatif yang paling diminati wisatawan adalah menginap di hotel.

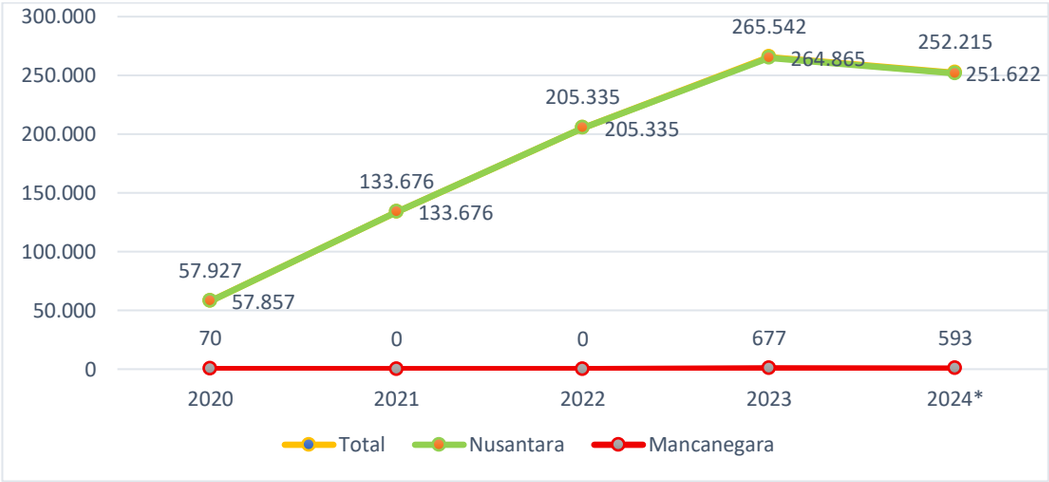
1. Kunjungan Wisata

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan kunjungan wisata di Kabupaten Dairi sebesar 57.927 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebanyak 133.676 orang, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 205.335 orang dan pada Tahun 2023 kunjungan wisata ke Dairi sebanyak 265.542 orang. Sedangkan Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 252.215 orang.

Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebanyak 70 orang, Tahun 2021 dan 2022 tidak ada data. Sedangkan untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 677 0rang dan Tahun 2024 sebanyak 593 orang.

Gambar 2.49

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Dairi (Orang) Tahun 2020–2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2025

2. Objek Wisata di Kabupaten Dairi

Tabel 2.26
Objek Wisata di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Dan Jarak Dari Sidikalang Tahun 2024

Nama Objek Wisata	Kecamatan	Jarak dari Kota Sidikalang (Km)
(1)	(2)	(3)
Gedung Djauli Manik (Pusat Aktifitas Seni Budaya)	Sidikalang	0,0
Taman Kota Sidikalang (Stadion Lama)	Sidikalang	0,5
Panorama Indah Puncak Sidiangkat	Sidikalang	5,0
Taman Wisata Iman (TWI)	Sitinjo	10,0
Taman Tugu TB Simatupang Dan Liberty Manik	Sitinjo	10,0
Air Terjun Lae Pandaroh, Air Terjun Sampendabah	Sitinjo	12,0
Simergatep	Parbuluan	12,0
Leter Z	Siempat Nempu Hulu	12,0
Parhonasan	Lae Parira	21,0
Pemandian Lau Bagot	Tigalingga	30,0
Gua Kendet Liang	Gunung Sitember	42,0
Pantai Danau Toba/Tao Silalahi	Silahisabungan	44,0
Air Terjun Sampuren Desa Gundaling	Gunung Sitember	45,0
Situs Budaya Marga Silahisabungan (Aek Sipaulak Hosa, Batu Sigadap, Pagar Parorot, Pansur Napitu, Tugu Silahisabungan)	Silahisabungan	46,0
Pemadian Lau Timah	Tanah Pinem	80,0

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2025

Dari tabel 2.59 di atas dapat kita ketahui bahwa total objek wisata potensial di Kabupaten Dairi berjumlah 15 objek wisata. Dan dari tabel tersebut kita juga mengetahui nama objek wisata, letak serta jarak objek wisata dari kota Sidikalang, dapat kita lihat bahwa Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo memilik sebanyak 3 objek wisata, Silahisabungan dan Gunung Sitember 2 objek wisata, Parbuluan, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Tigalingga dan Tanah Pinem masing-masing memiliki 1 objek wisata.

2.3.3.2. Pertanian

1. Tanaman Pangan dan Holtikultura

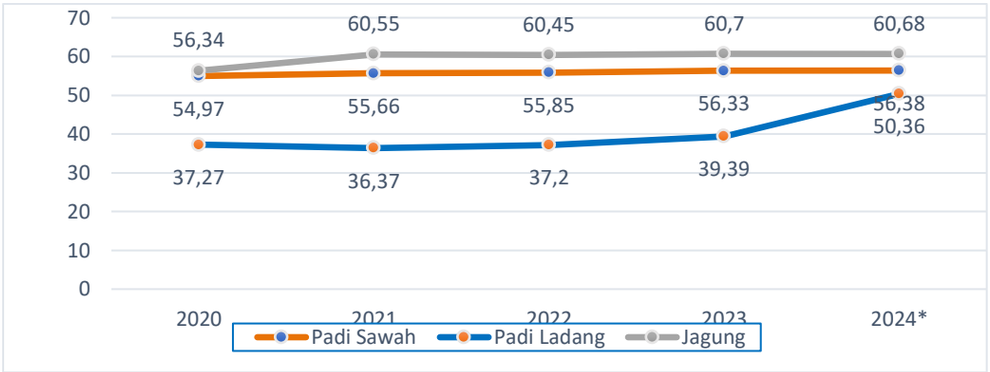
1) Tanaman Pangan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut padi sawah pada Tahun 2020 sebesar 54,97 kw/ha, lalu meningkat pada Tahun 2021 menjadi 55,66 kw/ha dan pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 55,85 kw/Ha. Pada Tahun 2023 meningkat menjadei 56,33 kw/Ha dan tahun 2024 meningkat sedikit menjadi 56.38 kw/Ha.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada Tahun 2020 sebanyak 37,53 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan ke angka 36,37 kw/ha dan pada Tahun 2022 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan menjadi 37,2 Kw/Ha, pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 39.39 KW/Ha. Pada Tahun 2024 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 50,36 KW/Ha.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada Tahun 2020 sebanyak 56,34 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 60,55 kw/ha dan pada Tahun 2022 menurun sedikit menjadi 60,45 Kw/Ha dan pada tahun 2023 produktivitas jagung meningkat menjadi 60,7 Kw/Ha. Demikian juga pada Tahun 2024 terjadi peningkatan produktivitas menjadi 60,68 Kw/Ha. Peningkatan Produktivitas ini disebabkan oleh upaya intensfikasi yang dilakukan melalui pemberian bibit unggul yang bersertifikat, perbaikian jaringan irigasi dan penyuluhan pengelolaan tanaman terpadu.

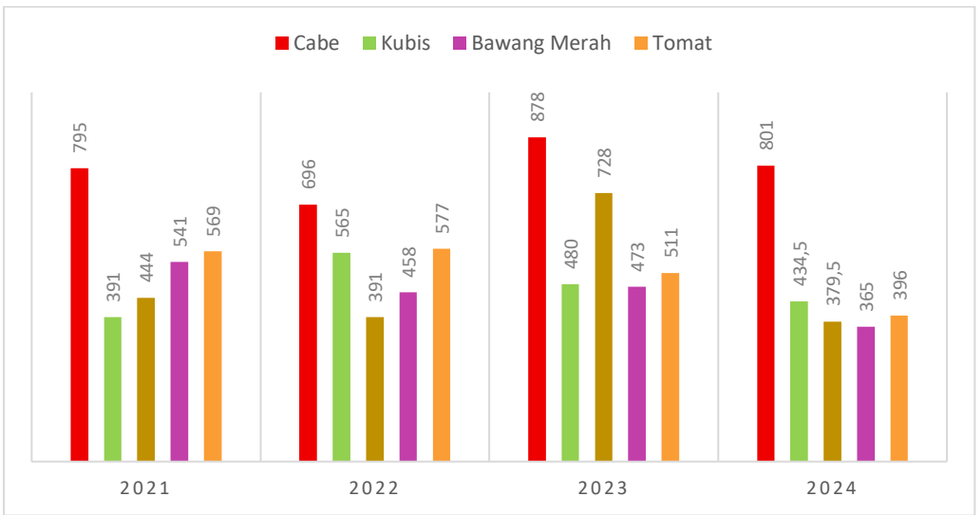
Gambar 2.50
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

2) Hortikultura

Gambar 2. 51 Luas panen sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman Tahun 2021-2024 (Ha



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

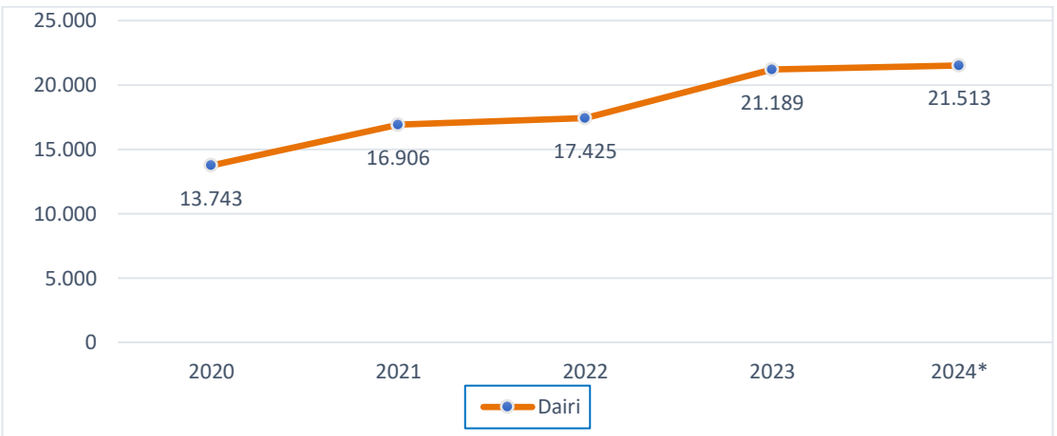
Luas panen tanaman sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di kabupaten Dairi, pada Tahun 2021 luas panen tanaman bawang merah sejumlah 541 ha, cabe 795 ha, kubis 391 ha, kentang 444 ha, tomat 569 ha. Pada Tahun 2022 produksi bawang merah adalah 458 ha, cabe 696 ha, kubis 565 ha, kentang 391 ha, tomat 577 ha. Pada Tahun 2023 luas panen bawang merah adalah 473 ha, cabe 878 ha, kubis 480 ha, kentang 728 ha, dan tomat sebanyak 511 ha. Pada Tahun 2024 luas panen bawang merah adalah 365 ha, cabe 801 ha, kubis 434,5 ha, kentang 379,5 ha, dan tomat sebanyak 396 ha. Luas Panen komoditas hortikultura di Kabupaten Dairi menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan pola tanam hortikultura yang beluk teratur. Penanaman hortikultura hanya sesuai dengan keinginan petani, belum

berorientasi pasar. Untuk itu diperlukan kelembangaan yang baik ditingkat petani.

2. Perkebunan Kopi

Produksi tanaman perkebunan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pertanian di sub-sektor perkebunan. Kabupaten Dairi memiliki produksi tanaman perkebunan yang sangat besar terutama untuk komoditas tanaman perkebunan kopi. Kabupaten Dairi juga terkenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi terbesar ke-5 di Indonesia. Berikut adalah data mengenai Produksi Perkebunan Kopi di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.52
Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi Tahun 2020-2024 (ton)



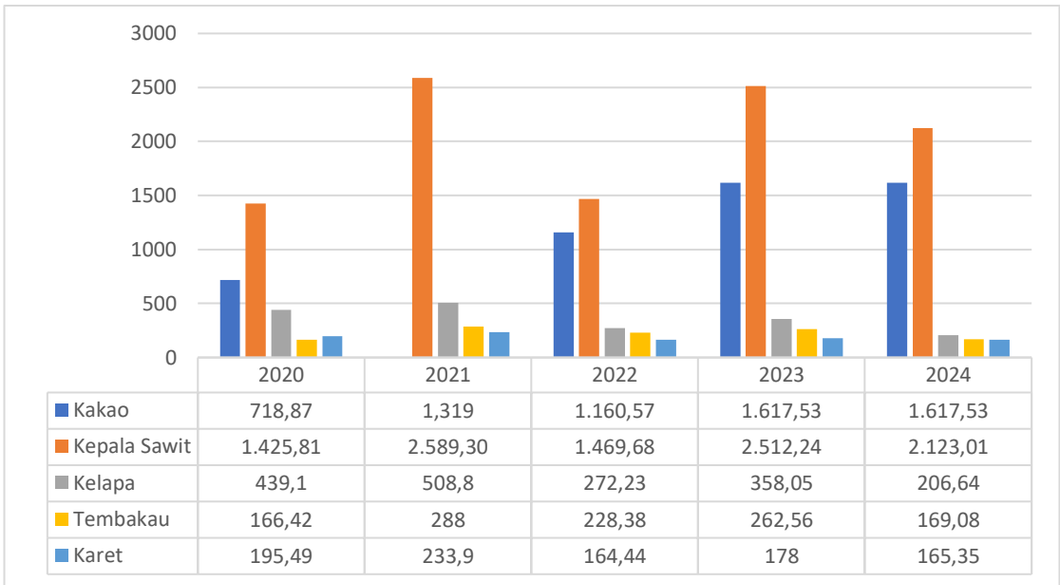
Sumber : : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat peningkatan produksi perkebunan kopi di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2020 produksi kopi di Dairi sebesar 13.743 ton kemudian pada Tahun 2021 meningkat menjadi 16.906 ton, pada Tahun 2022 produksi kopi sebesar 17.425 ton, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 21.189 ton. Kemudian Tahun 2024 produksi kopi Kabupaten Dairi kembali mengalami peningkatan menjadi 21.513 Ton yang terdiri dari kopi arabika sebesar 18.975,1 ton dan kopi robusta sebesar 2.537,5 ton.

Peningkatan tersebut diakibatkan oleh program pemerintah kabupaten Dairi untuk mengembalikan kejayaan kopi sidikalang dengan penanaman kopi 1 juta batang. Kemudian peningkatan harga biji kopi semenjak lima tahun yang lalu, sehingga meningkatkan minat petani bertanam kopi.

Disamping Tanama kopi terdapat beberapa tanaman Perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Dairi. Berikut ini data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.53
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



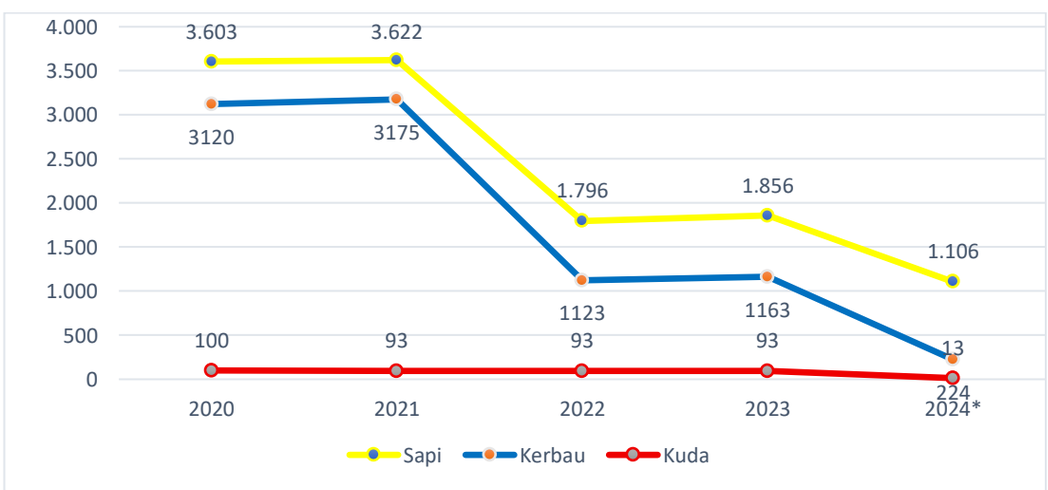
	2020	2021	2022	2023	2024
Kakao	718,87	1,319	1.160,57	1.617,53	1.617,53
Kepala Sawit	1.425,81	2.589,30	1.469,68	2.512,24	2.123,01
Kelapa	439,1	508,8	272,23	358,05	206,64
Tembakau	166,42	288	228,38	262,56	169,08
Karet	195,49	233,9	164,44	178	165,35

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

3. Peternakan

Kabupaten Dairi juga memiliki populasi ternak yang besar. Indikator populasi ternak umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian sub-sektor peternakan. Pada gambar di bawah ini dijelaskan tentang perkembangan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.

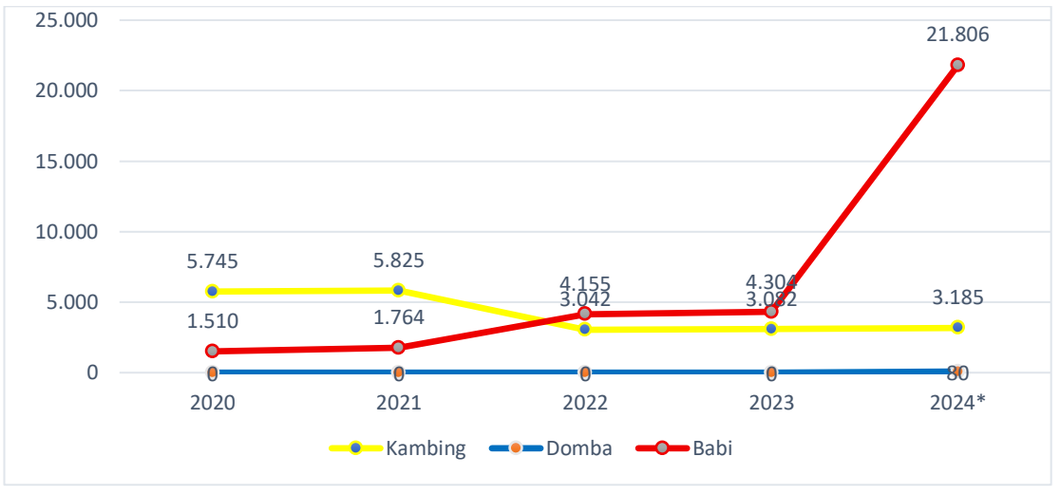
Gambar 2.54
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak besar di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia pada umumnya.

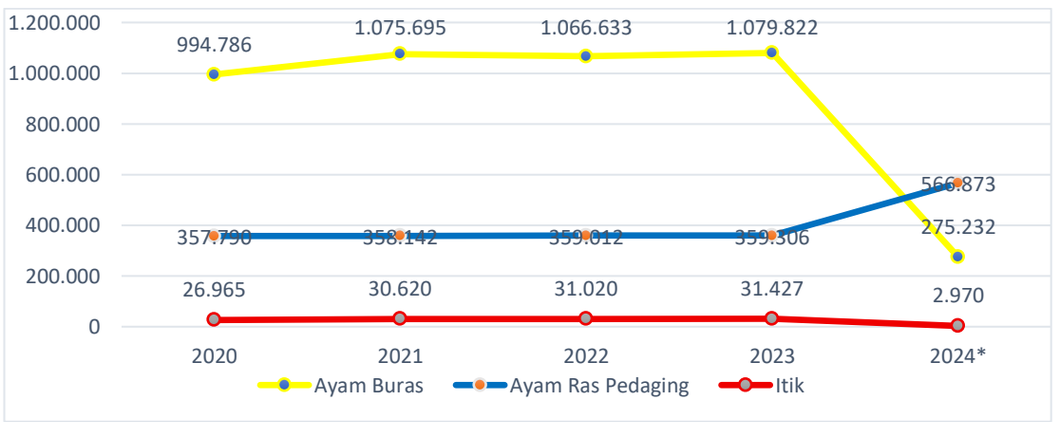
Gambar 2.55
Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 perkembangannya cukup stabil. Pada tahun 2024 populasi ternak babi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan timbulnya minat petani untuk beternak babi karena pandemi serangan penyakit ASF pada babi sudah berkurang.

Gambar 2.56
Populasi Ternak Unggas diKabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

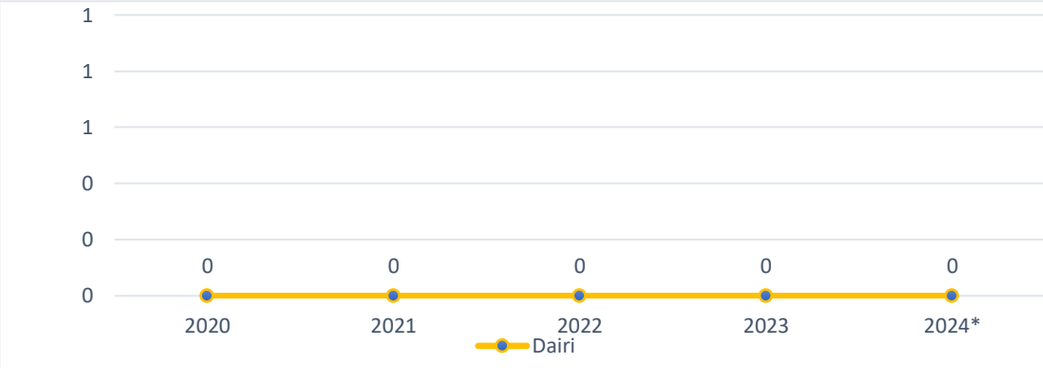
Populasi ternak ungags di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup besar. Populasi ayam buras tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis.

2.3.3.3. Perindustrian dan Perdagangan

1. Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis

Persentase Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 stagnan yaitu sebesar 0% tiap tahunnya, artinya tidak ada penambahan industri yang bergerak dibidang agribisnis kurun waktu 2020-2024.

Gambar 2.57
Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis Tahun 2020–2024

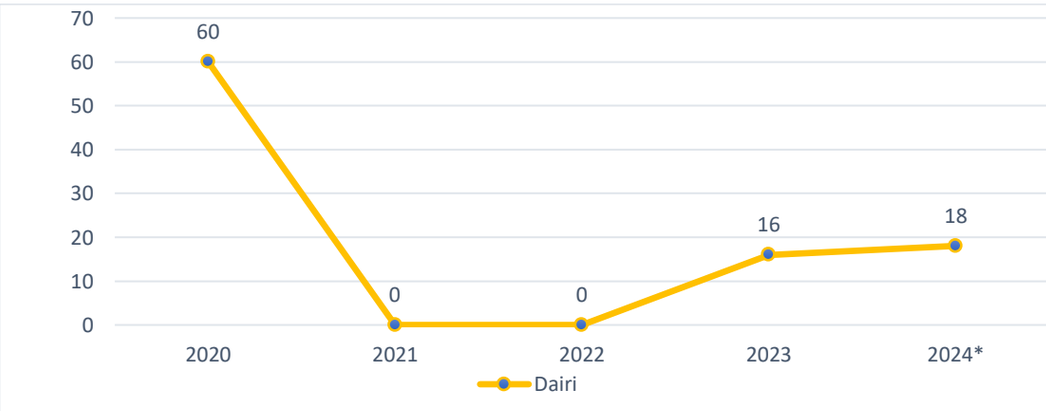


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah produk IKM bidang agribisnis yang terfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 60 produk, data Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak tersedia dan pada 2023 sebanyak 16 dan Tahun 2024 sebanyak 18 Produk.

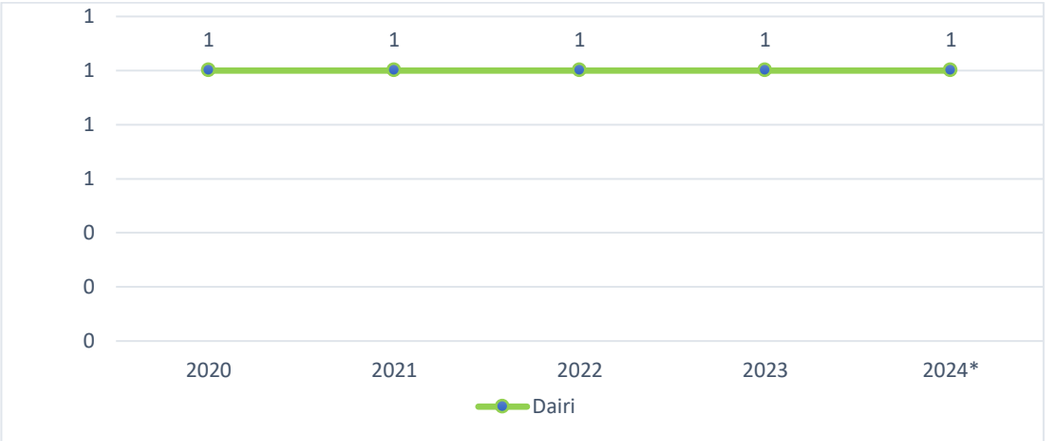
Gambar 2.58
Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikat Produk Tahun 2020 – 20224



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok

Gambar 2.59
Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok Tahun 2020 – 2024

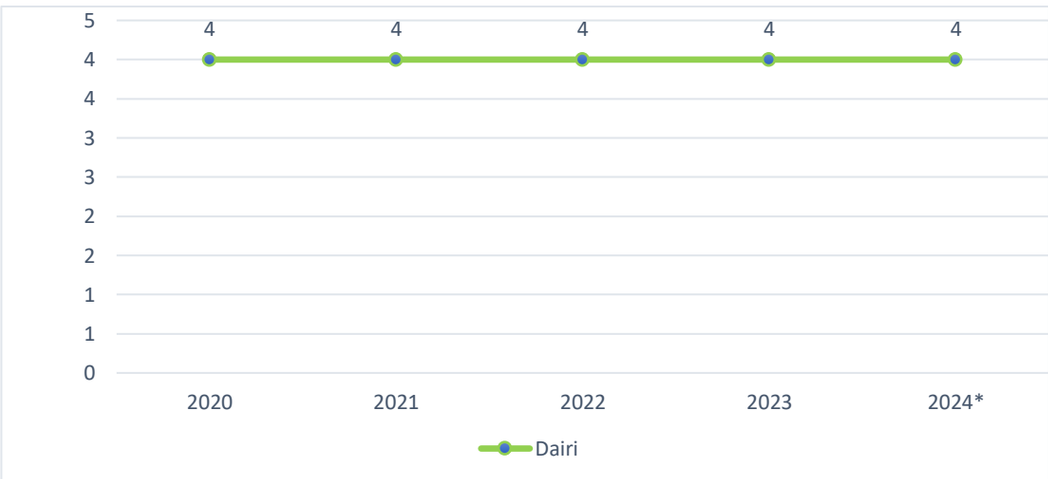


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dijelaskan tersedianya dokumen informasi harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2024 adalah 1 dokumen setiap tahunnya.

4. Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan

Gambar 2.60
Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan Tahun 2020-2024

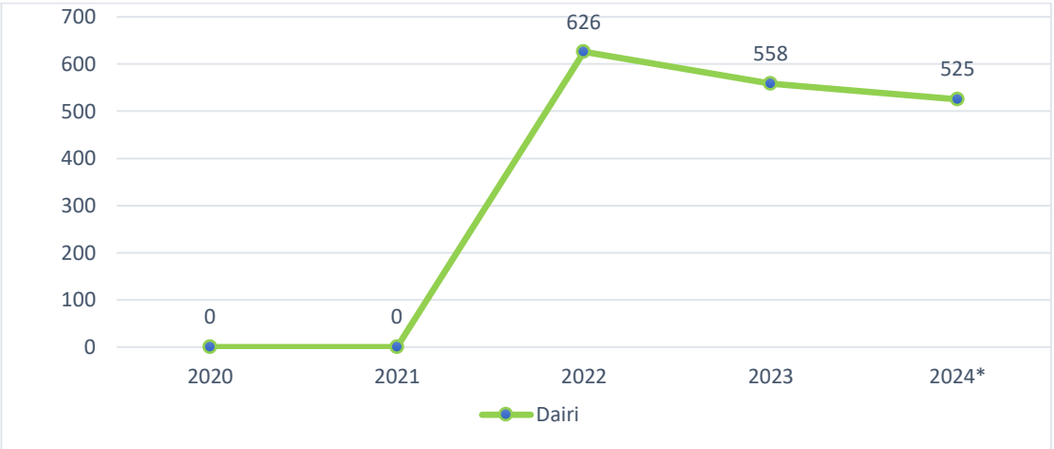


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2024

Dari gambar di atas dapat dijelaskan jumlah produk bidang agribisnis yang dipromosikan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebanyak 4 produk setiap tahunnya.

5. Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang

Gambar 2.61
Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jumlah alat UTTP yang ditera/teraulang di Kabupaten Dairi pada untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 data tidak tersedia sementara untuk Tahun 2022 ada sebanyak 626 unit, pada Tahun 2023 sebanyak 558 unit dan tahun 2024 ada sebanyak 525 unit.

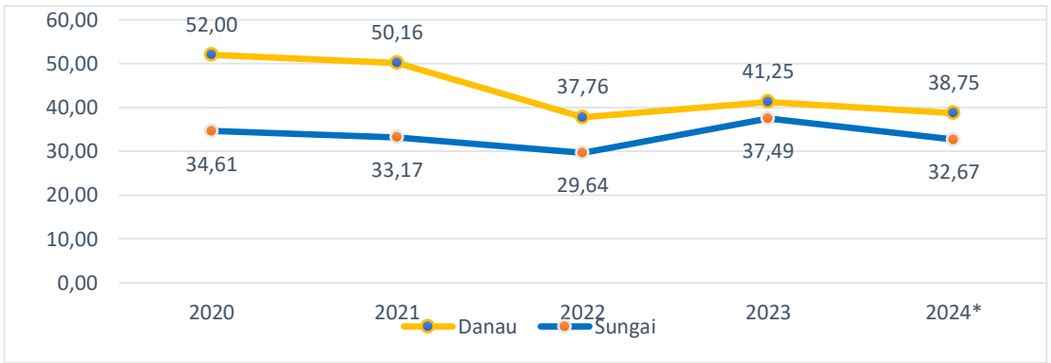
2.3.3.4. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Dairi ini didominasi oleh hasil perikanan air tawar, antara lain ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan air tawar lainnya.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Produksi Perikanan Tangkap dari Danau dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunun yang cukup signifikan dari 52 Ton/tahun menjadi 38,75 Ton/tahun. Sumber perikanan tangkap danau adalah dari Danau Toba di Kecamatan Silahisabungan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya daya dukung danau toba dan adanya ikan predator yang berkembang dengan pesat, sehingga mengurangi populasi ikan mas dan ikan mujahir di Danau Toba. Untuk perikanan tangkap dari sungai cenderung menurun dengan landai. Hal ini juga disebabkan menurunnya daya dukung sungai akibat pencemaran lingkungan.

Gambar 2.62
Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020– 2024



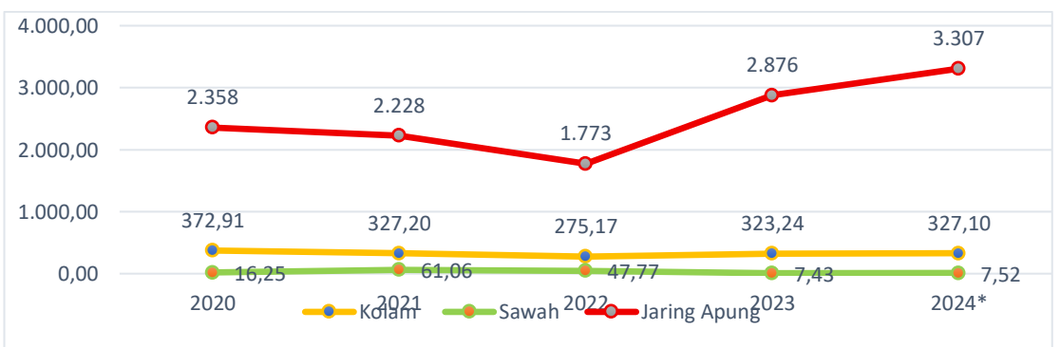
Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

2. Produksi Perikanan Budidaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: Perikanan Budidaya dari keramba jaring apung pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat untuk membersihkan keramba jaring apung dari danau toba, termasuk perairan Silahisabungan. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 produksi kembali meningkat karena penataan/zonasi keramba jaring apung sudah dilakukan, sehingga petani bisa kembali membudidayakan ikan pada keramba jaring apung dengan penataan dan pada zonasi tertentu yang diijinkan. Untuk produksi perikanan budidaya dari kolam dan sawah cenderung stabil walaupun ada turun dan naik setiap tahunnya.

Saat ini telah dikembangkan perikanan budidaya dengan menggunakan kolam terpal dan sistem bioflok. Sistem ini nantinya secara bertahap akan menggantikan perikanan budidaya keramba jaring apung.

Gambar 2.63
Produksi Perikanan Budidaya Tahun (Ton) 2020–2024



Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan unggulan daerah. Suatu Daya Saing (competitiveness) merupakan salah satu faKtor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Daya Saing Daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, Jika pada tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 10,350 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2024 mencapai 11,355 juta rupiah per tahun. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Dairi masih dibawah Sumatera Utara dan Nasional.

2.4.2. Fokus Wilayah Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus di kebut Pemerintah. Pembangunan Infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur dikwasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial ekonomi dan wilayah.

2.4.3. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usai tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65

tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang fluktuaksi namun cenderung menurun pada tahun 2029. Pada Tahun 2020 sebagai data dasar menunjukkan rasio ketergantungan, yaitu sebesar 53,98 persen meningkat menjadi 55,71 pada Tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 54 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada Tahun 2029, penduduk usia produktif menanggung bebas 55-56 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

2.4.4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dimana besaran pada Tahun 2020 adalah Rp. 9.317.91 kemudian pada Tahun 2021 menjadi Rp. 9.710,80 dan menjadi 10.716,94 pada Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 11.651,15 dan tahun 2024 juga meningkat menjadi 12.693,88 Milyar Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 5.630,56 Milyar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.257,91 Milyar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.626,55 (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.148,33 Milyar dan (5) Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 554,22 Milyar.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2020 sebesar Rp. 6.508,05, pada Tahun 2021 turun menjadi Rp. 6.641,67 dan pada Tahun 2022 menjadi 6.921,48, kemudian pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan 7,270,26 dan Tahun 2024 kembali meningkat sebesar Rp. 7.631,31 Pada Tahun 2024 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah sebesar Rp. 3.422,75 disusul oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.377,11, Konstruksi sebesar Rp. 938,80, Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 661,94 dan Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 304,75.

Distribusi persentase PDRB pada Tahun 2020-2024 atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Tahun 2024, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,36% disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,79%, kemudian (3) Konstruksi sebesar 12,81%, dari

sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,05%, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,37 %.

laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas Harga Konstan menurut lapangan usaha Tahun 2020-2024 yang paling berkontribusi di Tahun 2024 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,24% sektor disusul Pertambangan dan Galian sebesar 6,19% kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,16%, sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,96%, sektor Industri Pengolahan sebesar 5,86% dan sektor Konstruksi sebesar 5,61%.

PDRB Kabupaten Dairi menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dengan lapangan usaha sebagai berikut:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya

2.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2024, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembanguan.
3. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan *(pro poor)* di Kabupaten Dairi.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, dan lainnya dengan tetap memperhatika kententuan dan peraturan yang berlaku, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional.
6. Terkait *Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
7. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan

b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

c. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

BAB III
PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN DAIRI

3.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata – rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Profil Kemiskinan Kabupaten Dairi menggambarkan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tahun 2024 bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mengalami penurunan yang signifikan. Koordinasi dengan Instansi terkait Kemiskinan yang bergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) secara intens dilakukan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/ Kabupaten/Kota

Konsep kemiskinan terbagi atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada

dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

3.1.1. Kemiskinan Absolut

Secara sederhana kemiskinan absolut adalah derajat kepemilikan materi atau standar kelayakan hidup orang-orang atau keluarga yang berada di garis atau di bawah garis subsisten. Indikatornya sangat terukur, di mana a da standar kehidupan yang dikategorikan secara berjenjang, yakni dibawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (Sayogya, 1988). Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (Sayogya, 1988).

Kemiskinan absolut diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu yang biasanya berupa jumlah atau nilai pendapatan dan unit uang. Namun ukuran bisa pula berbentuk jumlah konsumsi kalori, atau lainnya, yang memungkinkan adanya perbedaan jumlah atau nilai perbedaan pendapatan dalam unit uang. Parameter ini merupakan ukuran yang tetap dan kriteria pengukuran seperti itu diperoleh dari pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar.

3.1.2. Kemiskinan Relatif

Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada di lapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dengan kategorisasi seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat

mencukupi hak-hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhinya berada di lapisan terbawah.

Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang di bawah (miskin) dan mereka yang makmur (better-off) dalam setiap dimensi stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan dan para ahli sosiologi pada hakikatnya lebih tertarik pada isu ketimpangan. Misalnya mereka lebih tertarik pada kelompok masyarakat pada spektrum pendapatan 5 persen atau 10 persen paling bawah dalam hirarki pendapatan. Dalam pendekatan ini persentase orang yang relatif miskin cenderung konstan walaupun kondisi ekonomi berubah.

3.2. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Dairi

3.2.1. Indikator Makro Kabupaten Dairi

Data–data terkait kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu data makro dan data mikro, dengan penjelasan sebagai berikut :

3.2.1.1. Data Makro

Data makro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme *survey* (sampel), bersifat kualitatif, memberikan gambaran umum dan profil suatu daerah, sebagai pengambilan kebijakan makro, dan tidak dapat menampilkan secara by name by address.

Contoh data makro adalah data kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota yang diterbitkan 2 kali setahun dalam Berita Resmi Statistik BPS.

3.2.1.2. Data Mikro

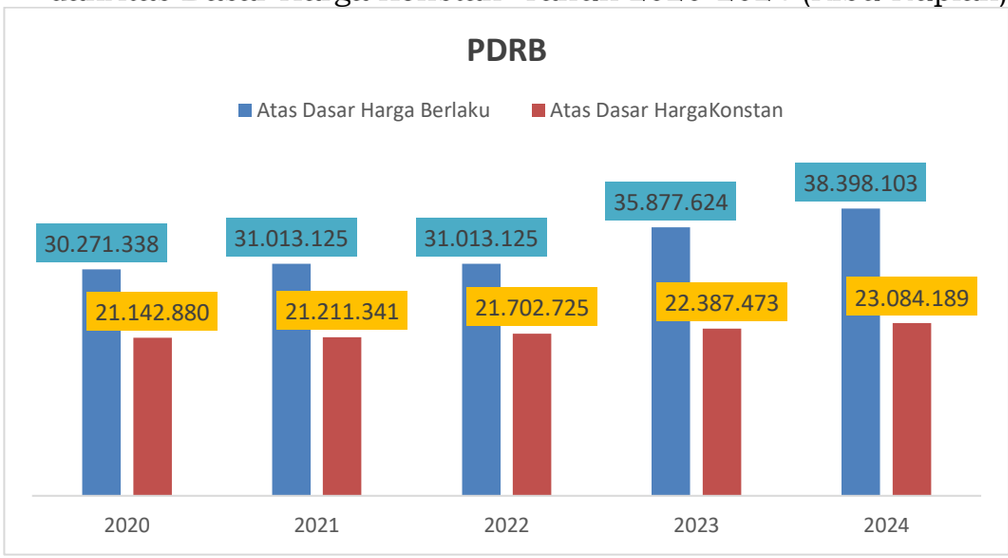
Data mikro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai intervensi program/kegiatan secara *by name by address;*

Contoh data mikro adalah data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan yang terbaru adalah data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022 dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2024.

3.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Gambar 3.1
Perkembangan Waktu PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku danAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

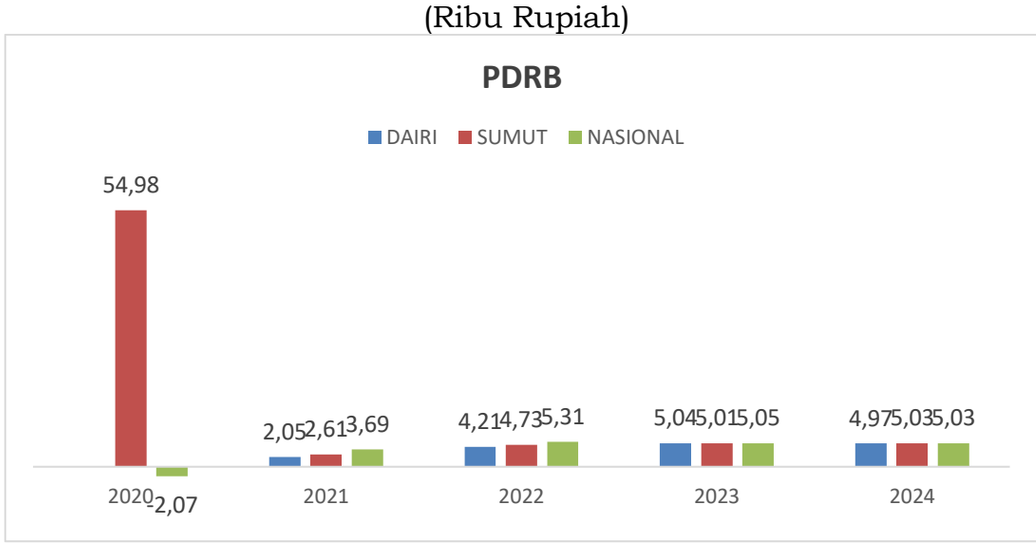


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 sebesar 30.271.338, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 nilainya sama menjadi 31.013.125 ribu rupiah pada Tahun 2023 meningkat menjadi 35.877.624, angka tersebut meningkat menjadi 38.398.103 Tahun 2024. Sementara itu dari perhitungan

harga konstan, periode Tahun 2020 sebesar 21.142.880, pada Tahun 2021 sebesar 21.211.341 dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 21.702.725, kemudian pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 22.387.473 dan pada Tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 23.084.189.

Gambar 3.2
Perkembangan Antar Waktu PDRB per kapita Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024
(Ribu Rupiah)



Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2025

3.2.1.4. Inflasi

Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Dairi dalam penanganan infasi :

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian pasar. TPID secara rutin melakukan pemantauan terhadap harga komoditas dan inspeksi distributor maupun pasar dengan tujuan memastikan pasokan tetap tersedia, mencegah praktik spekulatif dan menjaga stabilitas harga
2. Gerakan menanam. Pemerintah mendorong penanaman komoditas strategis penyumbang inflasi seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, jagung kentang dan kubis. Gerakan

menanam bersama melibatkan karang taruna dan masyarakat desa.

3. Pembentukan ekosistem pertanian maju melalui pembentukan koperasi petani, digitalisasi pertanian, penggunaaan kredit usaha serta penyediaan alat dan sarana produksi serta mendorong hilirisasi pangan dan memastikan petani mendapat harga layak
4. Kejasama Antar Daerah (KAD) dan *off-taker* strategis. Pemerintah Kabupaten Dairi menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk *distribusi supply* komoditas.
5. Pasar Murah dan Operasi Pasar. TPID bersama Bulog dan Bank menyelenggarakan pasar murah, terutama saat hari besar keagamaan dengan menjual paket sembako. Kegiatan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan menekan lonjakan harga komoditas pokok.
6. Partisipasi Rapat Nasional Inflasi dan Koordinasi Intensif. Pemerintah Kabupaten Dairi aktif dalam mengikuti rapat pengendalian inflasi untuk memperkuat sinergi kebijakan.

3.2.1.5. Gini Rasio

A. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu mencolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi, bisa berefek pada semakin melebarnya kesenjangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) atau ketimpangan antar daerah (maju dan tertinggal).

Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini digunakan untuk menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga)

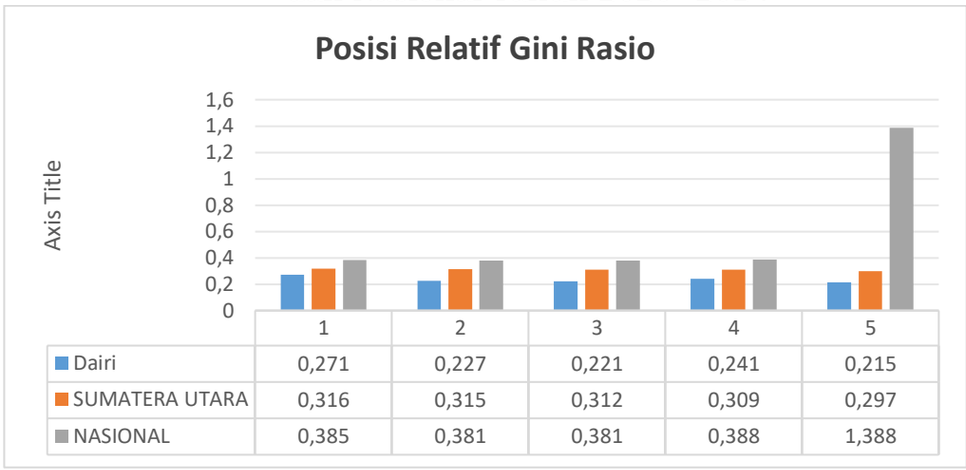
secara agregatif yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu. Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

Hasil perhitungan Gini Ratio akan bergerak dari angka nol sampai dengan satu dengan pengertian umum bahwa bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan apabila angka Gini Ratio yang diperoleh mendekati angka satu dikatakan sangat timpang. Angka Gini Ratio umumnya bervariasi, tergantung pada tingkat pembangunan suatu daerah. Kecendrungan fakta yang terjadi adalah pada daerah perkotaan Gini Ratio akan cenderung lebih tinggi karena lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kebanyakan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah pedesaan akan lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai Gini Ratio yang dimulai dari 0-1 dibagi dalam beberapa kategori. Jika nilai Gini Ratio, G=0, maka di daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan kata lain terjadi pemerataan sempurna. Jika nilai Gini Ratio $0<G<0,3$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori rendah. Jika nilai Gini Ratio, $0,3<G<0,5$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori sedang. Jika nilai Gini Ratio, $0,5<G<1$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori tinggi. Jika nilai Gini Ratio, G=1 maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori ketimpangan sempurna.

Mengingat angka Gini Ratio pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, maka peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin dalam daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa angka Gini Ratio akan cenderung tinggi bila jumlah penduduk miskin di daerah bersangkutan juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, angka Gini Ratio akan cenderung lebih rendah bilamana jumlah penduduk miskin berkurang.

Gambar 3.3
Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020 -2024



	1	2	3	4	5
Dairi	0,271	0,227	0,221	0,241	0,215
SUMATERA UTARA	0,316	0,315	0,312	0,309	0,297
NASIONAL	0,385	0,381	0,381	0,388	1,388

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2025.

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi Tahun 2020 berada pada angka 0,27, nilai gini ratio Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan gini ratio Kabupaten Dairi atau berada pada angka 0,32. Nilai gini ratio Sumatera Utara cenderung stabil diatas angka 0,31 sedangkan nilai gini ratio Kabupaten Dairi cenderung berfluktuasi di bawah angka 0,27.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 yang tertinggi terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai 0,27 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih dalam kategori rendah. Pada Tahun 2022 gini ratio Dairi berada pada angka 0,22 dan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan di angka 0,24, dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 0,21.

Dalam rangka menekan angka ketimpangan/gini ratio Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan beberapa kebijakan seperti meningkatkan konektifitas antar wilayah, perbaikan infrastruktur dasar, pengembangan Kawasan pertanian terpadu, meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola langsung ke masyarakat, fasilitasi pemberian kredit usaha rakyat kepada petani dan pelaku UMKM, pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat dan kebijakan-kebijakan lainnya.

1. Keterbatasan lahan pertanian dan ketergantungan pada pertanian tradisional

2. Pendapatan musiman dan tidak stabil, bergantung pada musim panen
3. Harga jual produk rendah
4. Minim akses modal dan teknologi; sulit mengakses kredit perbankan (KUR), dan tidak mampu membeli teknologi pertanian
5. Ketergantungan pada bantuan sosial

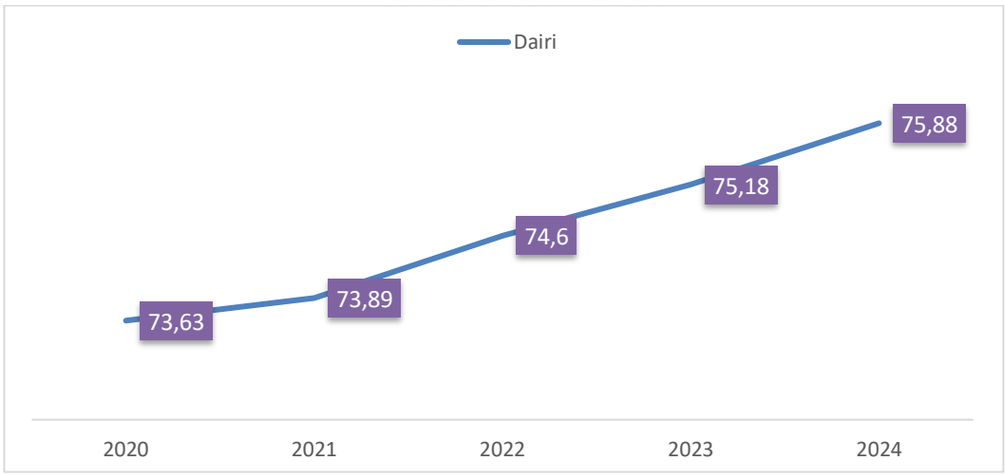
Berdasarkan temuan dan analisis makro, serta analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi untuk indikator persentase penduduk miskin (P0), jumlah penduduk miskin (jiwa), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), lanjut usia, permasalahan utama kemiskinan Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Melambatnya penurunan persentase penduduk miskin (P0)
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin (jiwa) dan melambat penurunan jumlahnya
3. Melambatnya perbaikan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).
4. Tingginya jumlah individu lanjut usia dari rumah tangga 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terrendah (Desil 1).
5. Akses terbatas ke permodalan dan Keuangan; UMKM sulit mendapatkan kredit (KUR) karena persyaratan administrasi dan agunan.
6. Kesenjangan wilayah (urban–rural gap); kemiskinan lebih tinggi di desa (7,71%) dibanding kota (7,10%).

3.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

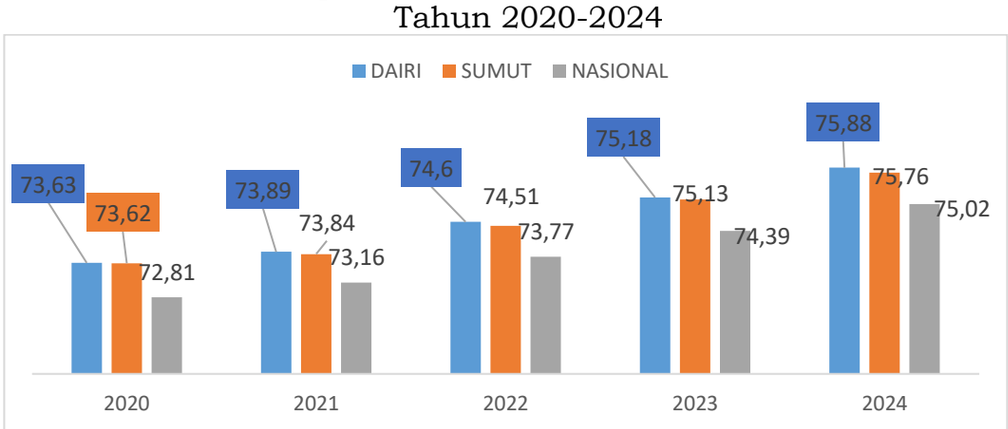
Gambar 3.4
Perkembangan antar waktu Indeks Pembangunan Manusia Kab. Dairi 2020 – 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi sebesar 71,57 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 71,84 dan pada Tahun 2022 sebesar 72,56, pada Tahun 2023 adalah sebesar 75,18,dan pada tahun 2024 sebesar 75,88, meningkat sebanyak 0,93 persen dari tahun sebelumnya. Sejak Tahun 2022 sampai 2024, IPM Kabupaten Dairi berada sedikit di atas IPM Provinsi Sumatera Utara dan IPM secara Nasional.

Gambar 3.5
Relevansi IPM Kabupaten Dairi, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Sumaera Utara Dalam Angka 2025.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak hanya diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat pembangunan dari satu aspek saja yaitu aspek ekonomi sedangkan aspek yang lainnya tidak diperhitungkan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Keberhasilan

pembangunan di suatu daerah seharusnya juga dilihat dari sisi keberhasilan pembangunan manusianya. Konsep pembangunan manusia merupakan konsep yang menginginkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Kualitas hidup masyarakat yang baik mencerminkan terjadinya pemerataan pembangunan di daerah tersebut dimana semua masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tidak hanya pada segelintir orang.

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri, hanya menunjukan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah dengan pencapaian wilayah lain juga dapat diteliti. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 3.1
Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
60 ≤ IPM ≤ 70	Sedang
70 ≤ IPM ≤ 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Dairi masih mencapai angka 75,88 dan berada pada status “tinggi”.

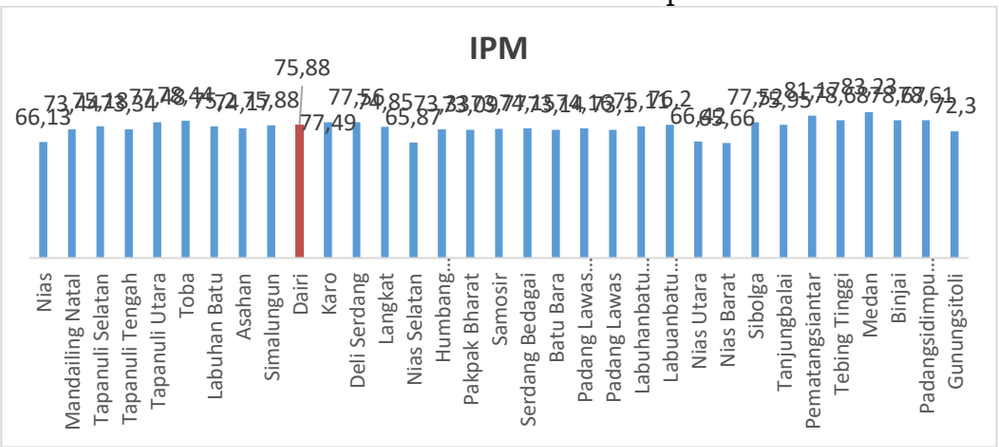
Tabel 3.2
IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi Tahun 2024

Komponen	Nilai
Angka Harapan Hidup	74,38
Harapan Lama Sekolah	13,53
Rata-rata Lama Sekolah	9,89
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	Rp. 11.355

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	75,88

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Gambar 3.6
Grafik Posisi Relatif IPM Kabupaten Dairi



IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan masyarakat (Angka Harapan Hidup Waktu Lahir), dan daya beli (Pengeluaran Konsumsi).

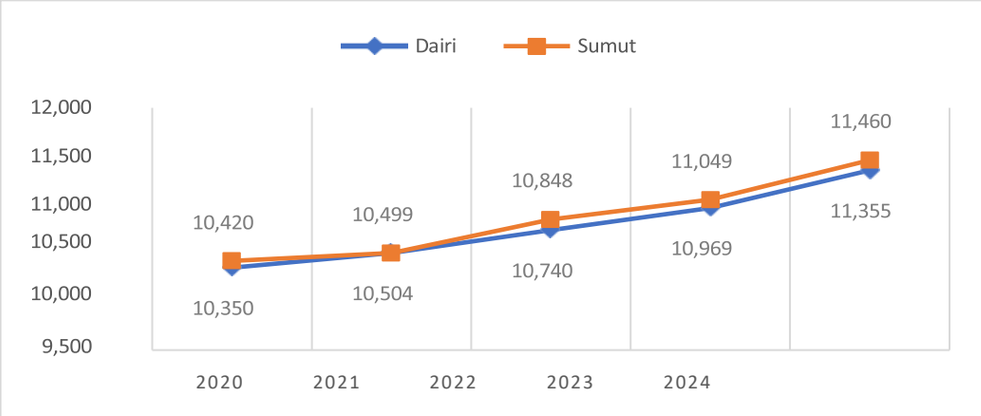
3.3. Kondisi Kemiskinan Daerah

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kondisi kemiskinan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya akan dibahas sebagai berikut :

3.3.1. Pengeluaran Riel Perkapita

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 3.7
Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun 2020 -2024 (ribu rupiah)



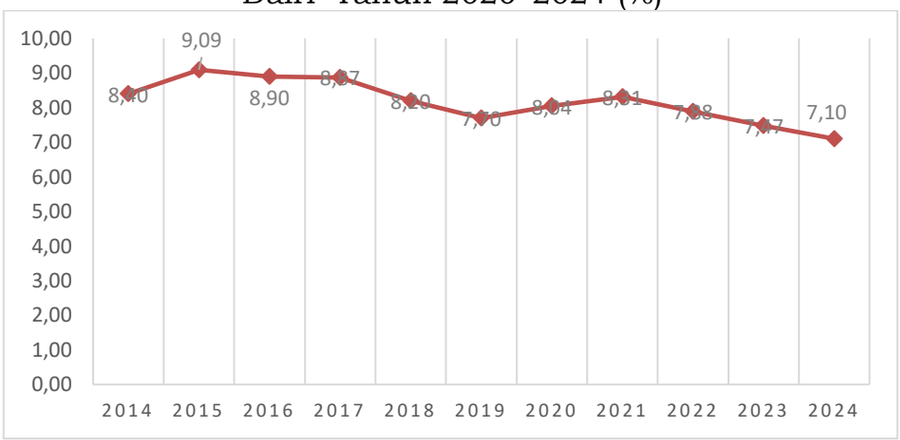
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita penduduk pada Tahun 2020 sebesar Rp.10.350.000,- per kapita per tahun, lalu meningkat pada Tahun 2021 menajdi Rp.10.504.000,- per kapita dan meningkat kembali Tahun 2022 menjadi Rp.10.740.000,- per kapita. Pada Tahun 2023 pengeluaran per kapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.10.969.000,- serta pada Tahun 2024 pengeluaran perkapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.11.355.000,-. Hal serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan.

3.3.2. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 8,04 persen, namun di tahun 2021 seiring dengan adanya wabah covid -19 meningkat menjadi 8,31 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2022 di angka 8,42 persen sampai Tahun 2024 yang mencapai 7,10%, selengkapnya dapat dilihat dari Gambar berikut.

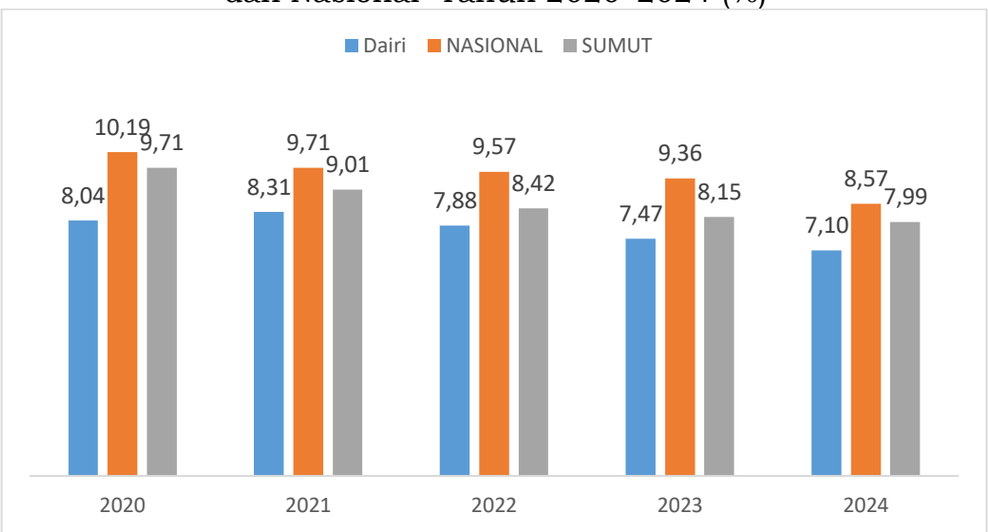
Gambar 3.8
Perkembangan antar waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi Tahun 2020–2024 (%)



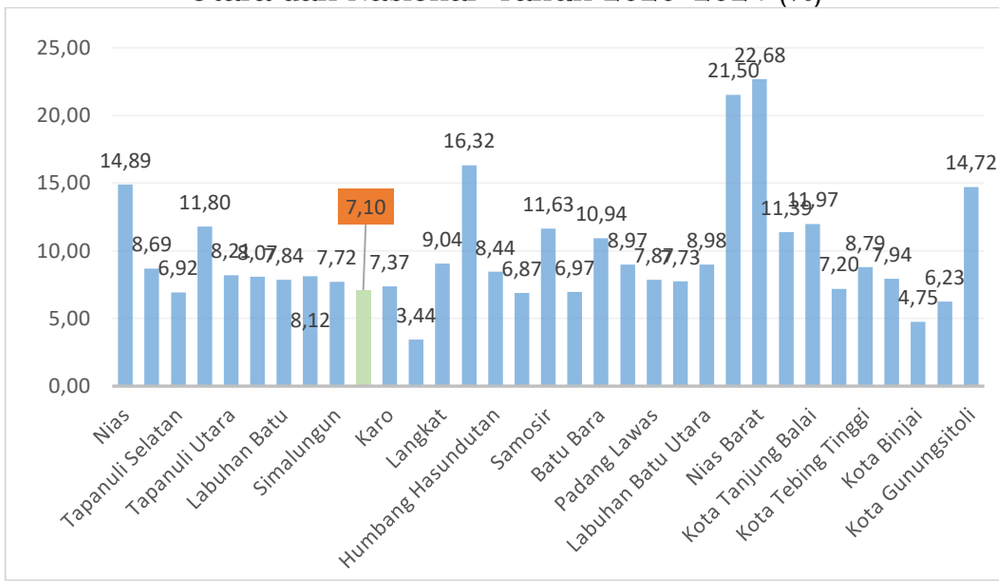
Sumber ; BPS Dairi

Jika dibandingkan dengan Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara, Penduduk Miskin Kabupaten Dairi lebih rendah dari Sumatera Utara dan Nasional sejak Tahun 2020-2024 sebagaimana yang terlihat dalam Grafik berikut :

Gambar 3.9
Relevansi Penduduk Miskin Kabupaten Dairi , Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020–2024 (%)



Gambar 3.10
Posisi Relatif Penduduk Miskin Kabupaten Dairi , Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020–2024 (%)

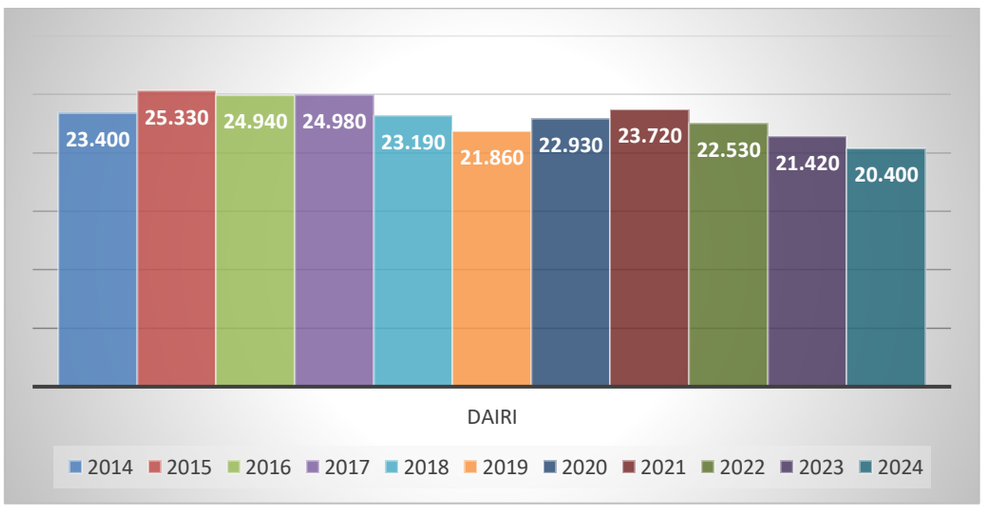


Sumber: BPS, Sumatera Utara Dala Angka Tahun 2025

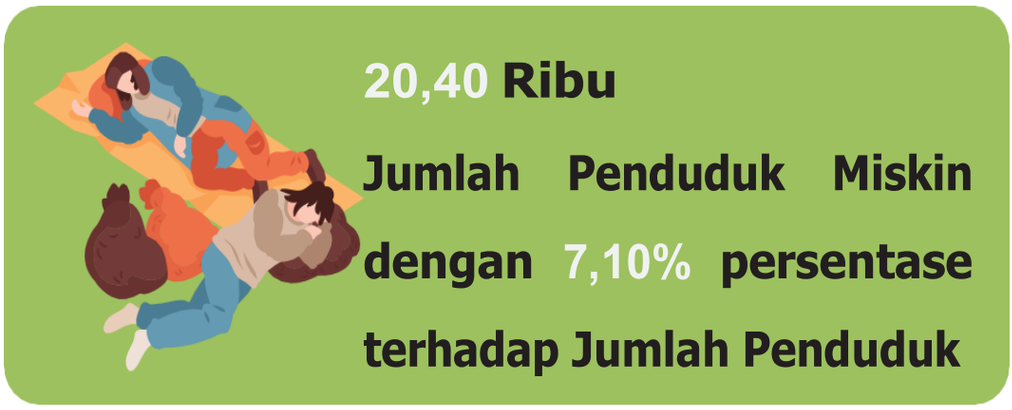
3.3.3. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Perkembangan Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Dairi tahun 2022 sebesar 22,530 ribu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mengalami penurunan jika di bandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 23720 ribu jiwa dan di tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 21.420 jiwa dan di Tahun 2024 juga kembali mengalami penurunan sebanyak 1020 Jiwa menjadi 20.400 jiwa. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2014 hingga tahun 2024 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 3. 11 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Dairi Tahun 2020–2024 (%)

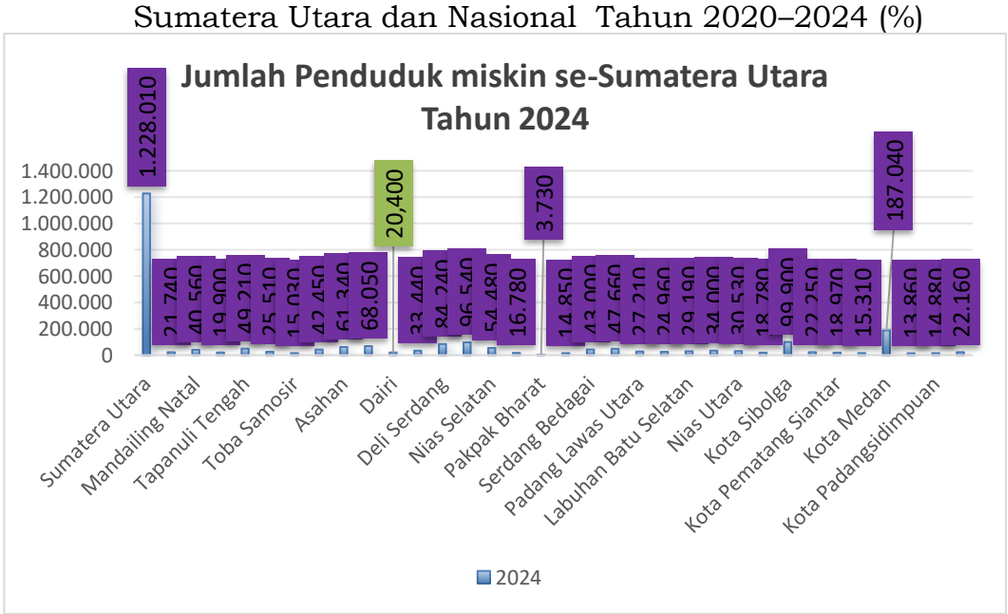


Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Dairi Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:



Jumlah Penduduk Miskin terbanyak di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2024 paling banyak ada di Kota Medan yaitu sebanyak 187,040 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 3730 jiwa. Capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3. 12 Posisi Relatif Penduduk Miskin Kabupaten Dairi , Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020–2024 (%)

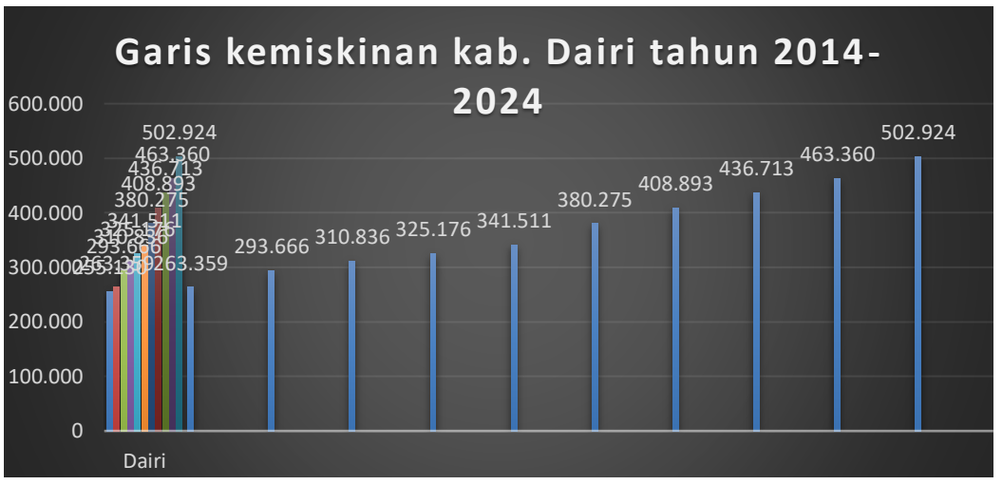


Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

3.3.4. Garis Kemiskinan (GK)

Identifikasi Masalah Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Gambar 3.13
Perkembangan Antar Waktu Penduduk Miskin Kabupaten Dairi ,
Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020–2024 (%)



Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Selama sepuluh tahun terakhir Garis Kemiskinan Kabupaten Dairi mengalami peningkatan, Tahun 2024 Garis Kemiskinan meningkat dari Rp. 463.350 per kapita per bulan menjadi Rp. 502.924 per kapita per bulan pada tahun 2024.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Tahun 2024 Garis Kemiskinan meningkat dari Rp. 463.360 di tahun 2023 menjadi Rp. 502.924 di tahun 2024 -; yang terdiri atas makanan 61,96 persen dan bukan makanan sebesar 38,04 persen.

Persentase pengeluaran makanan terbesar adalah untuk makanan dan minuman jadi sebesar 11,03 persen dan persentase pengeluaran bukan makanan terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 19, 77 persen, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

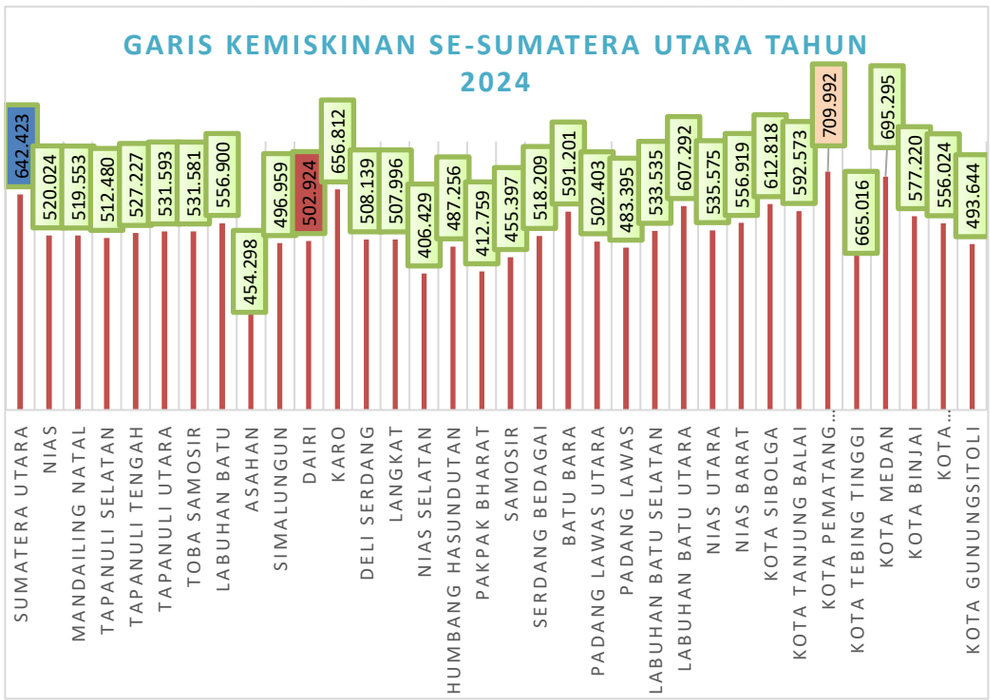
Tabel 3.3
Tabel Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan
Kabupaten Dairi Tahun 2023-2024

Kelompok Komoditas	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Makanan		
Padi-padian	9,74	10,54
Umbi-umbian	0,41	0,43
Ikan/udang/cumi/kerang	7,32	8,14
Daging	2,87	3,05
Telur dan susu	3,32	3,30
Sayur-sayuran	4,75	5,81
Kacang-kacangan	0,84	0,91
Buah-buahan	2,65	2,35
Minyak dan kelapa	1,62	1,59
Bahan minuman	2,04	2,11
Bumbu-bumbuan	1,00	1,10
Konsumsi lainnya	0,65	0,53
Makanan dan minuman jadi	11,03	11,56
Rokok	10,61	10,54
Jumlah makanan	58,85	61,96
Bukan makanan		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	19,77	18,35
Aneka barang dan jas	11,02	11,20
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,83	2,65
Barang tahan lama	2,98	1,44
Pajak, pungutan, dan asuransi	3,72	3,81
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	0,85	0,60
Jumlah bukan makanan	41,17	38,04
Jumlah	**100,0**	**100,0**

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan .

Sedangkan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 untuk garis kemiskinan (Rp), tertinggi di Kota Pematang Siantar (709.992)ikuti olehTanah Karo (Rp. 656812), Kabupaten Sibolga (Rp. 612.818 , untuk kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat (Rp. 412.759).

Gambar 3.14
Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



3.3.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

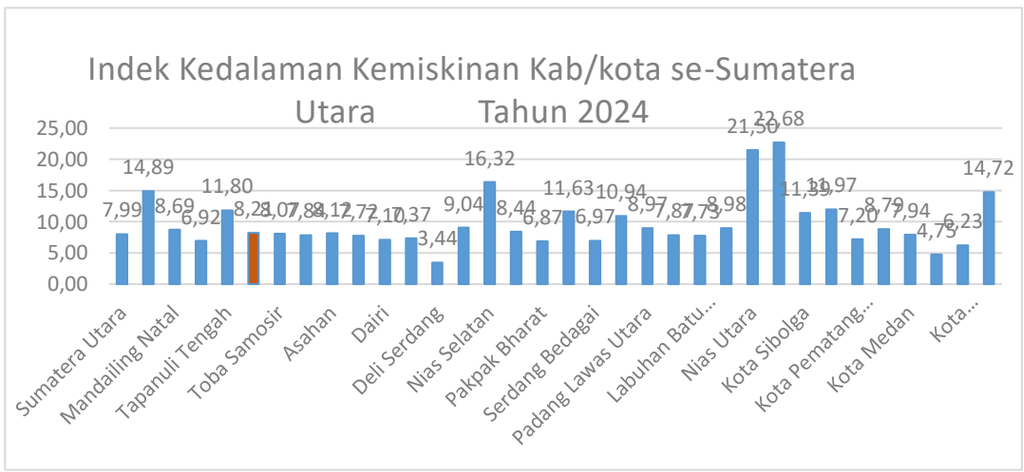
Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Berdasarkan data pada tabel berikut indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 1,09, pada Tahun 2021 mencapai 1,24, dan pada Tahun 2022 menurun di angka 0,65 dan meningkat ke angka 0,93 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 0,79.

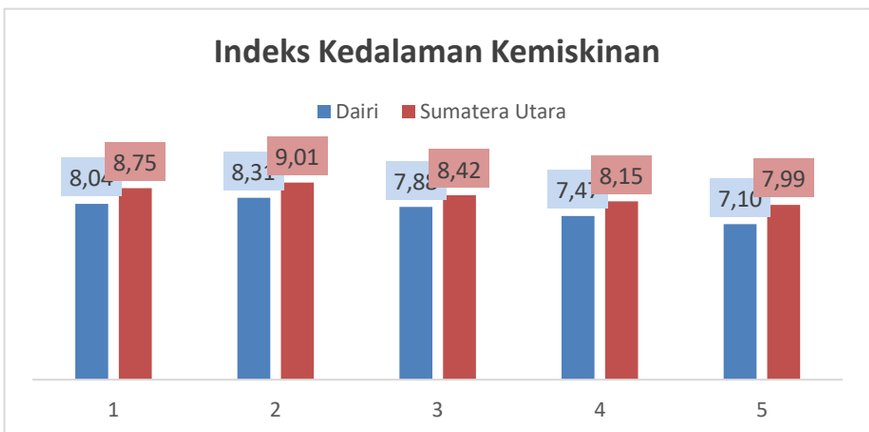
Gambar 3.15
Grafik Perkembangan antar waktu Garis Kemiskinan (Rp) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Gambar 3.16
Grafik Perkembangan Anta Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



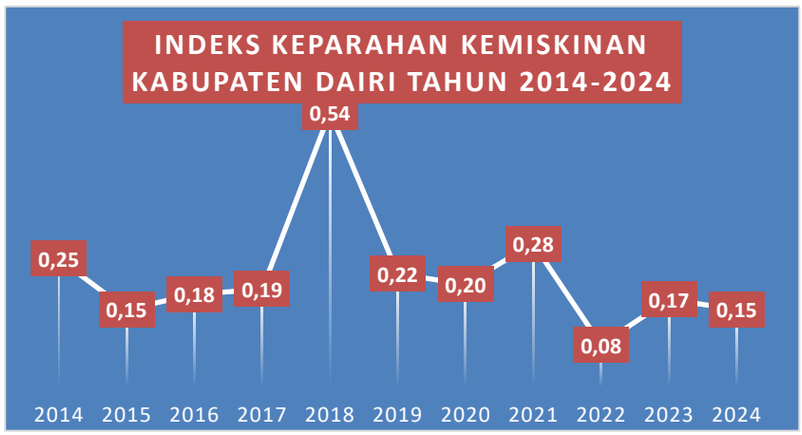
Gambar 3.17
Grafik Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



3.3.6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 0,20 dan pada Tahun 2021 meningkat mencapai angka 0,28 dan menurun di angka 0,08 pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,17, kemudian pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,15 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Gambar 3.18
Grafik Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Dairi Tahun 2024



Penurunan nilai Indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, sementara penurunan nilai Indeks keparahan kemiskinan mengindikasi bahwa ketimpangan pengeluaran konsumsi antara penduduk miskin semakin berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di sekitar garis kemiskinan mampu mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan. Keadaan tersebut didukung semakin berkurangnya kesenjangan rata-rata pengeluaran konsumsi antar rumah tangga miskin, seperti dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

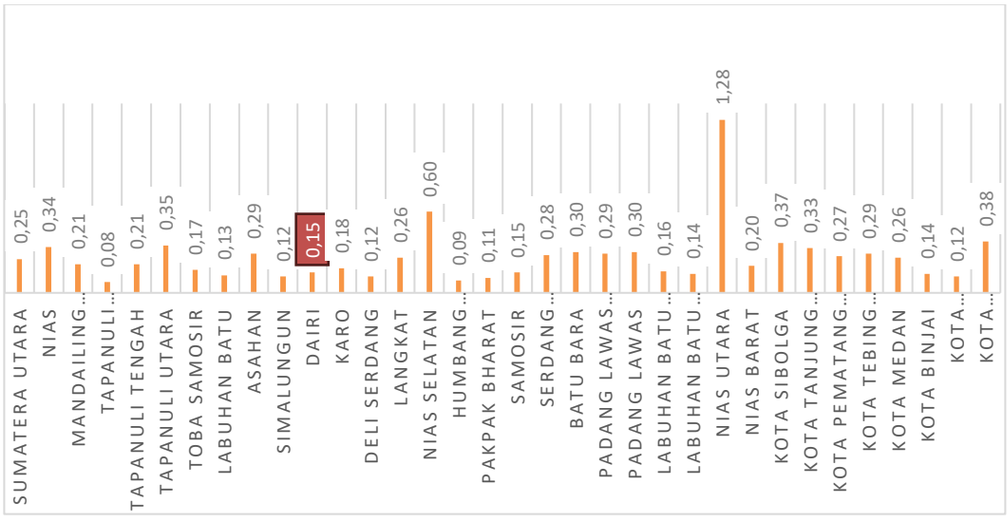
Tabel 3.4
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi, Tahun 2020 – 2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,09	1,24	0,65	0,93	0,79
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,20	0,28	0,08	0,17	0,15

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

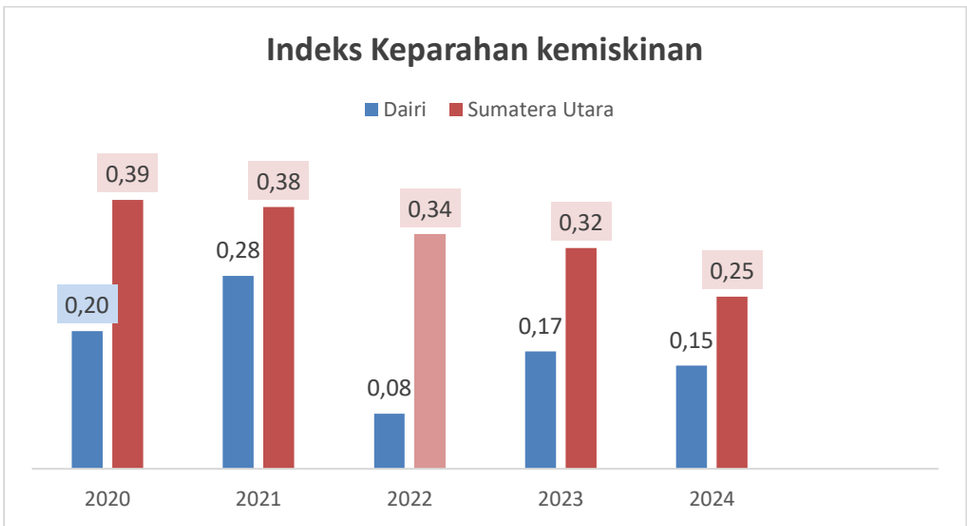
Gambar 3.19
Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota se- Sumatera Utara

Tahun 2024



Gambar 3.20
Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota se- Sumatera Utara

Tahun 2024



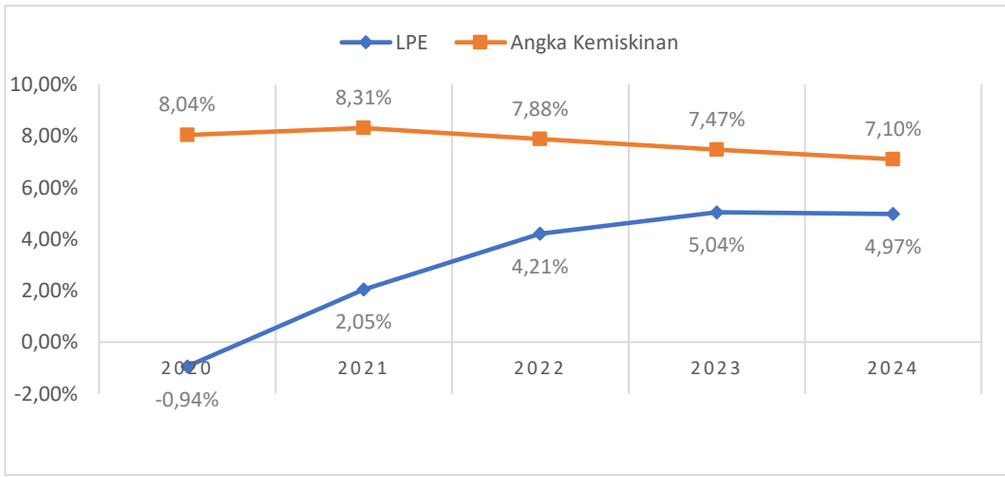
3.3.7. Penduduk Lanjut Usia DTSEN

Tabel 3.5
Jumlah Lansia Dan Disabilitas Desil 1 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Lansia	Disabilitas
1	Gunung Stember	98	6
2	Tanah Pinem	225	9
3	Sinehi	145	-
4	Silima PP	133	8
5	Siempat Nempu	165	5
6	Sinehu	110	1
7	Tiga Lingga	134	7
8	Pegagan Hilir	223	1
9	Lae Parira	91	4

NO	KECAMATAN	Lansia	Disabilitas
10	Sumbul	361	12
11	Berampu	48	3
12	Sidikalang	129	4
13	Sitinjo	10	0
14	Parbuluan	102	8
15	Silahisabungan	32	5
	Dairi	2006	

Gambar 3.21
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, namun kenyataannya hubungan ini tidak selalu linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi menurun diakibatkan oleh pandemik Covid-19 diikuti meningkatnya angka kemiskinan. Namun pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tapi tidak diikuti penurunan angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh pemulihan pasca pandemic Covid-19.

Program penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

No	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
4	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Rehabilitasi Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Penanganan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Mengurangi Beban Pengeluaran
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pendapatan
		Program Hubungan Industrial	Meningkatkan Pendapatan
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Khusus Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Mengurangi Beban Pengeluaran

No	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Mengurangi Beban Pengeluaran
8	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatkan Pendapatan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

3.4. Bidang-Bidang Terkait Kemiskinan

3.4.1. Bidang Pendidikan.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan, dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah. Keenam indikator tersebut digunakan untuk melihat gambaran pembangunan dalam aspek pendidikan di Kabupaten Dairi.

Hal ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dengan pokok permasalahan

belum optimalnya kualitas dan kemerataan layanan pendidikan, dengan determinan utama:

1. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan
2. Belum meratanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Belum meratanya jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi
4. Belum meratanya distribusi tenaga kependidikan di seluruh wilayah Kabupaten Dairi
5. Masih tingginya ketimpangan partisipasi pendidikan dasar.

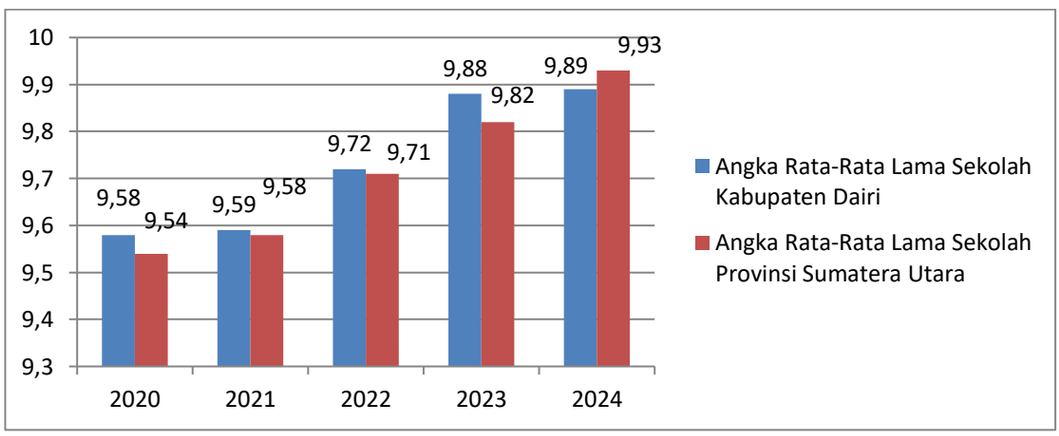
Untuk analisis lebih lanjut permasalahan kemiskinan dalam bidang pendidikan akan difokuskan pada rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan partisipasi pendidikan.

3.4.1.1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Dairi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.22
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024 (Tahun)



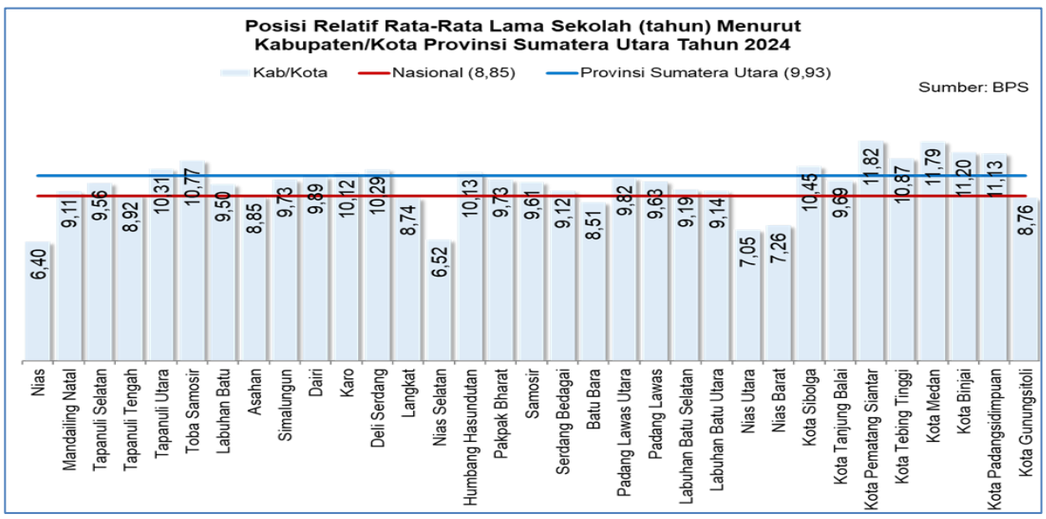
Sumber : BPS Sumatera Utara, Dairi Dalam Angka 2025.

Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 tercatat diangka 9.58 dan pada Tahun 2021 tercatat di angka 9,59 dan tercatat di angka 9,72 pada Tahun 2022, meningkat ke angka 9,88 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dairi menjadi sebesar 9,89 tetapi masih dibawah Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,93. Dari data diatas dapat

dikatakan bahwa penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Dairi telah menempuh pendidikan hingga 9,89 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA kelas 1.

Untuk level kabupaten/kota tahun 2024, dengan berbagai tantangan dan hambatan baik geografis, infrastruktur maupun ekonomi, capaian rata- rata lama sekolah sangat bervariasi dengan catatan ada capaian yang sudah sangat tinggi namun ada juga capaian yang masih sangat rendah dengan ketimpangan rata-rata lama sekolah yang cukup lebar, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

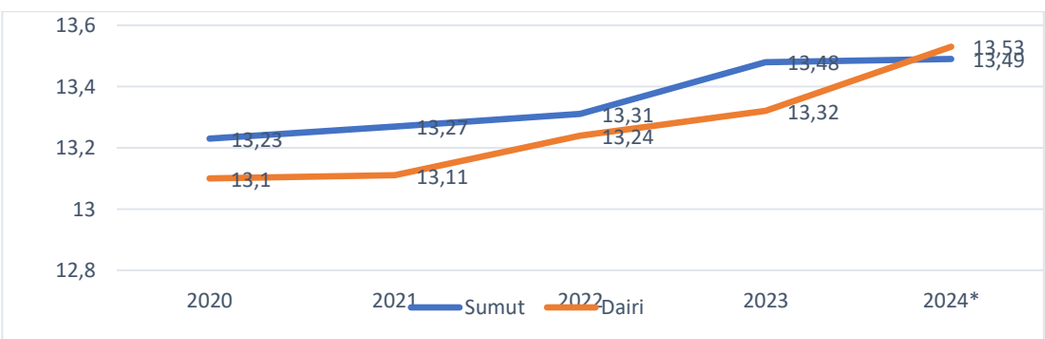
Gambar 3.23
Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



3.4.1.2. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.24
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024



Sumber : BPS Sumatera Utara, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi masih 13,11, sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 13,27. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 13,24 sedangkan rata-rata lama sekolah milik Provinsi Sumatera Utara yaitu 13,31 dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 13,32 dan provinsi menjadi 13,48. Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah yang cukup signifikan ini memberi dampak yang positif kepada Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2024 harapan tersebut meningkat ke jenjang sarjana yaitu 13,53.

Bisa kita simpulkan dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukan adanya peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat petumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian *(stock)* dan penambahan *(flow)* sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Dairi.

3.4.1.3. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK Pendidikan

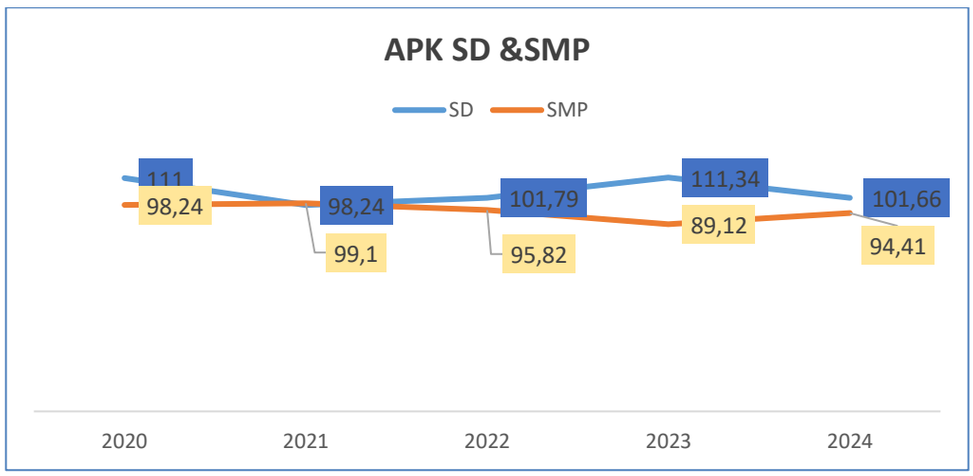
Anak Usia Dini, SD dan SMP Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.7
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	111	98,24	101,8	111.34.00	101,7
SMP	98,24	99,1	95,82	89,12	94,41

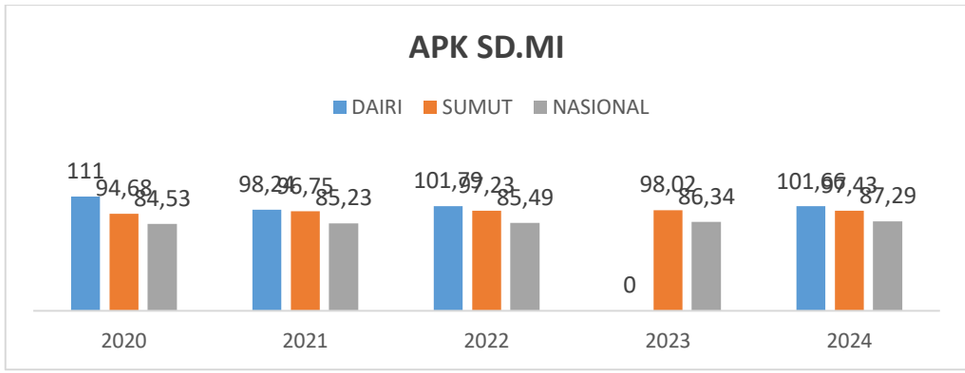
Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

Gambar 3.25
Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Dairi

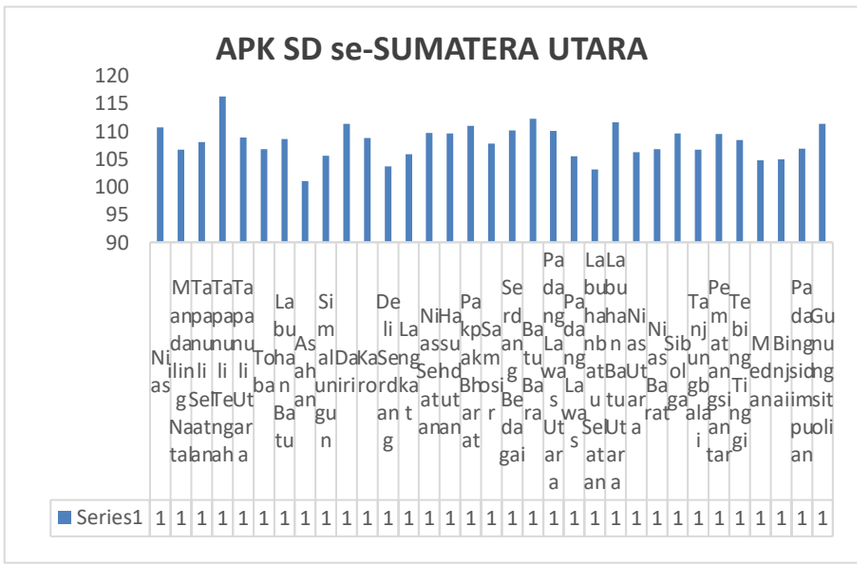


Angka Partisipasi kasar SD rata-rata di atas 100 persen, dimana pada Tahun 2020 sebesar 111,00 persen, pada Tahun 2021sebesar 98,24 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 101,79 persen, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 111,34 persen dan Tahun 2024 menurun menjadi 101,66 persen. Capaian APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang telah menempuh sekolah ketika belum cukup umur atau bahkan melebihi umur yang seharusnya.

Gambar 3.26
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

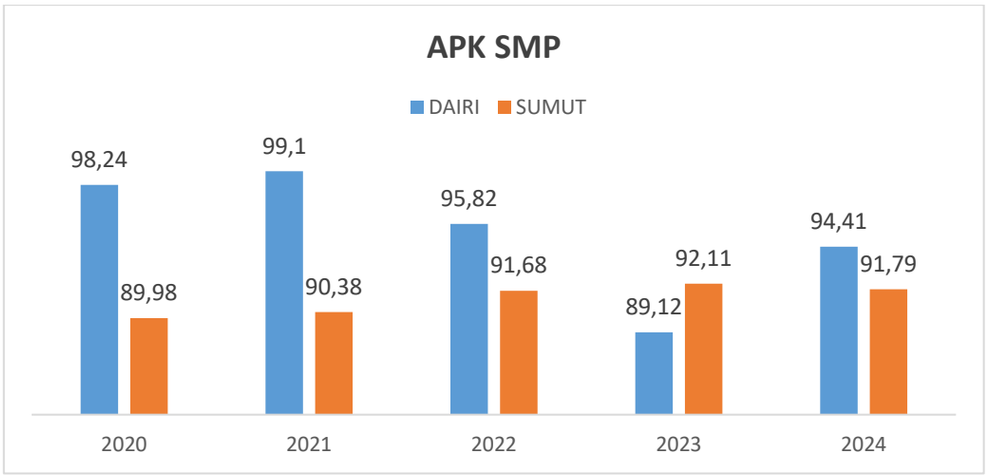


Gambar 3.27
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar SD/MI se-Provinsi Sumatera Utara



Angka Partisipasi Kasar SMP rata-rata meningkat setiap tahun dimana pada Tahun 2020 sebesar 98,24 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 99,10 persen, pada Tahun 2022 sebesar 95,82, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 89,12 persen dan Tahun 2024 kembali naik menjadi 94,41 persen.

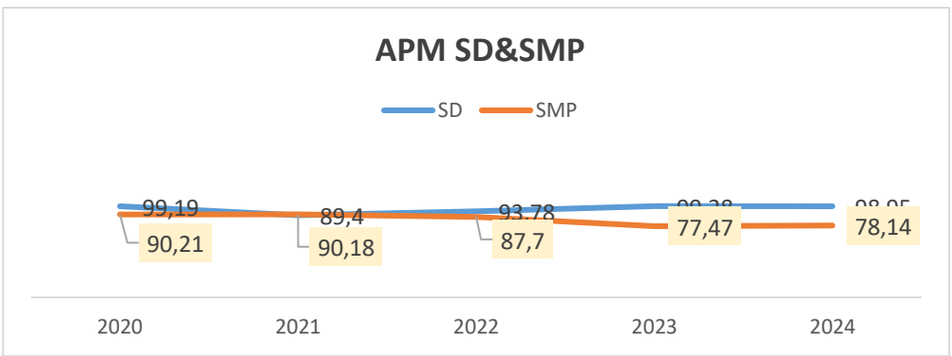
Gambar 3.28
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara



3.4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan, perkembangan APM Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel di bawah :

Gambar 3.29
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

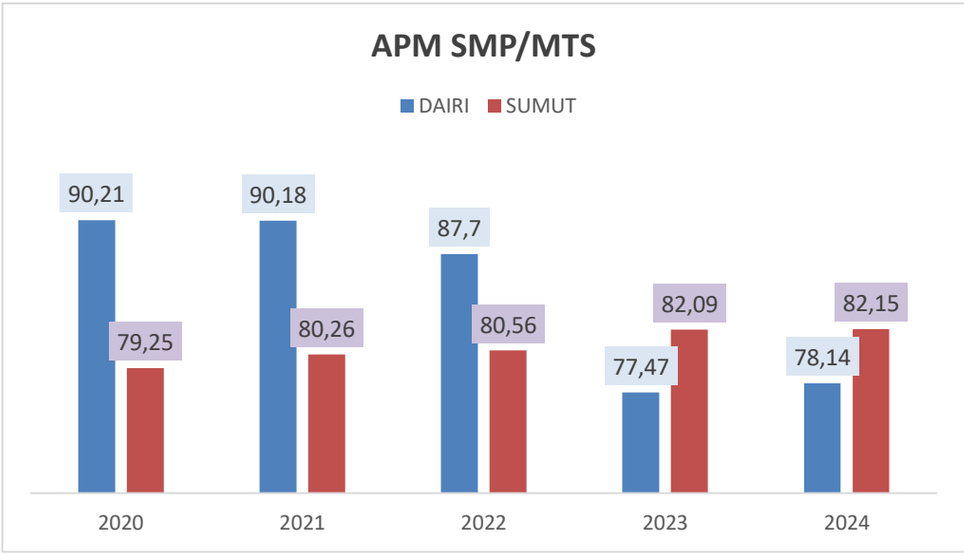


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

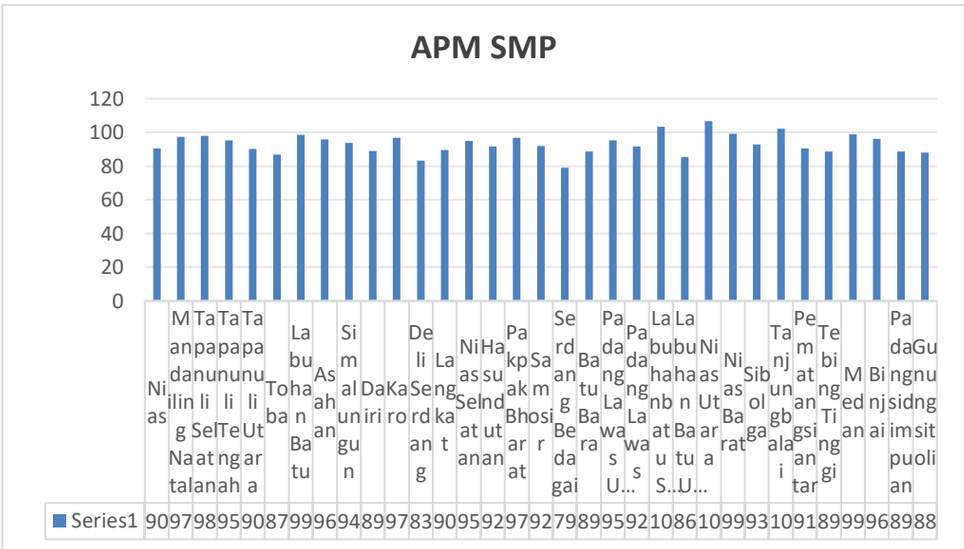
Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2020 sebesar 99,19 persen pada Tahun 2021 turun menjadi 89,40 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2022 menjadi 93,78 persen dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 99,28 persen. Tahun 2024 menurun menjadi 98,95 persen. Angka Partisipasi Murni SMP selama Tahun 2020-2024 dimana pada Tahun 2020 sebesar 90,21 persen, pada Tahun 2021 menurun menjadi 90,18 persen dan pada Tahun

2022 menurun kembali menjadi 87,70 persen dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 77,47 persen. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 78,14 persen.

Gambar 3.30
Perbandingan Angka Partisipasi Murni SMP Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3.31
Perbandingan Angka Partisipasi Murni SMP se-Provinsi Sumatera Utara

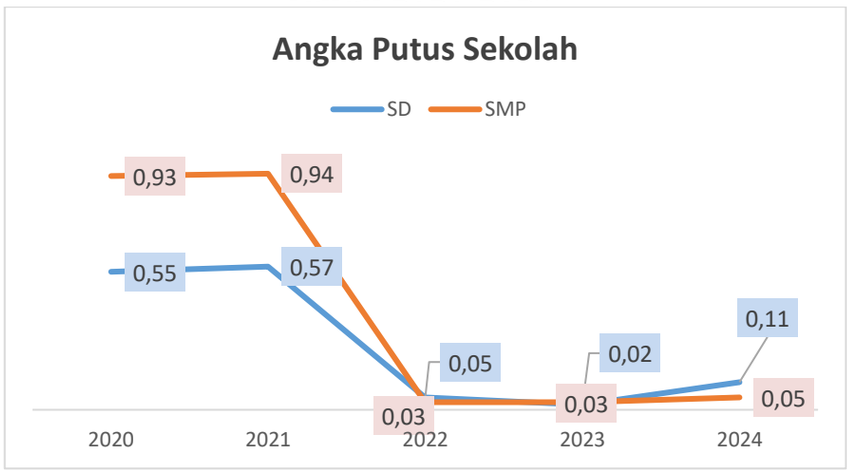


3.4.1.5. Angka Putus Sekolah

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu

wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.32
Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024.

Pada Tahun 2020 sebesar 0,55 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 0,57 persen dan Tahun 2022 sebesar 0,05 persen, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,02 persen dan meningkat menjadi 0,11 persen pada Tahun 2024. Angka Putus sekolah SMP pada Tahun 2020 sebesar 0,93 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 0,94 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 0,03 persen dan pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,03 persen dan meningkat menjadi 0,05 persen pada Tahun 2024.

3.4.1.6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang pendidikan SD dan SMP dari Tahun 2020-2024 telah mencapai seratus persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.33
Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020-2024

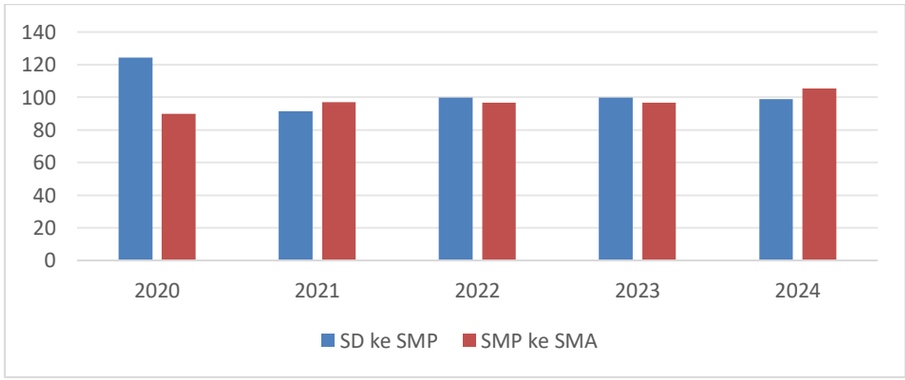


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3.4.1.7. Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA dari Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.34
Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024



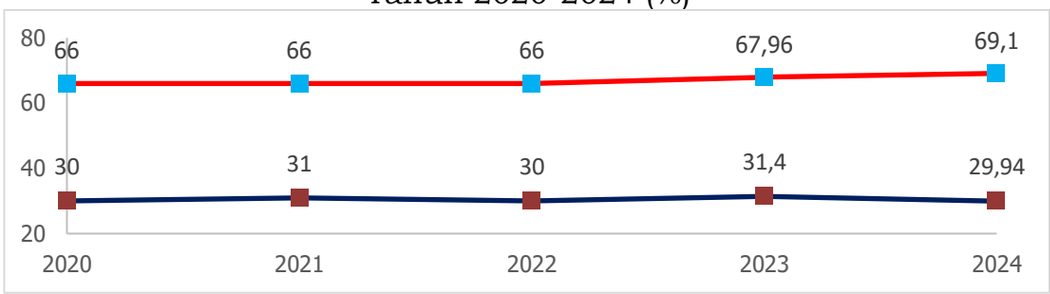
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

Angka Melanjutkan SD ke SMP pada Tahun 2020 sebesar 124,27 persen, Tahun 2021 sebesar 91,49 persen dan menjadi 99,81 persen pada Tahun 2022, Tahun 2023 99,81 persen dan pada tahun 2024 sebesar 98,82 persen. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada Tahun 2020 sebesar 89,85 persen, pada Tahun 2021 menjadi 97,03 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 96,59 persen, Tahun 2023 sebesar 96,59 persen dan pada Tahun 2024 menjadi 105,37 persen.

3.4.1.8. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Tahun 2024 untuk SD/MI adalah 69,10 dan SMP/MTs adalah 29,94.

Gambar 3.35
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024 (%)

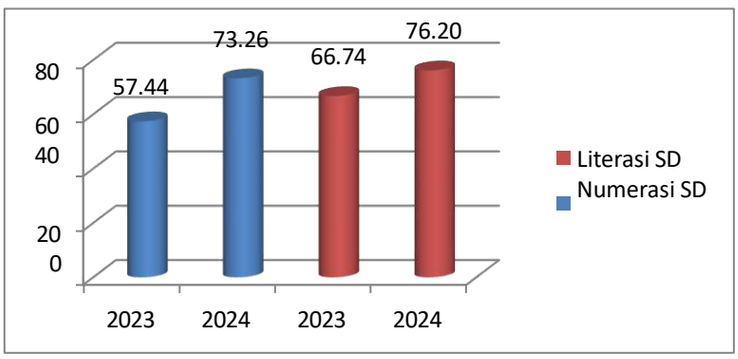


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

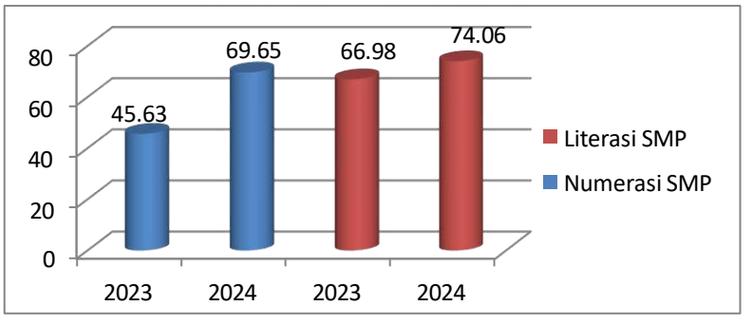
3.4.1.9. Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi numerasi peserta didik di Kabupaten Dairi masih kurang dan masih harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi peserta didik adalah menerapkan model pembelajaran yang dapat menunjang berkembangnya kemampuan tersebut. Penerapan model pembelajaran yang tidak sesuai akan mengakibatkan kemampuan literasi dan numerasi kurang dapat berkembang. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP.

Gambar 3.36
Literasi dan Numerasi SD



Gambar 3. 37
Literasi dan Numerasi SMP



3.4.2. Bidang-Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.Kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, selain sektor pendidikan. Semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan saat ini dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan strategis di sektor kesehatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

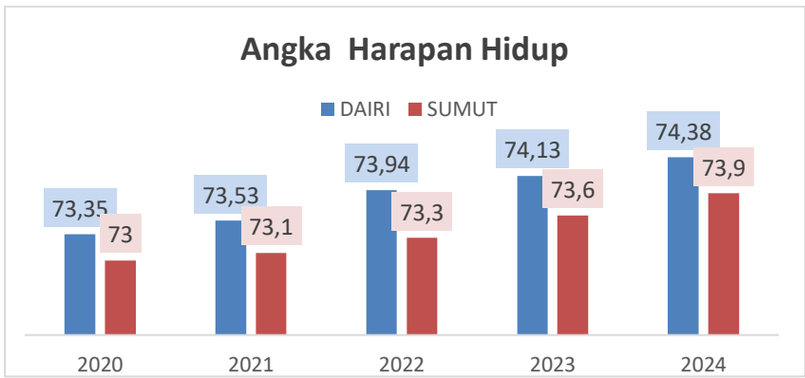
1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2024 AKI sebesar 105 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 76 kasus;
2. Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB). Pada Tahun 2024, AKB sebanyak 10 per 1.000 kelahiran hidup meningkat dibandingkan tahun sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Belum optimalnya penurunan prevalensi stunting, dimana pada Tahun 2024 prevalensi sebesar 29 persen.

3.4.2.1. Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dua tahun terakhir yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut.

Gambar 3.38
Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020 - 2024



Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 mengalami peningkatan setiap Tahun dan lebih tinggi dari angka rata-rata Propinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2024 adalah 74,38 sedangkan rata-rata capaian Provinsi Sumatera Utara yaitu 73,90 tahun. Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

3.4.2.2. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga di suatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebagai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap

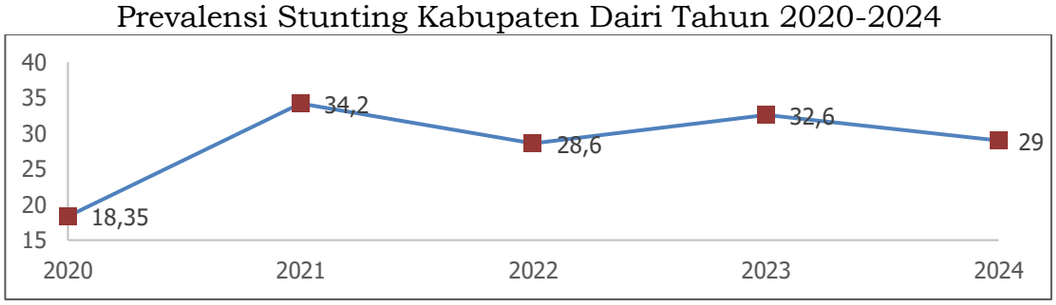
perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

3.4.2.3. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target 14 Persen pada Tahun 2024. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya. Selama periode lima Tahun (2020-2024), di Kabupaten Dairi prevalensi stunting yang cukup signifikan yakni sebanyak 29 persen pada tahun 2024. Salah satu penyebab terjadinya penurunan stunting adalah yakni komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting melalui upaya lintas sektor dan fokus pada desa lokus stunting.

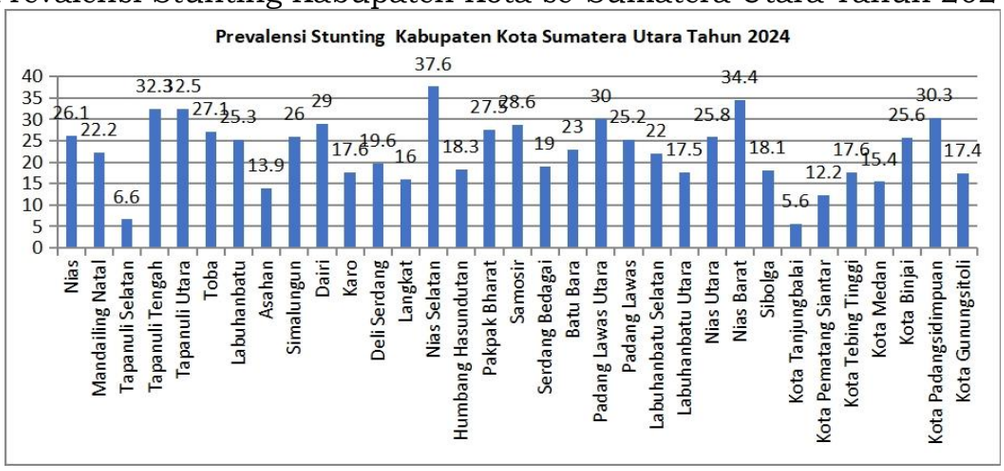
Selain itu, Kemenkes menetapkan Kabupaten Dairi sebagai lokus penanganan stunting.Ada 20 desa lokus stunting yaitu di Puskesmas Sigalingging 5 desa, Puskesmas Sumbul 3 desa, Puskesmas Bakkal Gajah 2 desa, Puskemas Sopobutar 4 desa, Puskesmas Parongil 1 desa, Puskesmas Gunung Sitember 2 desa, Puskesmas Bunturaja 2 desa, dan puskesmas kilometer 11 ada 1 desa. Dengan demikian, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Dairi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.39
Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber: SSGI, 2020-2024

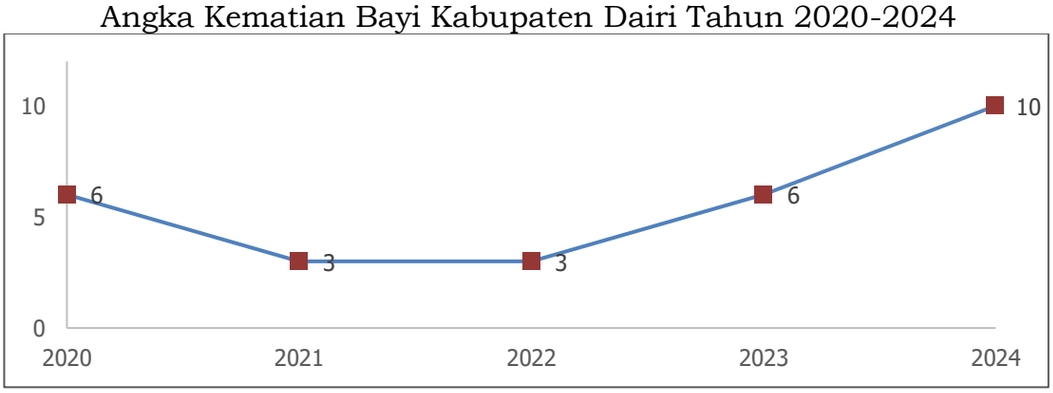
Gambar 3.40
Prevalensi Stunting Kabupaten Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024



3.4.2.4. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.41
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



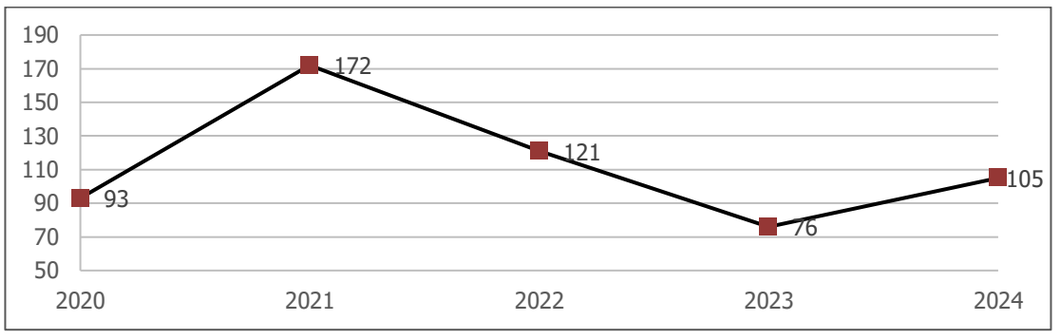
Sumber : LPPD, Kabupaten Dairi

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus, dan meningkat bila dibandingkan dengan pada Tahun 2024 menjadi 10 kasus.

3.4.2.5. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.42
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



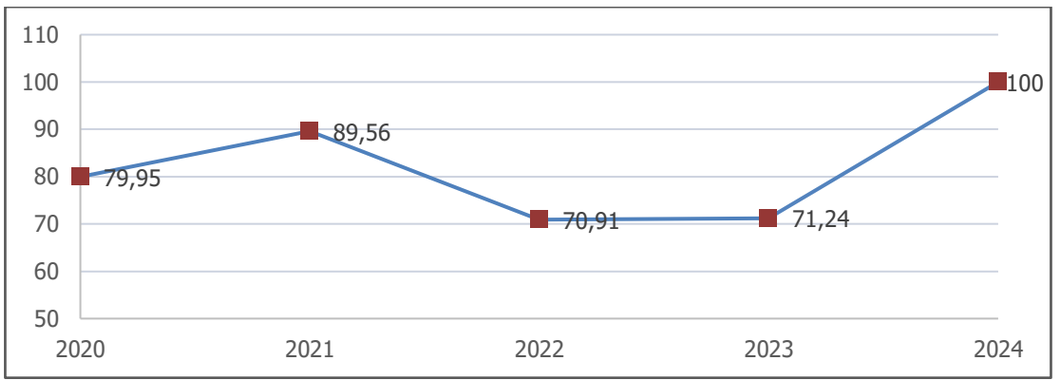
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sangat fluktuatif. AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada Tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2024 sebanyak 105 per 100.000 kelahiran hidup Capaian tersebut kurang baik karena sudah berada diatas target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga, upaya penanganan kasus kematian ibu perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (*Antenatal Care*), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (*Postnatal Care*).

A. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.43
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin
Sesuai Standar Tahun 2020-2024



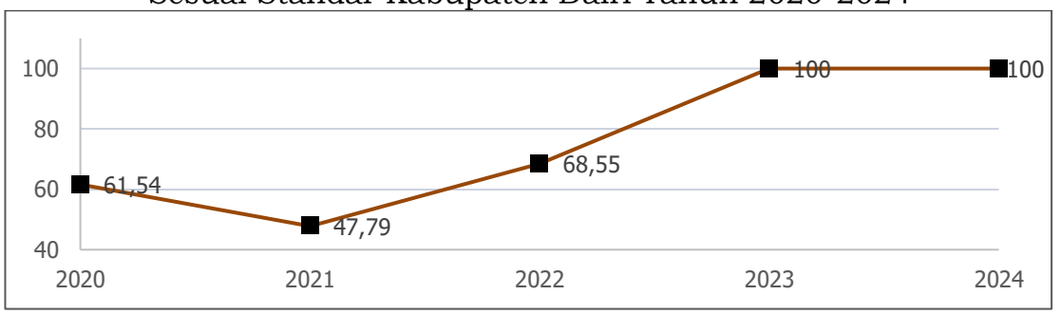
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar sebesar 79,95 persen, meningkat menjadi 89,56 persen pada Tahun 2021 namun pada tahun 2022 menurun menjadi 70,91 dan pada Tahun Tahun 2022 sebesar 100 persen, pada tahun 2023 menjadi 71,24 persen dan pada tahun 2024 menjadi 100 persen. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih meggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan di daerah daerah tersebut.

B. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Jika dilihat dari tabel di bawah terjadi peningkatan Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 61,54 persen, menjadi 100 persen di Tahun2023 dan 2024.

Gambar 3.44
Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

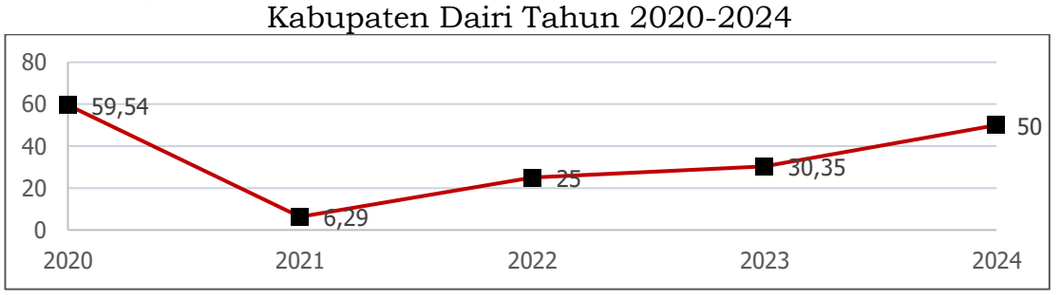


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

C. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.45
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

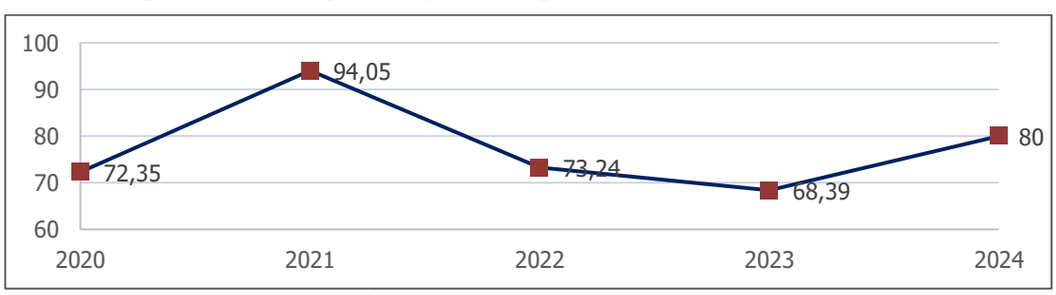


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

D. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.46
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



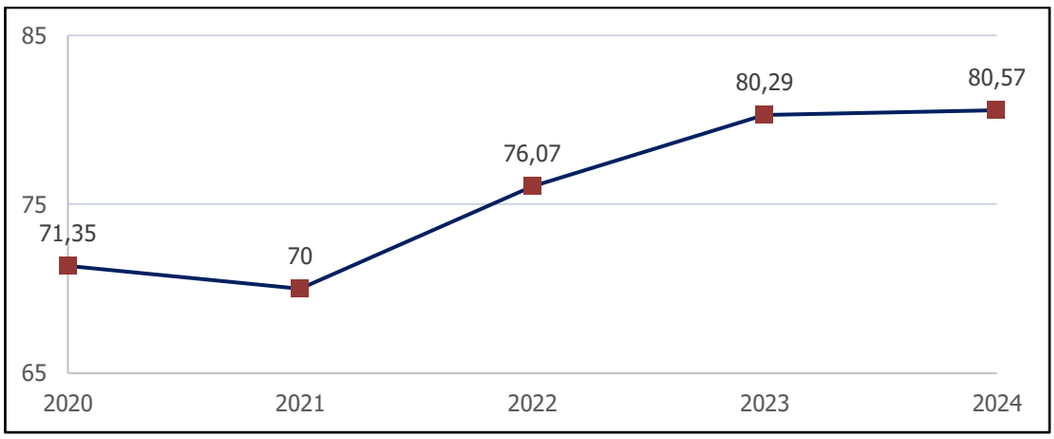
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas Cakupan kunjungan Bayi pada Tahun 2020 sebesar 72,35 persen, sebesar 94,05 persen pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 73,24 persen dan pada Tahun 2023 mencapai angka 68,39 persen dan pada Tahun 2024 adalah 80 persen.

E. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Persentase cakupan pelayanan anak balita sebesar 71,35 persen pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00 persen, pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07 persen, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,29 persen dan juga pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 80,57 persen.

Gambar 3.47
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

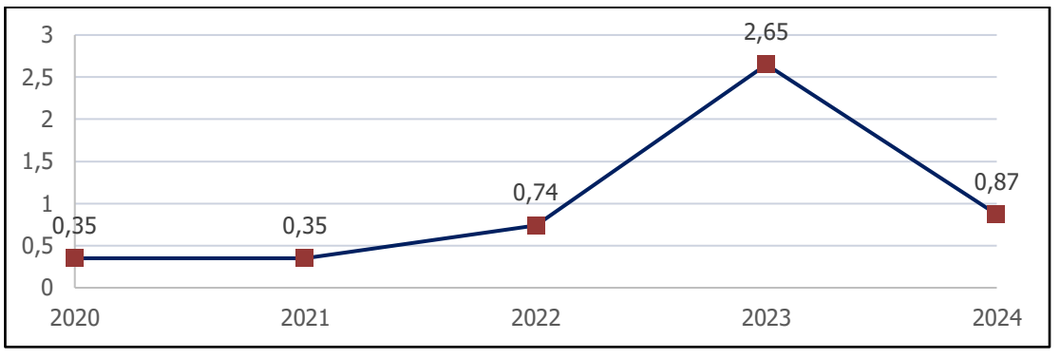


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

F. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal *(golden period)* terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidakcukupan gizi pada masa *golden period* tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut:

Gambar 3.48
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2020-2024 (%)



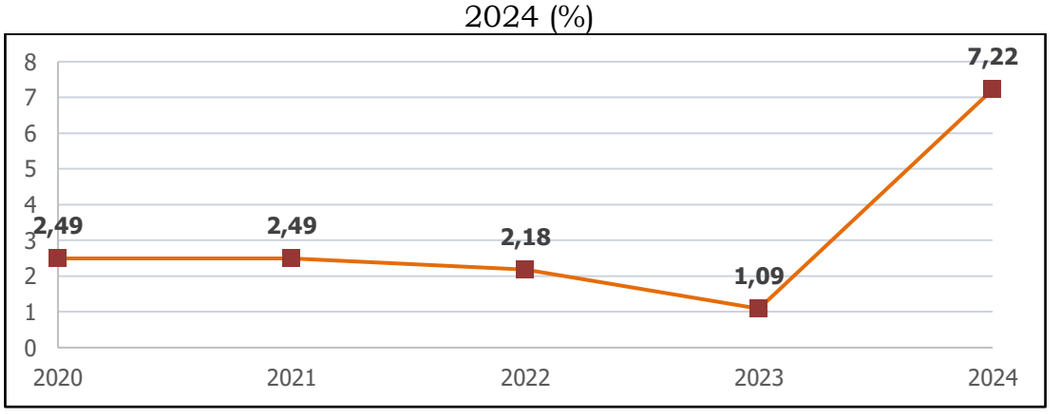
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Dairi fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 0.35 persen, ditahun 2021 sebesar 0,35 persen, kemudian naik menjadi sebesar 0,74 persen, pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 naik menjadi 2,65 persen namun di tahun 2024 turun menjadi 0,87 persen, pada Tahun 2024.

G. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya dikemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.49
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat terlihat perkembangan balita Gizi Kurang di Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 hingga 2024 dalam kondisi yang fluktuatif. Persentase balita gizi kurang sebesar 2,49 persen pada Tahun 2020 dan 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2,18 persen, menurun kembali ditahun 2023 menjadi 1,09 persen, namun pada tahun 2024 melonjak drastis menjadi 7,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan balita gizi kurang belum optimal.

3.4.3. Bidang-Infrastruktur Dasar

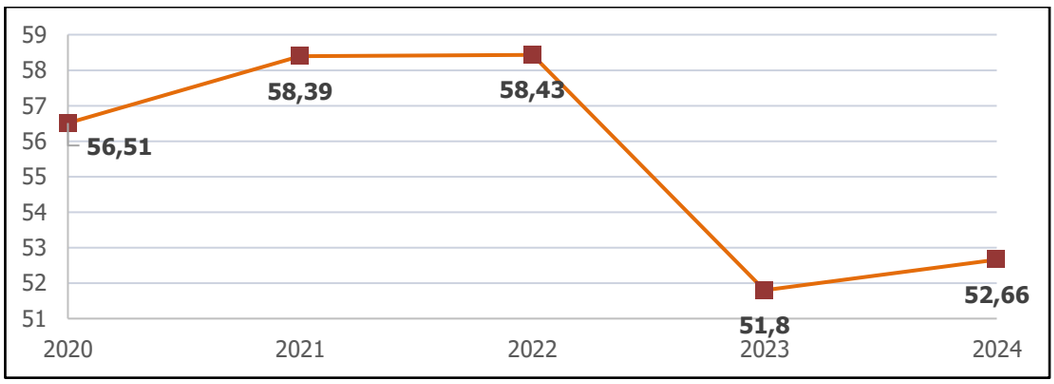
Penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor pembangunan harus didukung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksananaan, serta pengendalian dan evaluasi yang terpadu. Mengingat pembangunan infrastruktur wilayah seringkali membutuhkan anggaran yang cukup besar, maka perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah mencakup peningkatan konektivitas baik kualitas jalan dan jembatan maupun pengelolaan perhubungan; pemenuhan standar cakupan dan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah meliputi: jalan, pengairan, bangunan gedung, air bersih, sanitasi, penataan ruang, dan PSU di kawasan permukiman; meningkatkan layanan angkutan umum penumpang dan barang untuk melayani masyarakat dan dukungan terhadap sektor usaha; serta antisipasi potensi ancaman (rawan) bencana pada beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

3.4.3.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapatdilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

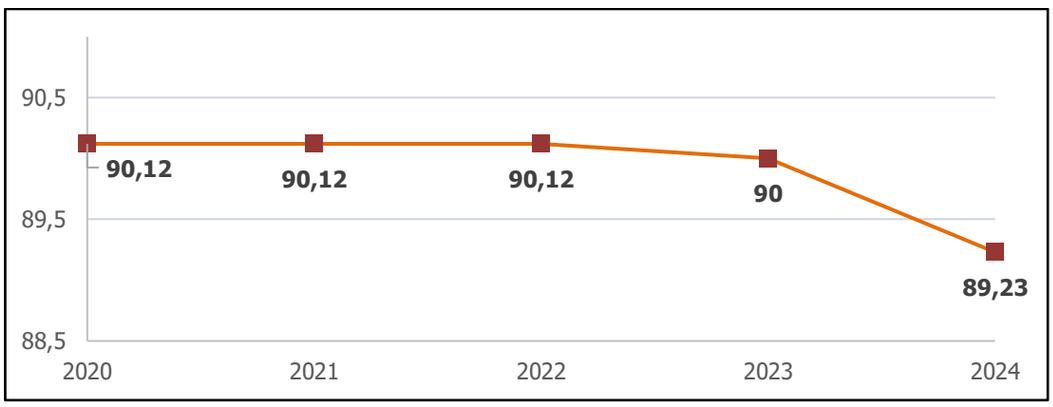
Gambar 3.50
Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa jalan dengan kondisi mantap pada Tahun 2020 sebesar 56,51 persen, pada Tahun 2021 sebesar 58,39 persen dan pada Tahun 2022 menjadi 58,43 persen, jalan kondisi baik pada Tahun 2023 sebesar 51,80 persen, dan pada Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 52,66 persen.

Gambar 3.51
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



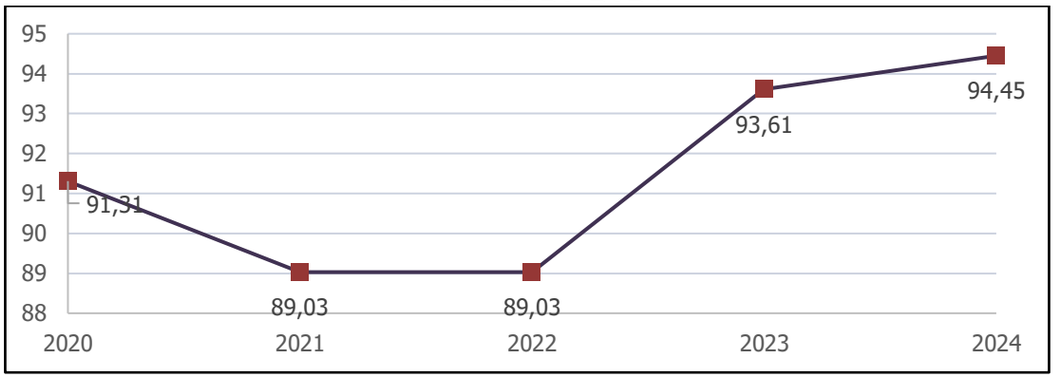
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa persentase jembatan dengan kondisi baik pada Tahun 2020 sebesar 90,12 persen, persentase jembatan dengan kondisi baik pada Kabupaten Dairi pada kurun waktu Tahun 2021-2022 adalah sebesar 90,12 persen. Pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 90 dan 89,23 persen.

3.4.3.2. Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024, menunjukkan adanya peningkatan namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 3.52
Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Luas irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2020 adalah 91,37 persen dengan luasan 10.211 ha. Pada Tahun 2021, persentase irigasi dengan kondisi baik menjadi 89,03 persen dengan luasan 9.949 ha, Tahun 2022 untuk persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 89,41 persen, dengan luasan 9.992 ha dan pada Tahun 2023 persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 93,61 persen dengan luasan sebesar 10.461 ha. Pada Tahun 2024 persentase irigasi dalam kondisi baik adalah 94,45 persen dengan luasan 10.554 ha.

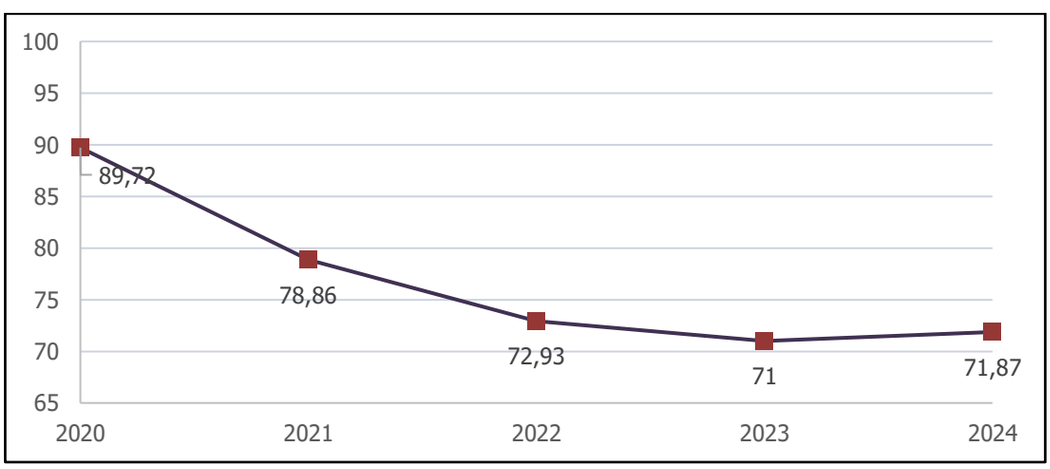
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana yang diharapkan antara lain disebabkan keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi kerusakan bangunan utama dan jaringan irigasi baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana perimbangan dari Pemerintah (DAK/APBN), sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi (OP Irigasi dan rawa), belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tingkat kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi karena sebagian besar bangunan irigasi berada pada punggung perbukitan, dengan kondisi debit aliran yang tidak stabil sehingga terjadinya longsor atau kerusakan kecil tidak dapat tertangani secara menyeluruh.

3.4.3.3. Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Gambar 3.53
Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih
Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

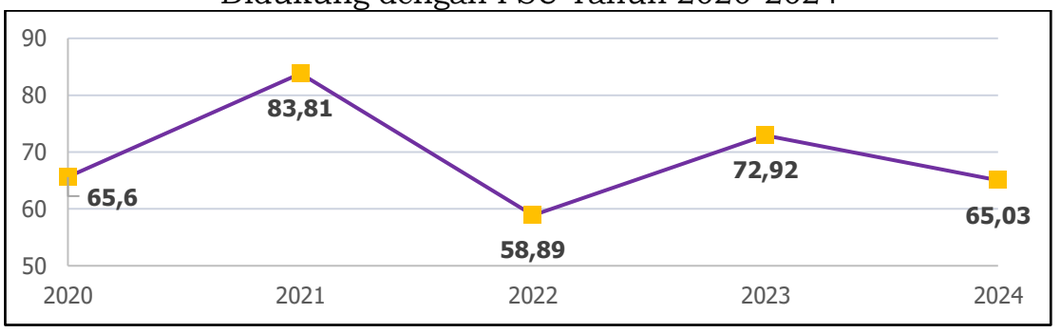
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang stabil, seperti pada Tahun 2022 adalah sebesar 65.273 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 89.495 KK atau sebesar 72,93 persen, pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 66.480 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 93.630 KK atau sebesar 71,00 persen. Pada Tahun 2024 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 68.366 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 95.121 KK atau sebesar 71,87 persen.

3.4.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.54
Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2020-2024



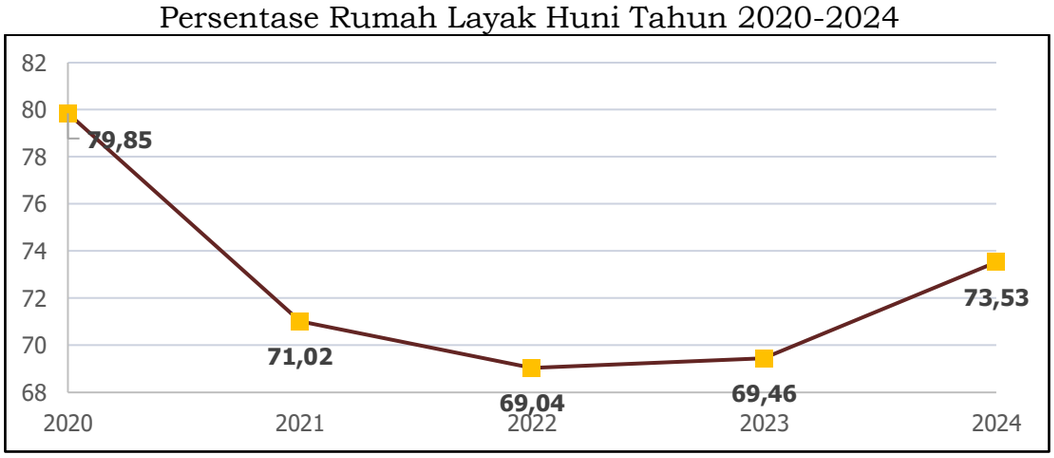
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya pada Tahun 2020 sebesar 65,6 persen, sebesar 83,81persen pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 58,89 persen. Pada Tahun 2023 persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU ditargetkan menjadi sebesar 72,92 persen, sedangkan tahun 2024 adalah sebesar 65,03 persen.

Belum tertanganinya kawasan kumuh secara optimal karena karena minimnya ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan dana untuk pembangunan, oleh karena hal tersebut diwacanakan dilakukan pelimpahan sebagian aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk menjadi kewenangan desa sehingga penanganan PSU dapat lebih optimal dengan didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Persentase Rumah Layak Huni

Gambar 3. 55
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024



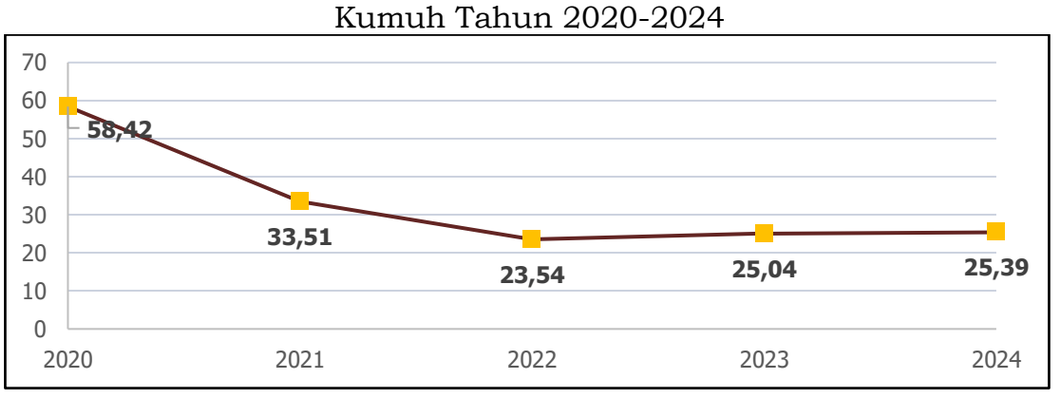
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebesar 79,85 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 71,02 persen dan sebesar 69,04 persen pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,46 persen dan Tahun 2024 menjadi 73,53 persen.

3. Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari gambar di bawah dapat dilihat persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebesar 10,97 persen, sebesar 58,42 persen pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 33,51 persen, Pada Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh menjadi 161,08 ha atau sebesar 23,54 persen dan pada Tahun 2023 maka diperoleh pengurangan kawasan kumuh menjadi 171,37 ha dari total kawasan kumuh 684,41 ha atau sebesar 25,04 persen.

Gambar 3.56
Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3.4.4. Bidang-Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam menentukan produktivitas suatu daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut ini merupakan perkembangan

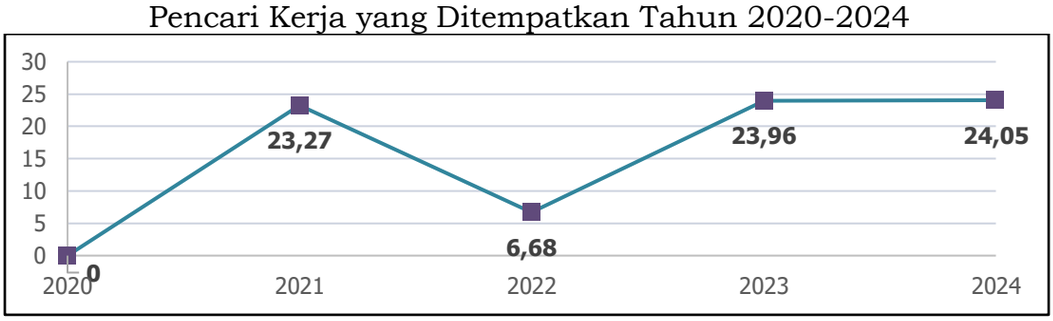
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi.

Jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jenis tenaga kerja dapat dilihat dari sebaran proporsi lapangan pekerjaan utama, serta kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari persentase Angkatan kerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan.

3.4.4.1. Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Dairi, tercatat pada Tahun pada Tahun 2020 69,80 persen, pada Tahun 2021 sebesar 23,27 persen dan pada Tahun 2022 menjadi 6,68 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 23,96 persen. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 24,05 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.57
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

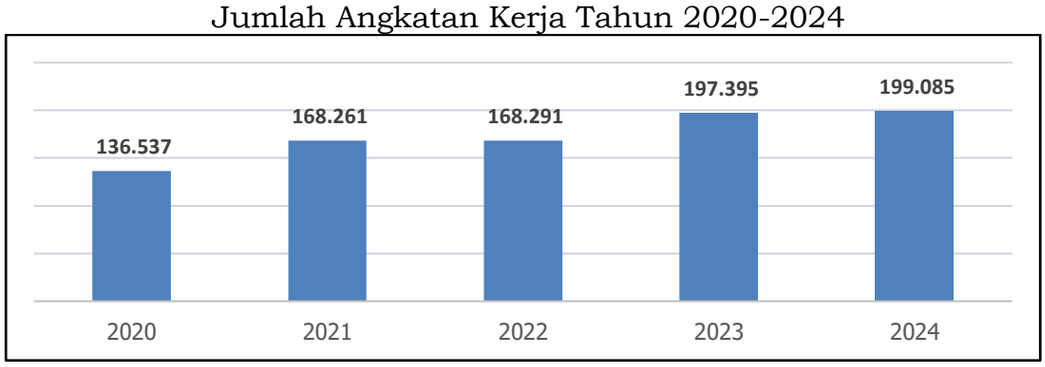


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3.4.4.2. Angkatan Kerja

Besaran Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 136.537 orang, pada Tahun 2021 menjadi 168.261 orang, pada Tahun 2022 menjadi 168.291 orang, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 197.395. Pada Tahun 2024 meningkat Kembali menjadi 199.085 Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

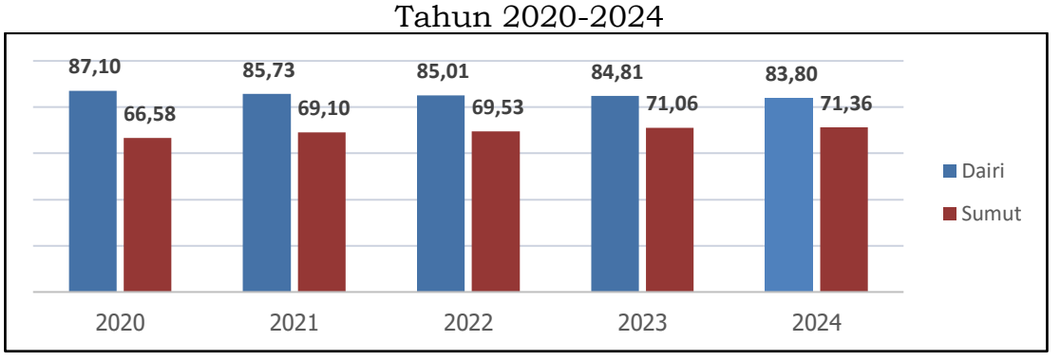
Gambar 3.58
Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

3.4.4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 3.59
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2020-2024

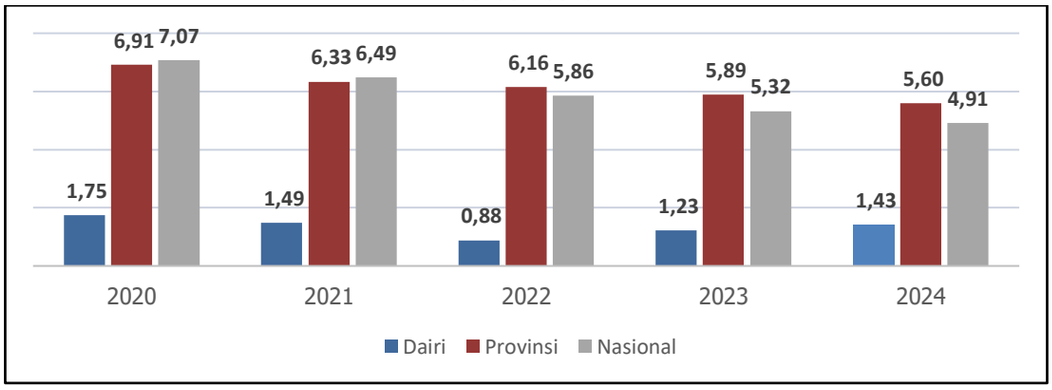


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka, 2025.

Dari gambar di atas dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Tahun 2020 TPAK Kabupaten Dairi sebesar 87,01 persen dan Sumatera Utara sebesar 66,58 persen dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai 85,73 persen sedangkan Sumatera Utara juga mengalami peningkatan menjadi 69,10 persen, pada Tahun 2022 kembali mengalami penurunan ke angka 82,01 persen dan Sumatera Utara di angka 69,53 persen dan pada Tahun 2023 juga mengalami penurunan ke angka 84,81 persen sedangkan Sumatera Utara di angka 71,06 persen, pada Tahun 2024 tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Dairi menurun menjadi 83,80 persen, sedangkan Sumatera Utara di angka 71,36 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dairi secara keseluruhan masih di atas Provinsi Sumatera Utara.

3.4.4.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

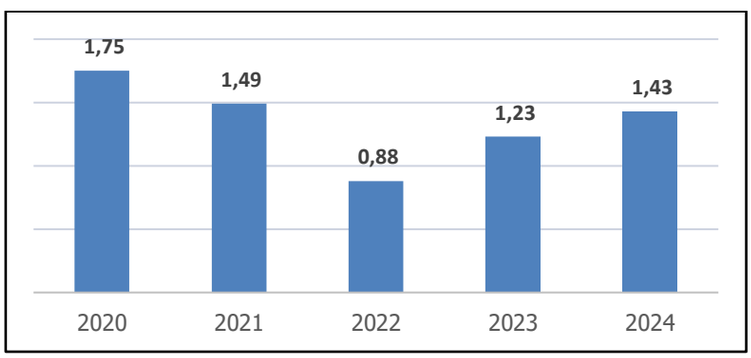
Gambar 3.60
Tingkat Pengangguran Terbuka Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Sumatera Utara dalam Angka 2025

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi sebesar 1,75 persen pada Tahun 2020 sedangkan Sumatera Utara dengan sebesar 6,91 persen. Pada Tahun 2021 Kabupaten Dairi mengalami penurunan menjadi 1,49 persen dan kembali turun dengan signifikan Tahun 2022 menjadi 0,88 persen dan Sumatera Utara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 6,16 persen pada Tahun 2022. Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 meningkat menjadi 1,23 persen sedangkan Provinsi sebesar 5,89 persen. Pada Tahun 2024 TPT di Kabupaten Dairi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,43 persen sedangkan Provinsi Sumatera Utara menurun menjadi 5,60 persen. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Dairi lebih baik dari TPT Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 3.61
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

3.4.5. Isu Kesejahteraaan dalam Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura

3.4.5.1. Pertanian

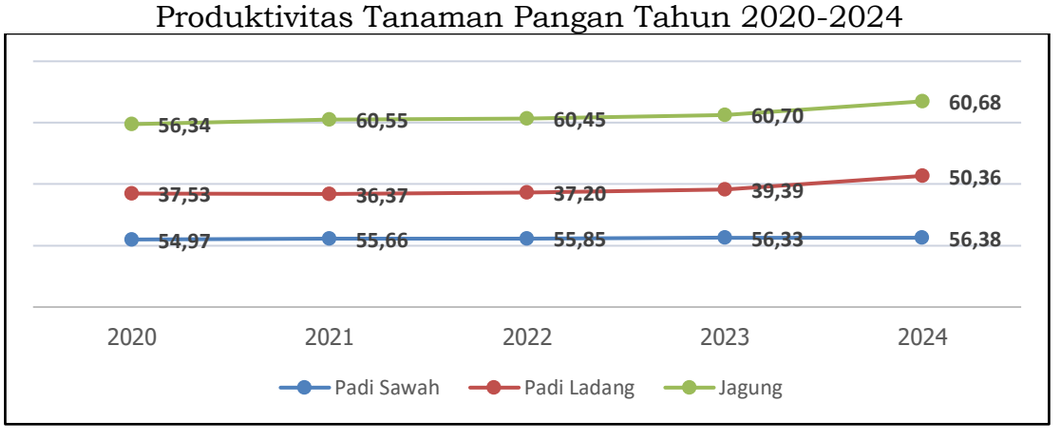
1. Tanaman Pangan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut padi sawah pada Tahun 2020 sebesar 54,97 kw/ha, lalu meningkat pada Tahun 2021 menjadi 55,66 kw/ha dan pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 55,85 kw/ha. Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 56,33 kw/Ha dan Tahun 2024 meningkat sedikit menjadi 56,38 kw/ha.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada Tahun 2020 sebanyak 37,53 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi sedikit menurun ke angka 36,37 kw/ha dan pada Tahun 2022 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan menjadi 37,2 kw/ha, pada Tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 39.39 kw/ha. Pada Tahun 2024 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 50,36 kw/ha.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada Tahun 2020 sebanyak 56,34 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 60,55 kw/ha dan pada Tahun 2022 menurun sedikit menjadi 60,45 kw/ha dan pada Tahun 2023 produktivitas jagung meningkat menjadi 60,7 kw/ha. Demikian juga pada Tahun 2024 terjadi peningkatan produktivitas menjadi 60,68 kw/ha. Peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh upaya intensifikasi yang dilakukan melalui pemberian bibit unggul yang bersertifikat, perbaikian jaringan irigasi dan penyuluhan pengelolaan tanaman terpadu.

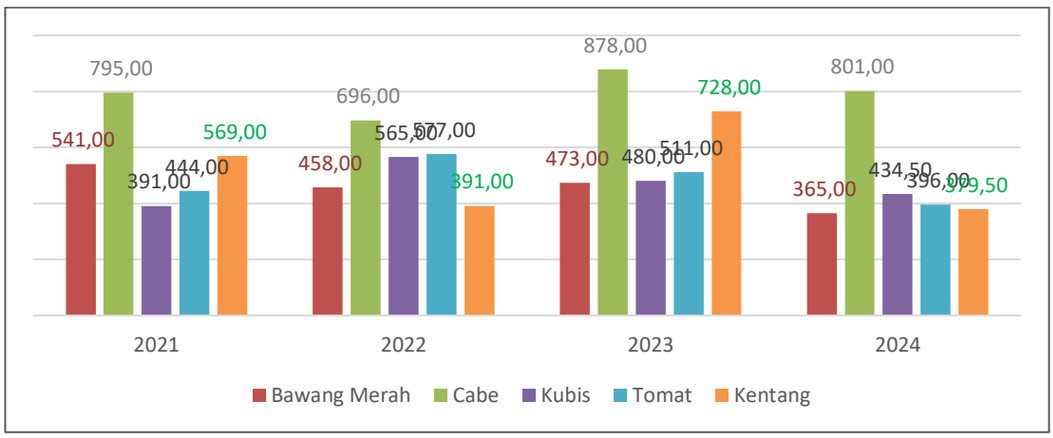
Gambar 3.62
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

2. Hortikultura

Gambar 3.63
Luas Panen Sayur dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman Tahun 2021-2024 (ha)



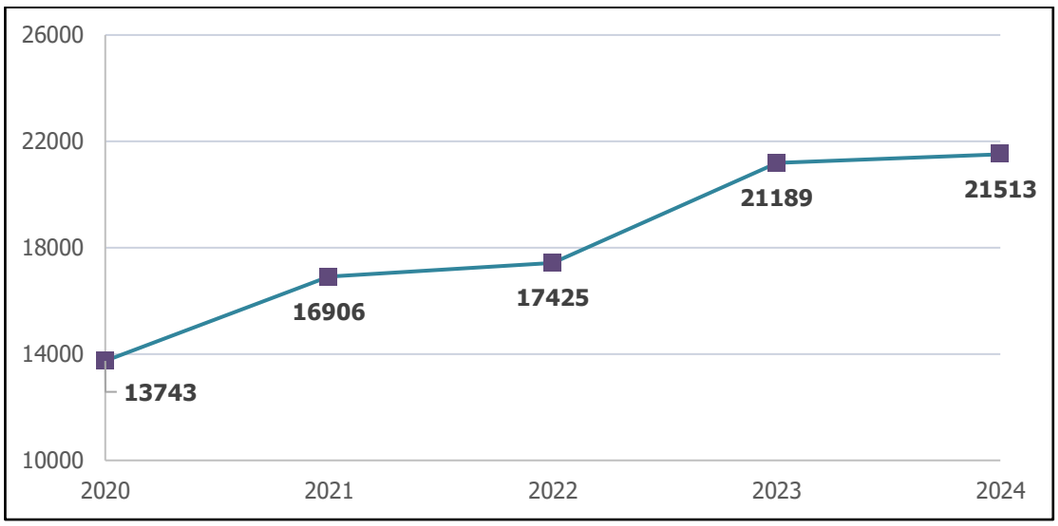
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Luas panen tanaman sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Dairi, pada Tahun 2021 luas panen tanaman bawang merah sejumlah 541 ha, cabe 795 ha, kubis 391 ha, kentang 444 ha, tomat 569 ha. Pada Tahun 2022 produksi bawang merah adalah 458 ha, cabe 696 ha, kubis 565 ha, kentang 391 ha, tomat 577 ha. Pada Tahun 2023 luas panen bawang merah adalah 473 ha, cabe 878 ha, kubis 480 ha, kentang 728 ha, dan tomat sebanyak 511 ha. Pada Tahun 2024 luas panen bawang merah adalah 365 ha, cabe 801 ha, kubis 434,5 ha, kentang 379,5 ha, dan tomat sebanyak 396 ha. Luas Panen komoditas hortikultura di Kabupaten Dairi menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan pola tanam hortikultura yang belum teratur. Penanaman hortikultura hanya sesuai dengan keinginan petani, belum berorientasi pasar. Untuk itu diperlukan kelembangaan yang baik ditingkat petani.

3. Tanaman Perkebunan Kopi

Produksi tanaman perkebunan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pertanian di sub-sektor perkebunan. Kabupaten Dairi memiliki produksi tanaman perkebunan yang sangat besar terutama untuk komoditas tanaman perkebunan kopi. Kabupaten Dairi juga terkenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi terbesar ke-5 di Indonesia. Berikut adalah data mengenai Produksi Perkebunan Kopi di Kabupaten Dairi.

Gambar 3.64
Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi Tahun 2020-2024 (ton)



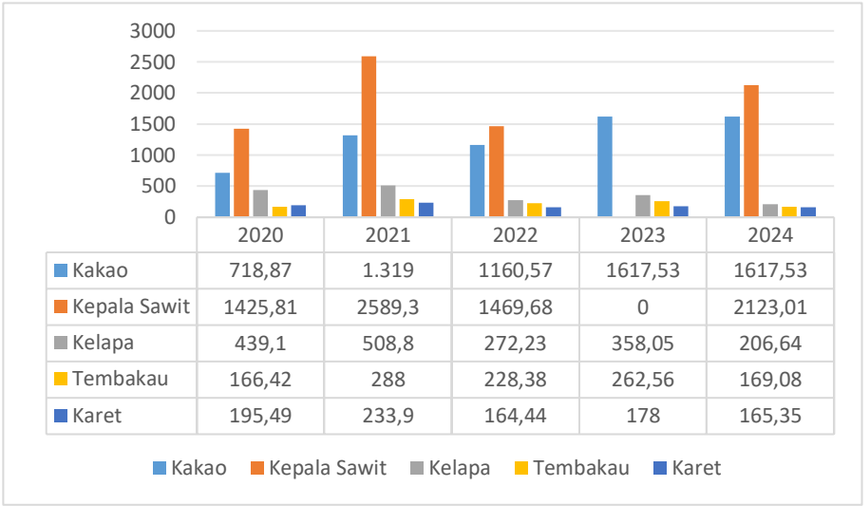
Sumber : : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat peningkatan produksi perkebunan kopi di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2020 produksi kopi di Dairi sebesar 13.743 ton kemudian pada Tahun 2021 meningkat menjadi 16.906 ton, pada Tahun 2022 produksi kopi sebesar 17.425 ton, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 21.189 ton. Kemudian Tahun 2024 produksi kopi Kabupaten Dairi kembali mengalami peningkatan menjadi 21.513 ton yang terdiri dari kopi arabika sebesar 18.975,1 ton dan kopi robusta sebesar 2.537,5 ton.

Peningkatan tersebut diakibatkan oleh program pemerintah Kabupaten Dairi untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang dengan penanaman kopi 1 juta batang. Kemudian peningkatan harga biji kopi semenjak lima tahun yang lalu, sehingga meningkatkan minat petani bertanam kopi.

Disamping tanaman kopi terdapat beberapa tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Dairi. Berikut ini data produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 3.65 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



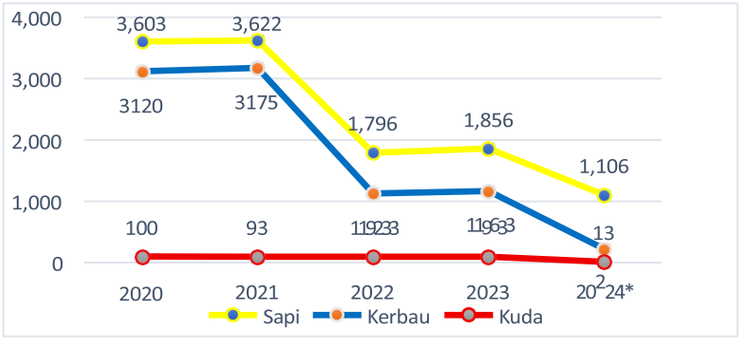
	2020	2021	2022	2023	2024
Kakao	718,87	1.319	1160,57	1617,53	1617,53
Kepala Sawit	1425,81	2589,3	1469,68	0	2123,01
Kelapa	439,1	508,8	272,23	358,05	206,64
Tembakau	166,42	288	228,38	262,56	169,08
Karet	195,49	233,9	164,44	178	165,35

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

4. Peternakan

Kabupaten Dairi juga memiliki populasi ternak yang besar. Indikator populasi ternak umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian sub-sektor peternakan. Pada gambar di bawah ini dijelaskan tentang perkembangan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.

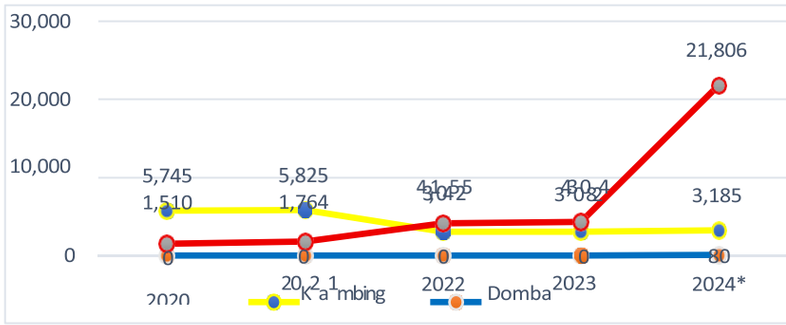
Gambar 3.66 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak besar di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia pada umumnya.

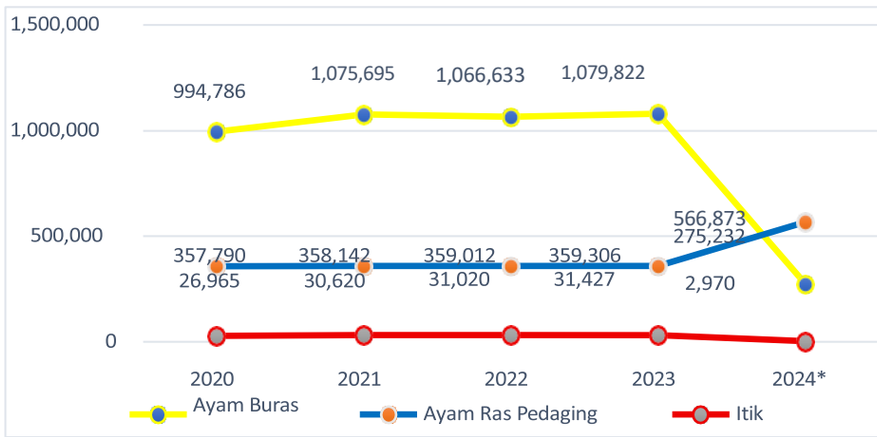
Gambar 3.67 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 perkembangannya cukup stabil. Pada Tahun 2024 populasi ternak babi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan timbulnya minat petani untuk beternak babi karena pandemi serangan penyakit *African Swine Fever (ASF)* pada babi sudah berkurang.

Gambar 3.68 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak unggas di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup besar. Populasi ayam buras Tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis.

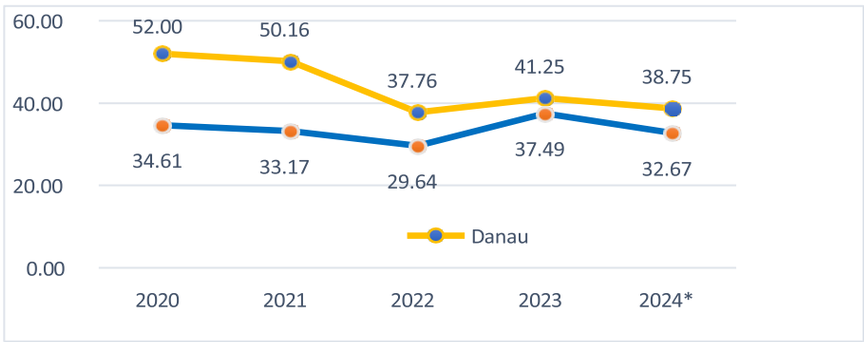
3.4.5.2. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Dairi ini didominasi oleh hasil perikanan air tawar, antara lain ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan air tawar lainnya.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Produksi Perikanan Tangkap dari Danau dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunun yang cukup signifikan dari 52 ton/tahun menjadi 38,75 ton/tahun. Sumber perikanan tangkap danau adalah dari Danau Toba di Kecamatan Silahisabungan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya daya dukung Danau Toba dan adanya ikan predator yang berkembang dengan pesat, sehingga mengurangi populasi ikan mas dan ikan mujahir di Danau Toba. Untuk perikanan tangkap dari sungai cenderung menurun dengan landai. Hal ini juga disebabkan menurunnya daya dukung sungai akibat pencemaran lingkungan.

Gambar 3.69 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020– 2024



Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

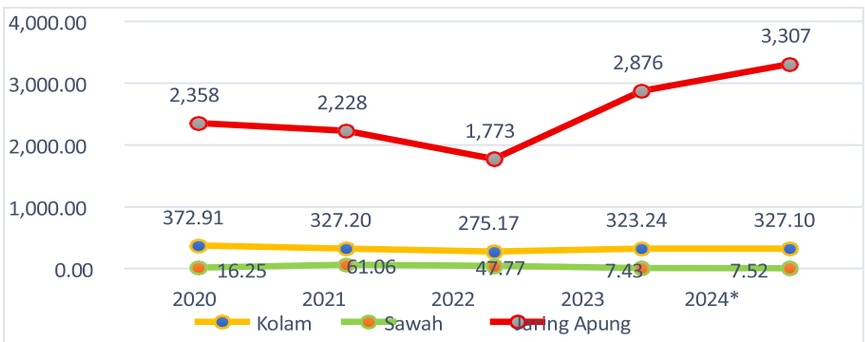
2. Produksi Perikanan Budidaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut, perikanan budidaya dari keramba jaring apung pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat untuk membersihkan keramba jaring apung dari Danau Toba, termasuk perairan Silahisabungan. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 produksi kembali meningkat karena penataan/zonasi keramba jaring apung sudah dilakukan, sehingga petani bisa kembali membudidayakan ikan pada keramba jaring apung dengan penataan dan pada zonasi tertentu yang diijinkan. Untuk produksi perikanan

budidaya dari kolam dan sawah cenderung stabil walaupun ada turun dan naik setiap tahunnya.

Saat ini telah dikembangkan perikanan budidaya dengan menggunakan kolam terpal dan sistem *bioflok*. Sistem ini nantinya secara bertahap akan menggantikan perikanan budidaya keramba jaring apung.

Gambar 3. 70 Produksi Perikanan Budidaya Tahun (Ton) 2020–2024



Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

3.5. Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan 1 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pemerintah pada awal Tahun 2020. Tanggal 4 Maret tahun 2020, Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas telah memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem secara Nasional menjadi 0% di akhir RPJMN tahun 2024, sedangkan berdasarkan rilis BPS, kemiskinan ekstrem Nasional pada tahun 2024 adalah 0,83 persen.

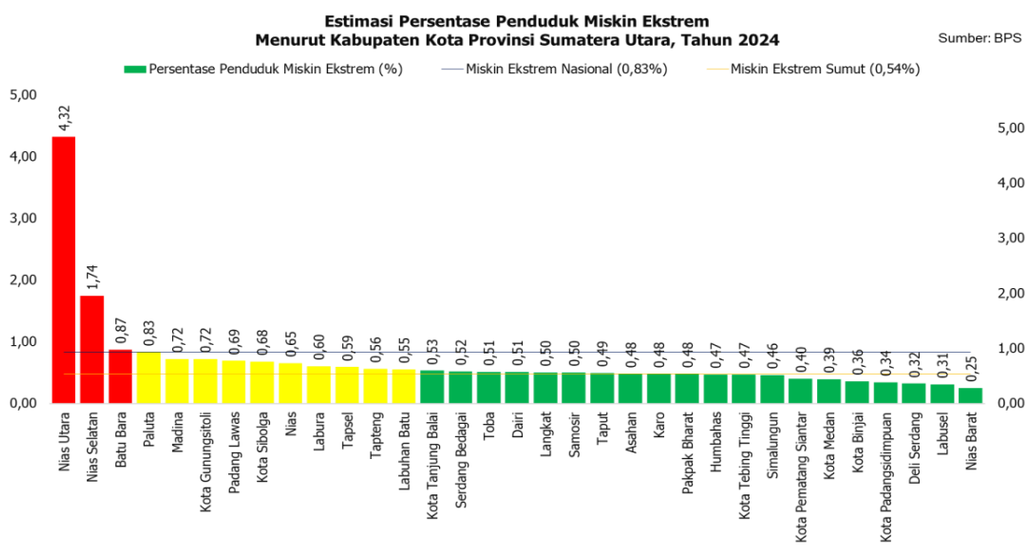
Kemiskinan ekstrem didefenisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP, sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar World Bank, berdasarkan hitungan BPS persentase penduduk miskin ekstrem Nasional tahun 2024 adalah 0,83%, BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk di konversikan ke dalam rupiah, pada tahun 2024, harga 1,9 USD PPP adalah Rp. 11.924,13 perkapita perhari, jika dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah Rp.

362.962,14/kapita/bulan dan berlaku secara Nasional. Sedangkan untuk tahun 2025, garis kemiskinan ekstrem akan meningkat dari 1,9 USD PPP menjadi 2,15 USD PPP.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Lebih jauh, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan Misi ke- 6 RPJMN 2025–2029, yaitu "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan". Relevansi ini diperkuat oleh keterkaitan dengan program prioritas nasional seperti "Pemberantasan Kemiskinan", "Pelayanan Kesehatan untuk Semua", serta "Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau". Dengan pendekatan lintas sektor yang bersifat holistik, integratif, dan berbasis keadilan sosial, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Dairi dapat menikmati manfaat pembangunan secara proporsional. Kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini, menjadi indikator utama.

Gambar 3.71 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2024



3.6. Kondisi Masyarakat Rentan Miskin

Masyarakat Rentan Miskin adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan

sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Klasifikasi rentan miskin juga termasuk mereka juga berasal dari rumah tangga dengan kepala keluarga yang sudah pensiun atau lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan berpenyakit kronis. Saat ini kelompok rentan miskin ini cukup banyak dan didominasi mereka yang usianya antara 18 hingga 35 tahun.

Mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan status kesejahteraan (Desil 1) Tahun 2025 sebesar 8545 Keluarga dan 34.993 Individu (aplikasi pemberdayaan inpres, go.id) Oktober2025 yang Tersebar di 15 Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kabupaten Dairi

No	Kecamatan	**Jumlah Keluarga Desil I**	**%**	**Jumlah Individu Desil 1**	**%**
1	Gunung Stember	374	10,5	1471	12,9
2	Tanah Pinem	889	11,4	336	13,7
3	Siempat Nempu Hilir	597	15,9	2.607	20,4
4	Silima Pungga-pungga	519	10,4	2.189	13,7
5	Siempat Nempu	660	10,4	2.645	12,2
6	Siempat Nempu Hulu	423	6,5	1.638	7,45
7	Tiga Lingga	623	7,48	2.434	9,45
8	Pegagan Hilir	815	15,1	3.537	18,9
9	Lae Parira	357	7,21	1.454	8,98
10	Sumbul	1.512	10,5	6.482	13
11	Berampu	300	11,2	1.231	12,5
12	Sidikalang	530	3,14	1.867	3,21
13	Sitinjo	203	4,47	872	5,27
14	Parbuluan	590	7,75	2.632	9,15
15	Silahisabungan	143	7,75	568	9,09
	Dairi	**8535**	**85,5**	**34,993**	

Dari tabel di atas jumlah Individu Miskin Desil 1 terbanyak berada di Kecamatan Sumbul yaitu sebanyak 6482 jiwa dan apabila dilihat dari Persentase Individu terbanyak berada di Kecamatan Siempat Nempu Hilir yaitu sebesar 20,36 %.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM

4.1. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Dairi

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Dairi disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut :

- ❖ RPJMN
- ❖ RPJMD Prov. SU
- ❖ RPJPD Kabupaten Dairi
- ❖ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029 merupakan wujud Dairi yang ingin dicapai dan diharapkan mampu menjawab pemasalahan strategis masyarakat yang berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Visi Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Kabupaten Dairi memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi

dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan;

3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa;
5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Keterkaitan Rumusan Misi terhadap ketercapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Keterkaitan Rumusan Misi terhadap Visi Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kabupaten Dairi 2025-2029

Unsur Visi	Misi
Sejahtera	Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdaya Saing	Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.
	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.
	Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Merata	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.
Berkeadilan	Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
Berkelanjutan	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan visi “Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera, Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, dan mendukung Program Prioritas Nasional maka pencapaian utama Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi dari 4,97 pada Tahun 2024 menjadi 6,25 persen pada Tahun 2029;
2. Peningkatan PDRB Per Kapita dari 38,39 Juta Rupiah pada Tahun 2024 menjadi 58 Juta Rupiah pada Tahun 2029;
3. Peningkatan kontribusi PDRB Kabupaten Dairi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara 1,11 persen di Tahun 2024 menjadi 1,12 persen pada Tahun 2029;
4. Penurunan tingkat Kemiskinan dari 7,10 persen pada Tahun 2024 menjadi 6,85 persen pada Tahun 2029;
5. Rasio Gini ditargetkan pada 0,221 poin pada Tahun 2025 menjadi 0,213 pada Tahun 2029;
6. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 sebesar 75,88 poin meningkat menjadi 79,45 poin pada Tahun 2029;
7. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang ditargetkan sebesar 133.286 Ton Eq2 pada Tahun 2025 menjadi 228.363 pada Tahun 2029;
8. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang ditargetkan sebesar 78,07 di tahun 2025 menjadi 78,75 pada tahun 2029;
9. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 1,43 persen pada Tahun 2024 menjadi 1,18 persen pada Tahun 2029.

4.2. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisi langkah/upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan disusun untuk memberikan panduan bagaimana

tujuan dan sasaran dicapai dalam suatu fokus/tema dan prioritas pembangunan yang berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2024-2029 yang disusun dengan memperkuat implementasi *Money Follows Program Priority* dengan strategi :

1. **Penentuan Program-Terbaik Cepat** dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2
PHTC RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 PHTC	Catatan
1.	Program Pembangunan Infrastruktur Dasar (**Dairi Tangguh**)	Program penuntasan jalan tanpa genangan melalui gotong royong	
2.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan(**Dairi Sehat**)	*Universal Health Coverage* (UHC)	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan (**Dairi Cerdas**)	Pengentasan anak peserta didik rendah literasi	
4.	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan **(Dairi Cerdas)**	Program penuntasan anak putus sekolah	
5.	Program Hilirisasi Produksi Pertanian **(Dairi Tani Sejahtera)**	Program swasembada pangan	

Tabel 4.3
Persandingan Prioritas Cepat Kabupaten Dairi dengan Prioritas Provinsi (PP) Sumatera Utara

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 PHTC	RPJMD Program Daerah	Catatan Penyelarasan
1.	Program Unggulan Bersekolah Gratis	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan **(Dairi Cerdas)**	
2.	Program Berobat Gratis	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan **(Dairi Sehat)**	
3.	Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan	Program Hilirisasi Produksi Pertanian **(Dairi Tani Sejahtera)**	
4.	Digitalisasi Pelayanan Publik “CERDAS”	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan **(Dairi Cerdas)**	
5.	Infrastruktur Strategis Terintegrasi	Program Pembangunan Infrastruktur Dasar **(Dairi Tangguh)**	
6.	Perlindungan Rakyat melalui Restrorative Justice	Program Layanan Sosial **(Dairi Peduli)**	

Tabel 4.4
Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Program Daerah	Catatan Penyelarasan
1	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal. Bentuk Intervensi: a) Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan b) Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” c) Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya d) Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan	a) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaaan bagi peserta didik berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi; b) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; c) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar; d) Peningkatan kualitas pendidikan Guru dan tenaga kependidikan	

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 Program Daerah	Catatan Penyelarasan
	Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri		
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi Bentuk Intervensi: a) Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda b) Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga c) Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif	a) Pemberdayaan para penyandang difabel; b) Peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bidang Pariwisata; c) Pengembangan kapasitas generasi muda di bidang seni, olahraga dan ekonomi kreatif lainnya	

4.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis yang muncul dari setiap bidang Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber.

KLHS RPJMD Kabupaten Dairi mengidentifikasi enam isu strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi, yaitu:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana.
4. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance).*
6. Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Daerah.

Isu-isu strategis tersebut telah diintegrasikan secara langsung ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029.

Sebagai contoh, visi RPJMD yaitu "**Sejahtera, Berdaya Saing, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan**" mencerminkan komitmen untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan keberlanjutan antar generasi.

4.4. Analisis Akar Masalah (Determinan) Kemiskinan

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada setiap bidang selanjutnya akan dijadikan prioritas kebijakan. Analisis akar masalah merupakan analisis lebih mendalam setelah menggambarkan kondisi umum kemiskinan daerah atau disebut juga sebagai determinan kemiskinan. Untuk itu sebelum melakukan intervensi perlu mencari tahu akar masalah dari setiap permasalahan pada setiap bidang tersebut. Analisis akar masalah pada setiap prioritas bidang intervensi adalah sebagai berikut :

4.4.1. BIDANG PENDIDIKAN

1. APM SD Sederajat

   Permasalahan Angka Partisipasi Murni SD/MI Sederajat pada bidang pendidikan masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang tidak atau belum sekolah.

2. APM SMP Sederajat

   Permasalahan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Sederajat pada bidang pendidikan masih terdapat anak usia 13-15 tahun yang tidak atau belum sekolah.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

4. Harapan Lama Sekolah

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi adalah dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta pemerataan akses pendidikan. Adapun beberapa Program yang disiapkan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Pendidikan,** program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan.

2. **Program Pengembangan Kurikulum,** program ini diarahkan pada implementasi kurikulum nasional pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan kurikulum muatan lokal, yang berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri di masing- masing wilayah.
3. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,** program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan.
4. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan,** program ini diarahkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk lembaga pendidikan formal Di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pelaksanaan urusan pendidikan bertujuan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan serta meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah di Dairi. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Program Bidang Pendidikan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru Persentase guru yang memiliki mertifikat pendidik
Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidika yang diterbitkan/diperbarui

4.4.2. BIDANG KESEHATAN

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,** program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan, penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan kabupaten, peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan dukungan puskesmas dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus mata, serta peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Sidikalang.
2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,** program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
3. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,** program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,** program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

Pelaksanaan urusan kesehatan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Program Bidang Kesehatan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (Persentase ibu hamil dan balita berkunjung ke Posyandu dan yankes lainnya)

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya status gizi Ibu dan Bayi
2. Menurunnya angka Kesakitan di Kabupaten Dairi
3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup
4. Berkurangnya jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis (Rumah Tidak Layak Huni)
5. Menurunnya Daerah Rawan Pangan dan Gizi
6. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Bersih

4.4.3 BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pelaksanaan urusan sosial ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Tersedianya data fakir miskin
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

4. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
5. Pencegahan dan perlindungan korban bencana
6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Sosial,** program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), Program Rehabilitasi Sosial, program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.
2. **Program Penanganan Bencana,** program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Program Bidang Sosial

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial
		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial Yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencan kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar.
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
		Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar.
		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi
Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

4.4.4 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA yang menjadi kewenangan Kabupaten, penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA, pengelolaan hidrologi dan kualitas air, peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS), koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA, serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.

2. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

3. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

   program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.

4. **Program Penataan Bangunan Gedung**

   Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis Kabupaten, dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

5. **Program Penyelenggaraan Jalan**

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten meliputi peningkatan jalan mantap pada kabupaten/kota, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana, pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir, penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

6. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi, serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

7. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

   Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

8. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

   Pogram ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.

9. **Program Pengembangan Permukiman**

   Program ini diarahkan pada pada rencana struktur ruang dibandingkan dengan arahan pembangunan makro yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan.

10. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**

    Program ini diarahkan pada bangunan dan lingkungan sebagai kelanjutan dari penyusunan rencana tata bangunan dan

lingkungan (RTBL) melalui analisis kawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan konsep perancangan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditujukan untuk pelaksanaan kinerja :

1. Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
2. Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang;
3. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
5. Meningkatnya penyediaan Infrastruktur layanan dasar;
6. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
7. Meningkatnya konektivitas wilayah; dan
8. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal.

Tujuan dari urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya perlindungan	Persentase peningkatan perlindungan kawasan
	Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	permukiman rawan banjir Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi persentase luas layanan irigasi multi komoditas
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air Minum layak minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kecamatan dan desa
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
		domestik layak dan aman)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik
Pengembangan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik
Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan
Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan
Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten

4.4.5. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Perumahan**

   Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah Kabupaten.

2. **Perumahan Kawasan dan Permukiman Kumuh**

   Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

3. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU),**

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan

prasarana sarana utilitas umum perumahan.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), program ini diarahkan pada peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) bidang perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota.

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat serta untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
		Renovasi rumah layak huni bagi keluarga miskin
Perumahan Kawasan dan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh luasan kurang dari 10 ha yang ditangani
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

4.4.6. BIDANG TENAGA KERJA

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

   Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan *housekeeping*, *tour guide*,

waiters, *barista*, pelatihan *SSW* (*Specified Skilled Worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

2. **Program Penempatan Tenaga Kerja**

   Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online dengan aplikasi SiLaPeR, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota berupa peningkatan parana dan prasarana balai latihan kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha & dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri.

3. **Program Hubungan Industrial**

   Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum kabupaten (UMP) berbasis sejahtera, upah minimum sektoral kabupaten (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Pelaksanaan urusan tenaga kerja ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindung hak-haknya

dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 4.10
Indikator Kinerja Program Bidang Tenaga Kerja

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya
Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Hubungan Industrial	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial

4.4.7. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

   Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten.

2. **Program Perlindungan Perempuan**

   program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan hidup anak.

3. **Program Perlindungan Khusus Anak**

   program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

4. **Program Peningkatan kualitas keluarga**

program ini diarahkan pada motivasi setiap keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal sehingga dapat hidup tenteram, mandiri, produktif dan bahagia serta dapat menghasilkan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas unggul.

5. **Program Pemenuhan Hak Anak**
   program ini diarahkan pada rencana pembelajaran yang memperhatikan hak anak–anak dan materi ajar harus disesuaikan dengan kondisi anak serta lingkungan pembelajaran anak.

6. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**
   program ini diarahkan pada dorongan keterbukaan, tranparansi dan kualitas data gender dan anak dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
3. Meningkatkan indeks pembangunan keluarga;
4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana

dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 4.11
Indikator Kinerja Program Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif
Peningkatan Kualitas	Meningkatnya kualitas keluarga dalam	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Keluarga	mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak serta persentase keluarga berkualitas (tenteram, mandiri dan bahagia)	berperspektif gender dan hak anak sesuai standar Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan
Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

4.4.8. BIDANG PANGAN

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

   Program diversifikasi dan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan pertanian yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim maupun dinamika pasar. Diversifikasi pangan diarahkan pada pengembangan berbagai sumber karbohidrat, protein, dan gizi lainnya selain beras guna memperluas pilihan konsumsi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas. Program ini juga memperhatikan aspek distribusi dan cadangan pangan strategis agar stok tetap terjaga dan harga tetap stabil. Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, stimulan sarana produksi untuk pemanfaatan pekarangan,

rehabilitasi *Rice Milling Unit*/RMU dan gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

2. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**

   Program Penanganan Kerawanan Pangan merupakan elemen krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan ketahanan pangan yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang rawan terhadap krisis pangan akibat bencana alam, kemiskinan ekstrem, keterbatasan akses infrastruktur, maupun dampak perubahan iklim. Pemerintah secara proaktif melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah rawan pangan melalui pendekatan berbasis data spasial, indikator sosial ekonomi, serta pengawasan terhadap fluktuasi pasokan dan harga pangan.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan intervensi yang bersifat cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Program ini diarahkan pada pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha-usaha produktif yang menyasar masyarakat miskin dan rentan di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan kelompok tani perempuan dan pemuda, dukungan permodalan, penguatan kelembagaan pangan desa, hingga pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi pangan mandiri. Selain itu, pembangunan lumbung pangan masyarakat, pelatihan pengolahan hasil pertanian, serta integrasi dengan program perlindungan sosial turut diperkuat sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Program ini diharapkan mampu menekan tingkat kerawanan pangan, memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal, dan membangun pondasi ekonomi desa yang tangguh terhadap berbagai krisis, efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat ekosistem pangan dari sisi produksi hingga distribusi, program ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan, menekan kerugian pasca panen, serta mempercepat terwujudnya desa-desa mandiri pangan yang tangguh terhadap krisis dan fluktuasi pasar.

Pelaksanaan urusan pangan ditujukan untuk :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas dan terjaminnya keamanan dan mutu pangan.
3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.
4. Terwujudnya konektivitas antar kota dan wilayah sekitarnya.

Adapun kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 4.12
Indikator Kinerja Program Bidang Pangan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan

4.4.9. BIDANG PERTANIAN

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**
   Program ini oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai database petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas wirausaha pertanian. Program ini juga dilaksanakan untuk kesehatan hewan, diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.
2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
   Program ini oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi,

jalan usaha tani, embung pertanian dan infrastruktur pertanian lainnya.

3. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak.

4. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

   Program ini, yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi pertanian, khususnya di sektor peternakan dan perkebunan. Fokus utama program meliputi penyediaan prasarana yang mendukung produksi ternak berkualitas, seperti fasilitas penyediaan pakan yang memenuhi standar Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB), serta penyediaan sarana yang mendukung *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dalam produksi pertanian dan peternakan.

5. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

   Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas dalam penanggulangan bencana yang berdampak pada sektor pertanian, dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis pada mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan. Fokus utama program meliputi pengembangan dan penerapan metode penanggulangan bencana pertanian yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data, seperti sistem peringatan dini, pemetaan kerawanan bencana, dan teknologi pertanian yang dapat mengurangi dampak bencana. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan kepada petani dan *stakeholders* terkait

mengenai cara-cara mitigasi risiko, pengelolaan pasca bencana, serta pemulihan tanaman yang terdampak. Dengan mengintegrasikan teknologi dan sistem informasi dalam penanggulangan bencana, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta mempercepat pemulihan produksi pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

6. **Program Penyuluhan Pertanian**

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian dalam rangka memperkuat peran strategis mereka sebagai jembatan antara inovasi teknologi pertanian dan para petani di lapangan. Fokus utama program mencakup peningkatan kompetensi penyuluh melalui pelatihan teknis, pendampingan, sertifikasi profesi, serta penguasaan teknologi digital dan metode penyuluhan modern. Selain itu, program ini juga menekankan pada penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai bagi para penyuluh agar dapat menjalankan tugas secara optimal, termasuk akses terhadap informasi, data pertanian, dan alat bantu edukasi. Melalui penyuluhan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pertanian, diharapkan petani memperoleh pengetahuan yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, serta daya saing produk pertanian secara berkelanjutan.

Pelaksanaan urusan Pertanian ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya produktivitas pertanian
2. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 4.13
Indikator Kinerja Program Bidang Pertanian

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
		hortikultura, peningkatan produksi komoditas peternakan
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS),
		Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian
		persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan
		persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi

4.4.10. BIDANG PERDAGANGAN

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan,**

   Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi kabupaten serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas *agro* secara online dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas *agro*.

2. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

   Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang

pokok penting di Kabupaten Dairi, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol.

3. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

   Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen /BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

4. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

   Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM.

5. **Program Pengembangan Ekspor**

   Program ini diarahkan pada peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Pelaksanaan urusan Perdagangan ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi
2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen
3. Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah
4. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif
5. Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat
6. Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat
7. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan

8. Terwujudnya implementasi sistem resi gudang dan pasar lelang dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 4.14
Indikator Kinerja Program Bidang Perdagangan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan

4.4.11. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana program prioritas urusan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penanggulangan Bencana**
   Program ini diarahkan pada saat tanggap darurat bencana terkait dalam menangani daerah- daerah yang mengalami bencana alam.

2. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran**
   Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia.

Pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 4. 15
Indikator Kinerja Program Bidang Penanggulangan Bencana

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran Keuangan Daerah berisi analisis keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk periode selanjutnya. Hasil analisis digunakan sebagai basis perhitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dairi. Data bab ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020- 2024.

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program-program yang telah ditetapkan.

Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah itu sendiri.

4.5.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

4.5.2. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Secara umum komponen APBD Kabupaten Dairi terdiri atas:

1. Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan dan Belanja Transfer; dan

3. Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja APBD Kabupaten Dairi pada 2020 hingga 2024 untuk pendapatan relatif stabil berada diatas 94 persen sementara untuk belanja sangat fluktuatif berada dikisaran 82 persen sampai dengan 92 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 relatif stabil tercatat di angka 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan sudah semakin membaik.

Tabel 4.16
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persen	Bertambah / Berkurang (RP)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Pendapatan Daerah				
2020	1.048.065.444.457,00	1.054.826.116.417,48	100,765	6.760.671.960,48
2021	1.143.640.583.220,00	1.140.995.615.459,11	99,77	-2.644.967.760,89
2022	1.144.027.253.000,00	1.156.956.282.477,79	101,13	12.929.029.477,79
2023	1.213.130.927.798,00	1.192.110.051.572,23	98,27	-21.020.876.225,77
2024	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89	64.382.172.709,43
Belanja Daerah				
2020	1.166.410.088.534,00	1.058.398.984.995,80	90,73	-108.011.103.538,20
2021	1.251.112.358.720,00	1.133.737.127.633,03	90,61%	117.375.231.086,97
2022	1.365.027.050.000,00	1.123.347.555.302,50	82,29%	-241.679.494.697,50
2023	1.352.203.918.299,00	1.236.286.270.150,50	91,43%	-115.917.648.148,50
2024	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35%	103.387.142.577,92
Penerimaan Pembiayaan				
2020	124.360.762.262,89	124.360.762.262,89	100%	-
2021	114.771.775.500,00	114.771.775.500,00	100%	-
2022	114.730.263.325,65	114.730.263.325,65	100%	-
2023	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100%	-0,08
2024	94.964.692.403,00	4.964.692.402,65	100%	0,35
Pengeluaran Pembiayaan				
2020	6.016.118.185,89	6.016.118.185,00	100%	0,89
2021	100.000.000.000	100.000.000.000	100,00%	-
2022	6.275.000.000,00	6.275.000.000,00	100,00%	-
2023	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100%	-
2024	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100%	-

Sumber: (BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 Audited)

4.5.3. Arah Kebijakan dan strategi Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah dirinci menurut

Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b. Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5.4. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur keuangan Kabupaten Dairi yang tertuang pada APBD Tahun Anggaran 2020 - 2024 terus meningkat dari tahun ke tahun, namun di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat Instruktsi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*). Beberapa komponen pendapatan dan belanja terjadi pergeseran yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 tersebut.

Disisi lain, peningkatan pendapatan dilakukan melalui upaya optimalisasi potensi pendapatan. Pendapatan tersebut menjadi sumber pembiayaan program-program prioritas daerah untuk mencapai target dan sasaran, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seluruh Kebijakan Pendapatan Daerah diformulasikan ke dalam target Pendapatan Daerah sehingga diperoleh proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025-2030 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2030

No.	Uraian	2025	Tahun (RP)				
		Anggaran APBD (RP)	2026	2027	2028	2029	2030
4.1	**Pendapatan asli Daerah**	**93.022.694.604**	**105.685.250.000**	**112.559.012.500**	**119.686.963.125**	**128.071.311.282**	**135.724.876.846**
4.1.1	Pajak Daerah	36.017.694.604	40.830.000.000	45.711.000.000	49.696.550.000	53.781.377.500	57.970.446.375
4.1.2	Retribusi Daerah	41.930.000.000	45.026.500.000	46.227.825.000	48.539.216.250	50.966.177.063	53.514.485.916
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.000.000.000	15.600.000.000	16.230.000.000	16.891.500.000	17.586.075.000	18.315.378.750
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	3.075.000.000	4228.750.000	4.390.187.500	4.559.696.875	5.737.681.719	5.924.565.805
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.088.992.805.000**	**1.188.972.949.086**	**1.252.731.967.209**	**1.182.260.481.300**	**1.270.163.646.424**	**1.316.630.858.985**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.992.805.000	1.188.972.949.086	1.252.731.967.209	1.182.260.481.300	1.270.163.646.424	1.316.630.858.985
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.055.225.311.000	1.150.472.949.086	1.212.369.467.209	1.146.013.918.800	1.228.010.919.861	1.272.549.314.258
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	924.655.056.000	1.015.472.949.086	1.075.044.467.209	1.006.280.793.800	1.084.784.466.736	1.125.742.199.805
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	696.650.974.000	780.472.949.086	834.294.467.209	764.637.043.800	839.284.466.736	861.865.234.961
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	20.083.066.000	25.895.000.000	28.109.875.000	21.637.621.875	28.178.562.422	30.733.026.482
4.2.1.1.2.	Dana Alokasi Khusus	676.567.908.000	754.577.949.086	806.184.592.209	742.999.421.925	811.105.904.314	831.132.208.479
4.2.1.5	Dana Desa	228.004.082.000	235.000.000.000	240.750.000.000	241.643.750.000	245.500.000.000	263.876.964.844
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah (DBH Provinsi)	130.570.255.000	135.000.000.000	137.325.000.000	139.733.125.000	143.226.453.125	146.807.114.453
4.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil	33.767.494.000	38.500.000.000	40.362.500.000	36.246.562.500	42.152.726.563	44.081.544.727
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**						
4.3.3	Lain Lain Pendapatan	**15.000.000.000**	**18.750.000.000**	**19.537.500.000**	**17.364.375.000**	**18.232.593.750**	**19.144.223.438**
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**1.197.015.499.604**	**1.313.408.199.086**	**1.384.828.479.709**	**1.319.311.819.425**	**1.416.467.551.456**	**1.471.499.959.269**

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2020-2024, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026–2030 diatas disusun dengan berbasis pada asumsi:

a. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat pada Tahun 2026 sampai Tahun 2030.
b. Dalam proyeksi pendapatan transfer Tahun 2025-2030 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami kenaikan dari Tahun 2026 dan 2030 dengan asumsi adanya kenaikan transfer dana insentif daerah.
c. Kondisi perekonomian yang sudah membaik pasca Pandemi Covid menyebabkan pertumbuhan ekonomi sudah mulai normal walaupun masih dipengaruhi faktor global lainnya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi diasumsikan berkisar 4 persen– 6 persen.
d. Asumi Inflasi Kabupaten Dairi yang digunakan untuk proyeksi adalah 2 persen sampai 3,5 persen.
e. Proyeksi total pendapatan meningkat dari Tahun 2026 ke Tahun 2030 dengan rata-rata ± 4,3 persen.

4.5.5. Arah Kebijakan dan strategi Belanja Daerah

Pada Tabel di bawah terlihat bahwa Belanja Daerah pada Tahun 2026 sampai Tahun 2030 diasumsikan untuk belanja operasi mengalami peningkatan karena meningkatnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah, demikian juga halnya belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer mengalami kenaikan. Secara umum kebijakan belanja pada Tahun 2025–2030 diarahkan untuk memperbesar belanja pembangunan dengan terus ditingkatkannya alokasi belanja modal.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

2. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan pemerintah pilihan serta penunjang pemerintahan ;
3. Upaya Penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Dairi secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan;

Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

Tabel 4.18
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 – 2030

No	Uraian	Anggaran	Proyeksi				
		2025 (RP)	2026(RP)	2027 (RP)	2028 (RP)	2029 (RP)	2030 (RP)
5.1	**Belanja Operasi**	890.698.496.466	929.309.147.298	962.510.424.926	965.510.308.174	1.034.124.991.902	1.052.795.069.716
5.1.1	Belanja Pegawai	625.456.353.306	647.110.040.905	668.546.629.272	680.394.044.579	703.956.635.916	728.075.334.994
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.193.169.260	275.998.964.308	288.358.943.675	270.706.122.497	294.402.644.947	319.090.607.846
5.1.5	Belanja Hibah	5.048.973.900	6.200.142.085	5.604.851.979	5.410.141.098	35.765.711.039	5.629.126.876
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-					
5.2	**Belanja Modal**	128.972.255.138	193.584.361.388	236.032.702.318	170.734.749.465	196.471.091.283	226.422.848.915
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	5.000.000.000	5.100.000.000	5.202.000.000	5.306.040.084	6.412.160.800	6.520.404.916
5.4	**Belanja Transfer**	202.344.748.000	223.404.690.400	223.083.352.465	216.760.721.702	231.459.307.471	245.761.635.722
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.381.148.000	2.452.582.400	3.001.604.095	2.477.342.379	2.890.246.281	2.826.193.309
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	199.963.600.000	220.952.108.000	220.081.748.370	214.283.379.323	228.569.061.190	242.935.442.413
TOTAL JUMLAH BELANJA		**1.227.015.499.604**	**1.351.398.199.086**	**1.426.828.479.709**	**1.349.311.819.425**	**1.468.467.551.456**	**1.531.499.959.269**

4.5.6. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besardaripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Pada jenis pengeluaran pembiayaan sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah melalui penyertaan modal (investasi daerah) kepada Badan Usaha Milik Daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan diproyeksikan pemberian Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026– 2030 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.19 Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 – 2030

No.	Uraian	2025	Proyeksi				
		Target APBD (RP)	2026 (RP)	2027(RP)	2028 (RP)	2029 (RP)	2030 (RP)
SURPLUS / DEFISIT							
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**30.000.000.000**	**41.000.000.000**	**45.000.000.000**	**33.000.000.000**	**55.000.000.000**	**63.000.000.000**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	30.000.000.000	41.000.000.000	45.000.000.000	33.000.000.000	55.000.000.000	63.000.000.000
3.1.2	Pinjaman						
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**30.000.000.000**	**41.000.000.000**	**45.000.000.000**	**33.000.000.000**	**55.000.000.000**	**63.000.000.000**
3.2	**Pengeluaran pembiayaan**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
3.2.1	Pembentukan dana cadangan						
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Bunga Pinjaman						
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**27.000.000.000**	**38.000.000.000**	**42.000.000.000**	**30.000.000.000**	**52.000.000.000**	**60.000.000.000**

4.5.7. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Dairi. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Namun dalan penyajian tabel, program perangkat daerah beserta indikator memuat program dan target hingga Tahun 2030 dimana program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Serangkaian program Perangkat Daerah Kabupaten Dairi telah dipetakan untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran selama lima tahun ke depan. Penetapan program ini diikuti dengan penetapan target untuk masing-masing program beserta pagu indikatif setiap tahunnya. Adapun program-program perangkat daerah dijabarkan dalam setiap urusan, yang dapat dilihat pada tabel 4.20 di bawah ini.

Tabel 4.20
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					327,540,070,066		342,076,211,068		367,621,088,004		388,375,187,541		422,338,216,584	Dinas Pendidikan
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					250,447,072,211		268,222,195,043		295,295,721,693		325,029,324,915		357,191,979,011	Dinas Pendidikan
Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	78.21	100	100	250,447,072,211	100	268,222,195,043	100	295,295,721,693	100	325,029,324,915	100	357,191,979,011	Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					76,852,997,855		73,554,016,025		72,125,366,311		63,025,862,626		64,846,237,573	Dinas Pendidikan
meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	59.69	62.87	66.05	76,852,997,855	69.23	73,554,016,025	72.41	72,125,366,311	75.45	63,025,862,626	78.49	64,846,237,573	Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	99.06	99.2	99.35		99.49		99.63		99.78		99.92		Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	4.34	5.02	5.7		6.39		7.07		7.75		8.43		Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan KhusuS (APS) (%)	0.13	0.18	0.23		0.28		0.33		0.38		0.43		Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100,000,000		150,000,000		200,000,000		250,000,000		300,000,000	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	100	100,000,000	100	150,000,000	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100,000,000		100,000,000		0		0		0	Dinas Pendidikan
meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan
	Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	5.24	7.59	9.94		12.29		14.64		16.99		19.34		Dinas Pendidikan
	Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	33.61	39.29	44.97		50.65		56.33		62.01		67.69		Dinas Pendidikan
	Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	54.75	62.83	70.91		78.99		87.07		95.15		100		Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN					40,000,000		50,000,000		0		70,000,000		0	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENDIDIKAN														
meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	44.83	54.83	64.83	40,000,000	74.83	50,000,000	84.83	0	94.83	70,000,000	100	0	Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					379,949,760,000		407,641,450,000		268,753,640,000		285,780,895,756		302,732,308,041	Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					287,976,960,000		300,584,450,000		156,210,125,000		166,710,922,504		178,137,356,126	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	87.26	100	100	90,400,000,000	100	97,049,850,000	100	98,956,975,000	100	103,582,422,504	100	108,543,456,126	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	97.32	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	94.47	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	83.58	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	96.68	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	72.55	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	93.03	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(%)													
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	87.06	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	n/a	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan RS (%)	113.33	100	100	197,576,960,000	100	203,534,600,000	100	57,253,150,000	100	63,128,500,000	100	69,593,900,000	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cost Recovery Rate (CRR) (%)	83.81	85	85		90		90		90		90		Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					300,000,000		315,000,000		330,000,000		347,000,000		364,000,000	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					300,000,000		315,000,000		330,000,000		347,000,000		364,000,000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					103,741,644,164		107,938,324,264		111,416,472,870		116,559,803,904		118,832,208,978	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					8,859,711,000		9,302,696,550		9,767,831,378		10,256,222,946		10,769,034,094	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	94.42	94.72	95.39	8,859,711,000	96.06	9,302,696,550	96.73	9,767,831,378	97.4	10,256,222,946	98.08	10,769,034,094	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT					500,000,000		600,000,000		675,000,000		750,000,000		750,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	500,000,000	1	600,000,000	1	675,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN ENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					550,000,000		550,000,000		600,000,000		650,000,000		650,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100	650,000,000	100	650,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim	22.37	23	24		25		26		27		28		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Terhadap Pertanian (Persentase)													
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					730,000,000		777,000,000		924,000,000		971,000,000		1,050,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					30,000,000		32,000,000		34,000,000		36,000,000		40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha					30,000,000		32,000,000		34,000,000		36,000,000		40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	250,000,000	100	270,000,000	100	290,000,000	100	310,000,000	100	340,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3,200,000,000		3,200,000,000		3,200,000,000		3,200,000,000		3,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	60,096	60,100	60,500	3,200,000,000	60,750	3,200,000,000	61,000	3,200,000,000	61,500	3,200,000,000	62,000	3,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					49,971,691,000		52,460,275,550		55,073,289,328		57,816,953,794		60,697,801,484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	58.43	58.5	58.55	49,971,691,000	58.6	52,460,275,550	58.65	55,073,289,328	58.7	57,816,953,794	58.75	60,697,801,484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					9,541,704,000		9,931,289,000		10,287,853,660		10,732,246,343		11,175,358,098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					200,000,000		250,000,000		250,000,000		320,000,000		370,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara, dan korban bencana dan yang tekena relokasi akibat program pemerintah	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	70.12	70.2	70.3	200,000,000	70.4	250,000,000	70.5	250,000,000	70.6	320,000,000	70.7	370,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					2,550,000,000		2,550,000,000		2,550,000,000		2,550,000,000		2,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tertanganinya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	7.58	7.6	7.62	2,550,000,000	7.64	2,550,000,000	7.66	2,550,000,000	7.68	2,550,000,000	7.7	2,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS					6,791,704,000		7,131,289,000		7,487,853,660		7,862,246,343		8,255,358,098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	15.25	15.5	15.75	6,791,704,000	16.25	7,131,289,000	16.25	7,487,853,660	16.5	7,862,246,343	16.75	8,255,358,098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4,690,000,000		5,310,000,000		5,810,000,000		6,370,000,000		6,730,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	-	80	85	2,030,000,000	90	2,310,000,000	95	2,550,000,000	100	2,780,000,000	100	3,010,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	-	70	75	1,260,000,000	80	1,450,000,000	85	1,610,000,000	90	1,800,000,000	95	1,930,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	-	100	100	1,400,000,000	100	1,550,000,000	100	1,650,000,000	100	1,790,000,000	100	1,790,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2,000,000,000		2,110,000,000		2,350,000,000		2,590,000,000		2,750,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Pelayanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	600,000,000	100	560,000,000	100	650,000,000	100	760,000,000	100	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1,400,000,000	100	1,550,000,000	100	1,700,000,000	100	1,830,000,000	100	1,950,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8,435,000,000		9,085,000,000		9,735,000,000		10,385,000,000		11,035,000,000	Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1,300,000,000		1,500,000,000		1,700,000,000		1,900,000,000		2,100,000,000	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS (%)	100	100	100	1,300,000,000	100	1,500,000,000	100	1,700,000,000	100	1,900,000,000	100	2,100,000,000	Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1,200,000,000		1,450,000,000		1,700,000,000		1,950,000,000		2,200,000,000	Dinas Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30	1,200,000,000	30	1,450,000,000	30	1,700,000,000	30	1,950,000,000	30	2,200,000,000	Dinas Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30		30		30		30		30		Dinas Sosial
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30		30		30		30		30		Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1,500,000,000		1,600,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		1,900,000,000	Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	55	56	1,500,000,000	57	1,600,000,000	58	1,700,000,000	59	1,800,000,000	60	1,900,000,000	Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	1	2		3		4		5		6		Dinas Sosial
	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial	1,000	1,000	1,500		2,000		2,500		3,000		3,500		Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)													
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan	100	100	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Bencana (Persentase)													
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8,203,149,866		9,260,437,853		10,286,559,258		11,571,209,726		12,646,051,021	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1,165,143,000		1,546,800,300		1,830,200,450		2,298,000,750		2,474,450,788	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	100	100	1,165,143,000	100	1,546,800,300	100	1,830,200,450	100	2,298,000,750	100	2,474,450,788	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					120,000,000		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8.09	8.29	8.57	120,000,000	8.57	132,000,000	8.89	145,200,000	9.17	159,720,000	9.17	175,692,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					521,550,000		573,705,000		631,075,500		694,183,050		763,601,355	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja	32,000	32,100	32,200	521,550,000	32,350	573,705,000	32,475	631,075,500	32,600	694,183,050	33,000	763,601,355	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5,272,003,750		5,273,978,000		5,406,907,450		5,438,699,450		5,501,234,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	55	62.5	77	200,000,000	80	200,000,000	82.5	200,000,000	85	200,000,000	85	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					240,000,000		280,000,000		320,000,000		360,000,000		400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penanganan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0	50	51	240,000,000	53	280,000,000	55	320,000,000	57	360,000,000	60	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					20,500,000		21,750,000		23,950,000		24,850,000		26,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Keluarga
Meningkatnya kualitas keluargadalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	70.35	71.35	71.85	20,500,000	72.35	21,750,000	72.6	23,950,000	72.75	24,850,000	73	26,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	20	22	50,000,000	24	55,000,000	26	60,000,000	28	65,000,000	30	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59.09	65	68	55,000,000	70	55,000,000	71	55,000,000	72.	55,000,000	75	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					275,000,000		310,000,000		395,000,000		380,000,000		395,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Persentase Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	54.98	55.1	275,000,000	55.17	310,000,000	55.97	395,000,000	56.1	380,000,000	56.17	395,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	0	50	51		53		55		57		60		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					16,025,593,950		17,281,593,950		17,535,593,950		18,135,593,950		18,270,593,950	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN					1,100,000,000		1,180,000,000		1,230,000,000		1,285,000,000		1,395,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	86.4	86.8	87.3	1,100,000,000	87.9	1,180,000,000	88.3	1,230,000,000	88.8	1,285,000,000	88.8	1,395,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	0	7.54	7.34		7.14		6.94		6.74		6.54		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					500,000,000		520,000,000		540,000,000		595,000,000		620,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	21.3	19	18	500,000,000	17	520,000,000	16	540,000,000	15	595,000,000	14	620,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					638,730,000		470,000,000		480,000,000		490,000,000		500,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	4.12	8	13	638,730,000	18	470,000,000	23	480,000,000	28	490,000,000	33	500,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	63.41	70	75		80		85		90		95		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Netto) (Angka)	-0.44	-0.44	-0.44		-0.44		-0.44		-0.44		-0.44		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					59,000,000		110,000,000		130,000,000		150,000,000		170,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta	98	98	98.4	59,000,000	98.8	110,000,000	99.4	130,000,000	99.8	150,000,000	100	170,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	58.83	60	61		62		63		64		65		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang	43.56	45	47		49		51		53		55		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang	56.16	58	60		62		64		66		68		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99.79	99.8	99.85		99.9		99.95		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2,500,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan dan inovasi pelayanan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	2,500,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					3,057,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	3,057,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6,825,000,000		8,885,000,000		8,650,000,000		12,605,000,000		8,570,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					100,000,000		105,000,000		110,000,000		115,000,000		120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Penataan	Persentase Fasilitasi Penataan	80	80	81	100,000,000	83	105,000,000	84	110,000,000	85	115,000,000	86	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Desa	Desa (Persentase)													Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA Desa					75,000,000		100,000,000		130,000,000		150,000,000		180,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	0	0	0.62	75,000,000	1.24	100,000,000	1.86	130,000,000	2.48	150,000,000	3.11	180,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat dalam	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100	100	100	350,000,000	100	380,000,000	100	410,000,000	100	440,000,000	100	470,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7,163,403,000		7,348,383,000		7,404,133,000		7,404,133,000		7,401,328,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					395,775,000		405,775,000		415,775,000		415,775,000		425,775,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalinya pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	3.01	2.99	2.96	395,775,000	2.94	405,775,000	2.91	415,775,000	2.89	415,775,000	2.86	425,775,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	7.9-	7.3-	6.7-		6.2-		5.7-		5.3-		5.1-		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					5,134,328,000		5,309,308,000		5,355,058,000		5,355,058,000		5,342,253,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Perberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%)	51.81	55.81	59.81	5,134,328,000	63.81	5,309,308,000	67.81	5,355,058,000	71.81	5,355,058,000	72.81	5,342,253,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	18.98	16.98	14.98		12.98		10.98		8.98		8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	70	71.1	72.1		72.9		73.7		74.4		75.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	57.43	59.5	61.21	1,633,300,000	63.42	1,633,300,000	65.76	1,633,300,000	67.95	1,633,300,000	69	1,633,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU					3,000,000,000		3,100,000,000		3,200,000,000		3,300,000,000		3,400,000,000	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan LLAJ	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	45.61	45.61	45.61	3,000,000,000	46	3,100,000,000	46.1	3,200,000,000	46.2	3,300,000,000	46.2	3,400,000,000	Dinas Perhubungan
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5,108,000,000		5,273,500,000		5,393,000,000		5,501,500,000		5,652,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					300,000,000		320,000,000		340,000,000		360,000,000		400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	500	550	600	300,000,000	650	320,000,000	700	340,000,000	750	360,000,000	800	400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,					420,000,000		445,000,000		470,000,000		495,000,000		520,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.5	2.6	2.65	420,000,000	2.7	445,000,000	2.75	470,000,000	2.8	495,000,000	2.85	520,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					800,000,000		900,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	10.63	12	13	800,000,000	14	900,000,000	15	1,000,000,000	16	1,000,000,000	17	1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					3,000,000,000		3,200,000,000		3,400,000,000		3,600,000,000		4,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	14.1	15	16	3,000,000,000	17	3,200,000,000	18	3,400,000,000	19	3,600,000,000	20	4,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					300,000,000		400,000,000		500,000,000		600,000,000		700,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	71.417	83.5	84	300,000,000	84.5	400,000,000	85	500,000,000	85.5	600,000,000	86.6	700,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					400,000,000		550,000,000		650,000,000		750,000,000		850,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3,642.024	3,880.062	4,268.068	400,000,000	4,694.875	550,000,000	5,164.362	650,000,000	5,680.799	750,000,000	6,248.878	850,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					600,000,000		700,000,000		800,000,000		900,000,000		1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	2	4	600,000,000	6	700,000,000	8	800,000,000	10	900,000,000	10	1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	2	4	400,000,000	6	400,000,000	8	400,000,000	10	400,000,000	10	400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI					400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	0	2	4	400,000,000	6	400,000,000	8	400,000,000	10	400,000,000	10	400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Persentase)													
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					8,450,400,000		6,735,000,000		7,325,000,000		11,690,000,000		11,960,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1,000,000,000		1,045,000,000		1,130,000,000		1,180,000,000		1,300,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	1	1	1.35	1,000,000,000	1.7	1,045,000,000	2.05	1,130,000,000	2.4	1,180,000,000	2.75	1,300,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0.88	0.88	1.38		1.88		2.38		2.88		3.38		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0	5	10		15		15		20		20		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	21,512.58	22,680.85	23,889.36		25,149.83		26,463.93		27,825.61		29,220.7		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2,700,000,000		2,850,000,000		3,000,000,000		3,200,000,000		3,350,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	6,000	6,000	2,700,000,000	6,000	2,850,000,000	6,000	3,000,000,000	6,000	3,200,000,000	6,000	3,350,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT					500,000,000		600,000,000		675,000,000		750,000,000		750,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	500,000,000	1	600,000,000	1	675,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN ENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					550,000,000		550,000,000		600,000,000		650,000,000		650,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100	650,000,000	100	650,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	22.37	23	24		25		26		27		28		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3,700,400,000		1,690,000,000		1,920,000,000		5,910,000,000		5,910,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Cakupan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	0	30	3,700,400,000	45	1,690,000,000	60	1,920,000,000	75	5,910,000,000	75	5,910,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					30,000,000		32,000,000		34,000,000		36,000,000		40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha					30,000,000		32,000,000		34,000,000		36,000,000		40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					250,000,000		270,000,000		290,000,000		310,000,000		340,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	250,000,000	100	270,000,000	100	290,000,000	100	310,000,000	100	340,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.6. Program Kegiatan Penurunan Kemiskinan Masyarakat Rentan Miskin

Masyarakat Rentan miskian merupakan kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin.

Beberapa program/kegiatan pemberdayaan Masyarakat Rentan Miskin dapat melalui mekanisme pemberian bantuan sosial (bansos) dan insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD) yang harus fokus pada kelompok masyarakat rentan/vulnerable group. Namun kendala masalah terkait data penerima manfaat yang kurang valid selalu masalah klasik yang berulang untuk segera diselesaikan. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi Pemerintah telah menyususun Program /kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan baik dalam strategi mengurangi beban poengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.21 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang standar teknis pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan	Meningkatnya status kehatan dan gizi masyarakat	Jumlah kematian Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	3.168.199.449	315.000.000	330.750.000	347.287.500	364.651.875	DAU, DAK
			Jumlah kematian balita		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	109.978.208	315.000.000	330.750.000	347.287.500	364.651.875	DAU, DAK
			Angka keberhasilan pengobatan TB		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	118.742.200	315.000.000	330.750.000	347.287.500	364.651.875	DAU, DAK
			Cakupan imunisasi bayi lengkap		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	63.607.156	483.000.000	507.150.000	532.507.500	559.132.875	DAU, DAK
			Persentase balita gizi buruk yang mendapat tatalaksana sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	528.891.450	556.500.000	584.325.000	613.541.250	644.218.313	DAU, DAK
		Meningkatnya cakupan dan	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan		Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan		Seluruh Kecamatan	61.925.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	DAU, DAK

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
		mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan Nasional (JKN)		skrining kesehatan sesuai standar (%)	Produktif	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	58.487.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	DAU, DAK
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	59.205.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	DAU, DAK
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar		Seluruh Kecamatan	350.811.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	DAU, DAK
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	676.687.413	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	DAU, DAK
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang dengan risiko HIV Mendapatkan Pelayanan		Seluruh Kecamatan	48.827.102	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	DAU, DAK

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
					pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	Risiko Terinfeksi HIV	Kesehatan Sesuai Standar								
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Seluruh Kecamatan	16.404.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	DAU, DAK
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita bermasalah gizi		Seluruh Kecamatan	3.239.786.822	273.000.000	286.500.000	300.982.500	316.031.625	DAU, DAK
							Jumlah ibu hamil bermasalah gizi		Seluruh Kecamatan						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Seluruh Kecamatan	142.007.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	DAU, DAK
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Seluruh Kecamatan	82.916.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	DAU, DAK
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Rumah yang dilakukan pengasapan (fogging DBD)		Seluruh Kecamatan	3.145.705.228	126.000.000	132.300.000	138.915.000	145.860.750	DAU, DAK

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
							Jumlah siswa yang mendapatkan obat cacing		Seluruh Kecamatan						
	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan		Seluruh Kecamatan	42.176.565.071	46.200.000.000	48.510.000.000	50.935.500.000	53.482.275.000	DAU, DBH, KAPITASI JKN
Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan	1. Persesjen No. 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis 2.Permendikbud nomor 32 Tahun 2022 3.Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase keterpenuhan SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2030	Kab.Dairi	55.935.834.239	31.527.113.160	29.417.113.160	29.217.113.160	34.657.113.160	34.227.113.160
			Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase keterpenuhan SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama			32.875.890.032	31.527.113.160	29.417.113.160	29.217.113.160	34.657.113.160	34.227.113.160
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase keterpenuh an SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama			3.669.278.550	4.273.973.000	6.379.300.000	5.154.390.000	4.220.000.000	4.045.000.000

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusu (APS)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase keterpenuh an SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan nonkesetaraan/keetaraan			170.000.000	210.000.000	410.000.000	220.000.000	210.000.000	170.000.000
			Persentase Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B												
			Persentase Jumlah Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4												
			Iklim Inklusivitas SD												
			Iklim Inklusivitas SMP												
			Iklim Keamanan SD												
			Iklim Keamanan SMP												
			Iklim Kebhinekaan SD												
			Iklim Kebinekaan SMP												

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.) Peningkatan Ketahanan pangan keluarga beresiko stunting 2.) Peningkatan Ketersediaan Pangan Keluarga Melalui Pemanfaatan Pekarangan/ Lahan Kosong	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Skor Pola Pangan Harapan (Nilai). 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.) Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 2.) Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 3.) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			249.940.350	1.100.000.000	1.180.000.000	1.230.000.000	1.285.000.000	
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.) Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.) Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			552.141.550	350.000.000	365.000.000	380.000.000	430.000.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan sdm dan pemberdayaan petani/pembudidaya ikan serta mengembangkan budidaya perikanan darat di pedesaan menjadi bentuk usaha dan sebagai mata pencaharian utama bukan sampingan	Meningkatnya produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.) Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 2.) Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		Kec. Silahisabungan	-	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			510.000.000	400.000.000	550.000.000	650.000.000	750.000.000	
Urusan Pemerintahan	Peningkatan Sarana Pertanian	Meningkatnya produktivitas Komodit	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	1.) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.) Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung			1.198.400.000	900.000.000	945.000.000	1.030.000.000	1.080.000.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
Bidang Pertanian	spesifik Lokasi	i Pertania n Strategis		PERTANIAN	2.) Peningkatan Produksi Hortikultura 3.) Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan 4.) Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi		Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2.) Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Usaha Tani			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.) Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 2.) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian 3.) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan			-	500.000.000	550.000.000	600.000.000	700.000.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
							Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Lainnya								
						Pembangunan Prasarana Pertanian	1.) Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2.) Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			4.400.000.000	2.200.000.000	2.300.000.000	2.400.000.000	2.500.000.000	
	Melakukan pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, Hewan Ternak			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			450.000.000	40.000.000	450.000.000	500.000.000	650.000.000	
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			447.423.250	550.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
							yang Dikendalikan								
	Meningkatkan Keterampilan Petani			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.) Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2.) Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.) Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang 2.) Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 3.) Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 4.) Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Ditingkatkan Kapasitasnya			750.000.000	3.700.400.000	1.690.000.000	1.920.000.000	5.910.000.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025-2030	Kab.Dairi	15.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
			Persentase Kepemilikan Kartu		Persentase Kepemilikan Kartu										

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
	Siap Turun Langsung (Jempol Siturang)		Identitas Anak		Identitas Anak										
			Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran		Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Neto)										
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025-2030	Kab.Dairi	5.000.000	36.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan										
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan										
			Persentase akta kematian yang		Persentase Akta Perceraian yang										

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
			diterbitkan bagi yang melaporkan		Diterbitkan bagi yang Melaporkan										
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan										
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Perdes APBdes, dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kades, Perangkat dan BPD	Desa	2.750.000.000	2.935.000.000	2.900.000.000	3.165.000.000	2.430.000.000	
	2. Peraturan Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan					Keadaan Mendesak	Jumlah Penerima BLT	Perdes Penerima BLT	Desa	9.734.400.000	-	-	-	-	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
	Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa														
	3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025					Ketapang Desa	Jumlah Proposal Ketapang	SK Bumdes/ SK TPK	Desa	27.123.977.000	-	-	-	-	
	4.Peraturan Menteri Keuanga					Penanggulangan Mendesak	Jumlah Penerima BLT	Perdes Penerima BLT	Desa	9.734.400.000	-	-	-	-	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
	n Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025														
					Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	Kecamatan se-Kabupaten Dairi	Tidak diakomodir	20.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
					Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	-	Kecamatan se-Kabupaten Dairi	Tidak diakomodir	20.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
					Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	5. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	Kecamatan se-Kabupaten Dairi	Tidak diakomodir	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Infrastruktu r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Renstra Dinas PU Kabupaten Dairi Tahun 2025-2030	Kab.Dairi						
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*		Kab.Dairi	6.650.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.350.000.000	7.717.500.000	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*		Kab.Dairi	237.500.000	250.000.000	250.000.000	2.625.000.000	275.625.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)			6.557.940.000,00					
						Peningkatan Sistem Penyediaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*			950.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*								
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangunn*			2.850.000.000	30.050.000.000	30.050.000.000	3.150.000.000	33075000000	
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*			1.900.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.150.000.000	3307500000	
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun*			1.425.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000	
						Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat*			1.425.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem									

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun*			1.425.000.000	1.500.500.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.673.550.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Renstra Dinas PU Kabupaten Dairi Tahun 2025-2030	Kab.Dairi						
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*		Kab.Dairi	6.650.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.350.000.000	7.717.500.000	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*		Kab.Dairi	237.500.000	250.000.000	250.000.000	2.625.000.000	275.625.000	
				PROGRAM PENGELOLAA	[Meningkatnya	Pengelolaan dan	Rumah tangga dengan akses air			6.557.940.000,00					

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
				N DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	minum jaringan perpipaan (%)								
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*			950.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangunn*			2.850.000.000	30.050.000.000	30.050.000.000	3.150.000.000	33075000000	
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*			1.900.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.150.000.000	3307500000	
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun*			1.425.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000	
						Perluasan	*Jumlah*			1.425.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	*Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat*								
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun*			1.425.000.000	1.500.500.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.673.550.000	
						Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang ditingkatkan*			1.425.000.000	1.500.500.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.673.550.000	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota								
						Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*			475.000.000	500.000.000	550.000.000	577.500.000	606.375.000	
						Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun Sampai*			4.750.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000	5.512.500.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
							Perkerasan								
						Pemeliharaan Berkala Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*			7.600.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.400.000.000	8.820.000.000	
						Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*			18.650.000.000	19.700.000.000	25.000.000.000	26.250.000.000	27.562.500.000	
						Pembangunan jembatan	*Panjang Jembatan yang dibangun*			14.250.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.750.000.000	1.653.750.000	
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	[Tertanganinya perumahan dan kawasan permukiman kumuh]	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani								
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.500.000	250.000.000	250.000.000	262.500.000	275.625.000	
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka*		Kab. Dairi, Semua Kecamat	1.425.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Pencegahan Kumuh*		an, Semua Kel/Desa						
				PROGRAM PENANGGULANGANBENCANA	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.500.000	50.000.000	230.000.000	241.500.000	253.575.000	
				[Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana]	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*			95.000.000	100.000.000	380.000.000	399.000.000	418.950.000	
				PROGRAM PENCEGAHAN,	[Meningkatnya Pelayanan	Pencegahan, Pengendalian,	Cakupan Penyebaran Informasi dan			760.000.000	800.000.000	110.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
				PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran]	Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Edukasi Rawan Kebakaran								
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*			114.000.000	120.000.000	400.000.000	420.000.000	441.000.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS			95.000.000	100.000.000	22.000.000	231.000.000	242550000	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial*								

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
							Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya								
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya								
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*			95.000.000	100.000.000	120.000.000	126.000.000	132.300.000	
						Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*			95.000.000	100.000.000	120.000.000	126.000.000	132.300.000	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Persentase Penerima								

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
							Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar									
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota*			9.950.000.000	100.000.000	120.000.000	126.000.000	13.230.000	
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota*			302.000.000	320.000.000	600.000.000	630.000.000	661.500.000	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*			85.500.000	90.000.000,00	100.000.000	105.000.000	110.000.000	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaa	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial								

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						n bencana kabupaten/ kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar							
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana			30.000.000	35.000.000	37.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota	kabupaten/kota								
	Pemberant asan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya								
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*			160.000.000	520.000.000	550.000.000	575.000.000	160.000.000	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	[Meningkatnya pekerja yang terlindungi]	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial								

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota									
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*			20.000.000	25.000.000	224.000.000	235.000.000	250.000.000	
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi*			19.000.000	20.000.000	30.000.000	31.500.000	33.000.000	
						Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan*			23.750.000	25.000.000	30.000.000	315.000.000	33.500.000	
				PROGRAM	[Persentase	Penyediaan	Persentase								

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
				PERLINDUNGAN PEREMPUAN	tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penanganan]	Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif								
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*			23.750.000	25.000.000	30.000.000	315.000.000	33.500.000	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	[Persentase Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak]										
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan										

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
					Layanan Komprehensif										
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*			47.500.000	50.000.000	50.000.000	52.500.000	55.500.000
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*			1.282.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.420.000.000	1.500.000.000	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*			768.000.000	810.000.000	810.000.000	850.000.000	900.000.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
				Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*			292.600.000	308.000.000	308000000	32.500.000	34.000.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	[Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera]	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)								
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Bali	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan*			740.000.000	780.000.000	780.000.000	820.000.000	870.000.000	

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						ta)									
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	[meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Pertumbuhan Wirausaha									
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*			30.800.000	32.500.000	32.500.000	34.000.000	38.000.000	
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Unit Usaha yang meningkat Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			152.000.000	160.000.000	160.000.000	168.000.000	176.500.000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	[Meningkatnya daya saing UMKM]	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor								

SEKTOR/ URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INSTRUMEN PELENGKAP	LOKASI PRIORITAS	SUMBER PENDANAAN					
										2025	2026	2027	2028	2029	Sumber Dana
						Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*			35.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	
				[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*			28.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*			19000000	20000000	20000000	20000000	20000000	

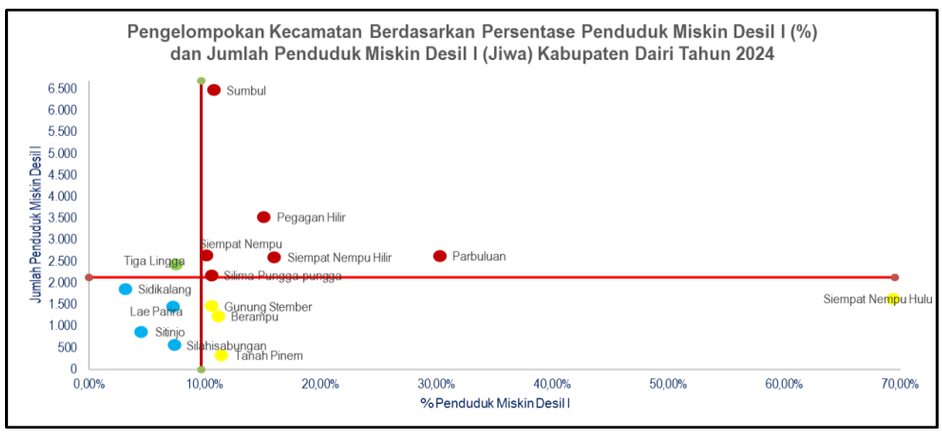
BAB V
LOKASI PRIORITAS

Analisis wilayah prioritas bertujuan untuk menentukan wilayah Kecamatan secara tepat sebagai lokus intervensi program dan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh beda karakteristik daerah, beda akar masalah, akan berbeda wilayah prioritas dan harus berbeda intervensi yang disiapkan. Analisis wilayah priorits ini menggunakan pendekatan analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan melalui analisis kuadran ini dapat ditentukan 4 kategori prioritas wilayah sebagai berikut:

- Prioritas 1 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya negatif (warna merah);
- Prioritas 2 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x negatif, namun indikator y positif (warna kuning);
- Prioritas 3 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x positif, namun indikator y negatif (warna hijau);
- Prioritas 4 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya positif (warna biru). Prioritas ke 4 ini memiliki derajat prioritas yang paling rendah atau disebut dengan wilayah non prioritas atau prioritas keempat dari 1 2 3 dan 4.

5.1. Wilayah Prioritas Kemiskinan

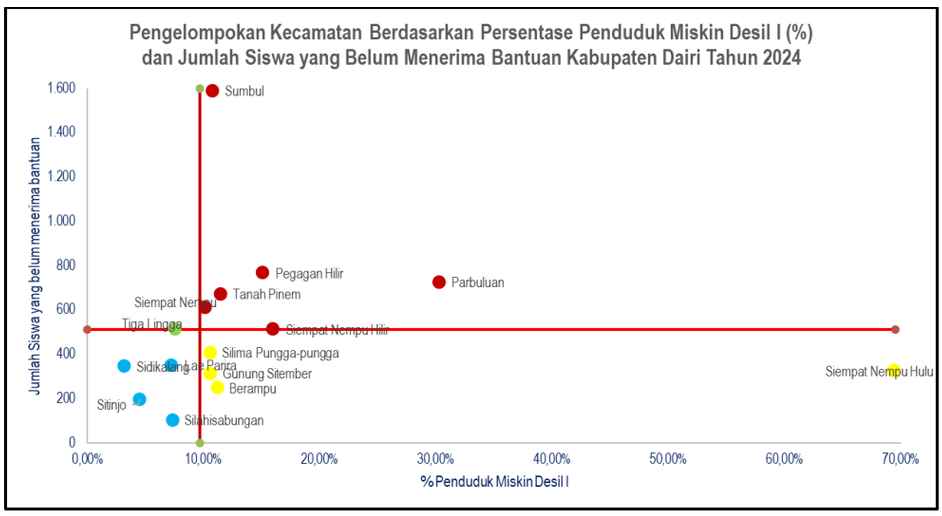
5.1.1. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Desil I



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan jumlah penduduk miskin Desil I didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Sumbul , Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Silima Pungga-pungga
Prioritas 2	Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Berampu, Tanah Pinem
Prioritas 3	Tiga Lingga
Prioritas 4	Sidikalang, Lae Parira, Sitinjo, Silahisabungan

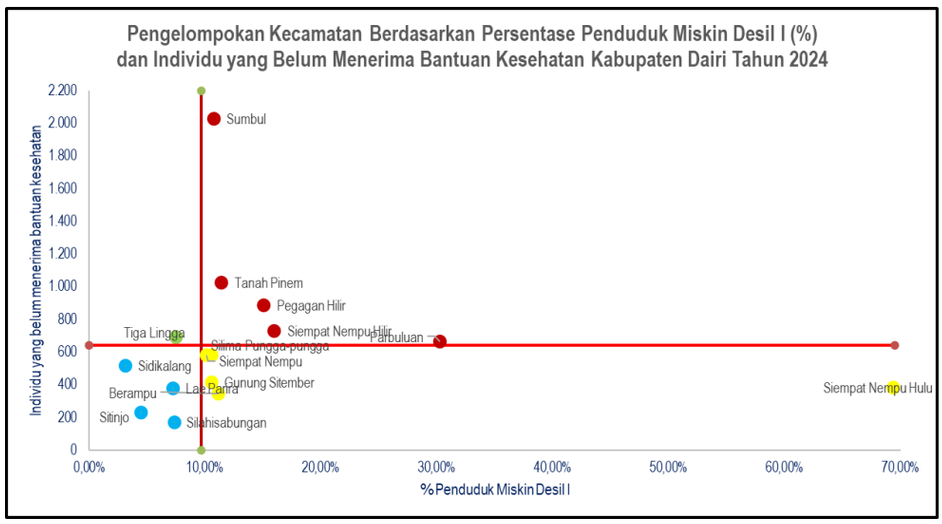
5.1.2. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Jumlah Siswa Yang Belum Menerima Bantuan Kabupaten Dairi Tahun 2024.



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Sumbul, Pegagan Hilir, Parbuluan, Tanah Pinem, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hilir
Prioritas 2	Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Berampu
Prioritas 3	Tiga Lingga
Prioritas 4	Lae Parira, Sidikalang, Sitinjo, Silahisabungan

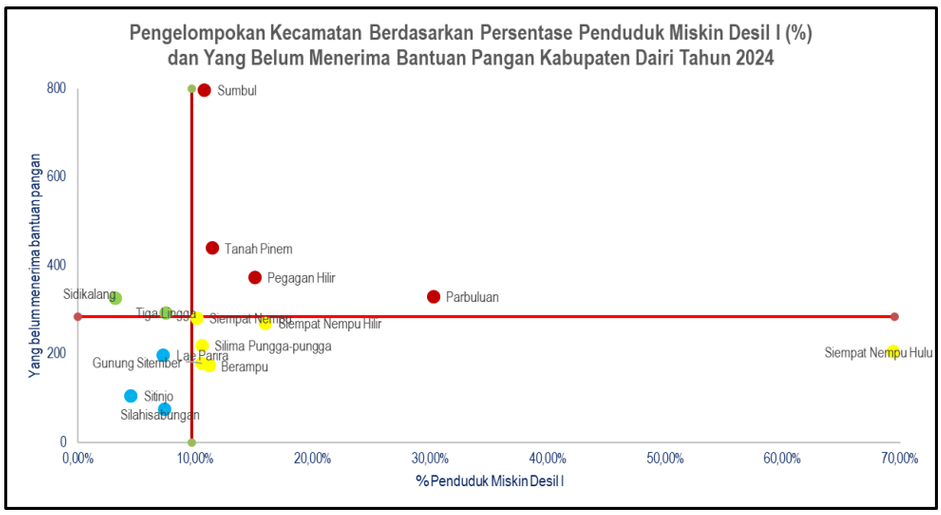
5.1.3. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Individu Yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Sumbul, Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir, Parbuluan
Prioritas 2	Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hulu, Berampu
Prioritas 3	Tiga Lingga
Prioritas 4	Sidikalang, Lae Parira, Sitinjo, Silahisabungan

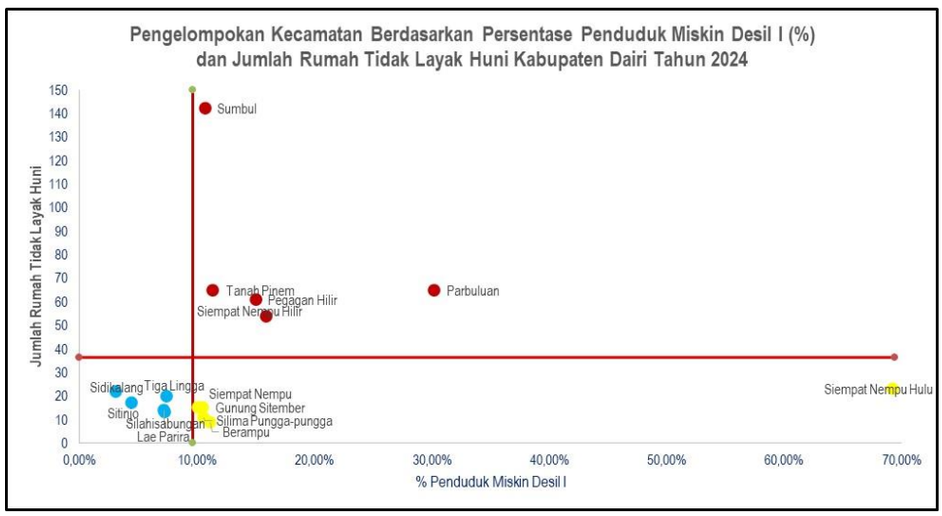
5.1.4. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Yang Belum Menerima Bantuan Pangan



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan yang belum menerima bantuan pangan didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Sumbul, Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Parbuluan
Prioritas 2	Siempat Nempu, Siempat Nempu Hilir, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Berampu
Prioritas 3	Sidikalang, Tiga Lingga
Prioritas 4	Lae Parira, Sitinjo, Silahisabungan

5.1.5. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Jumlah Keluarga Rumah Tidak Layak Huni

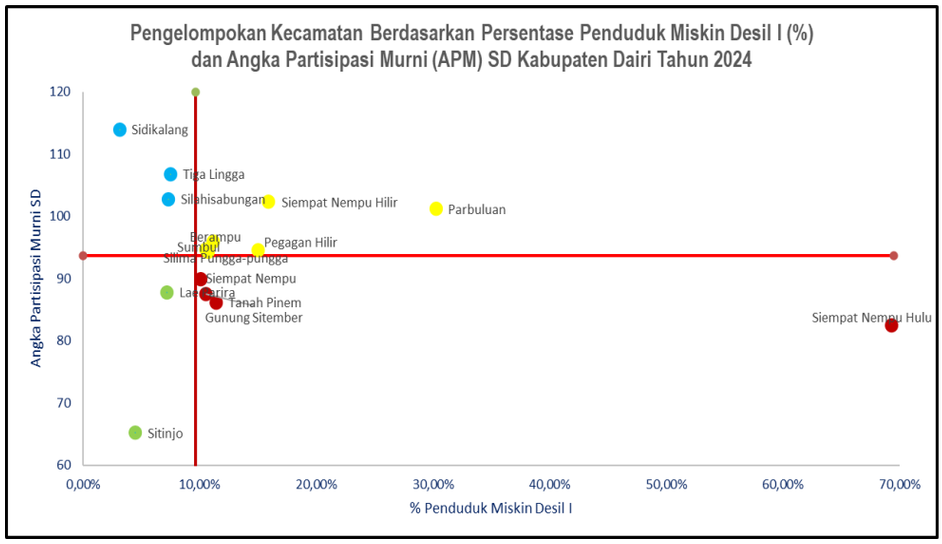


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Sumbul, Tanah Pinem, Parbuluan, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir
Prioritas 2	Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu, Gunung Sitember, Silima Pungga-pungga, Berampu
Prioritas 3	-
Prioritas 4	Sidikalang, Tiga Lingga, Sitinjo, Lae Parira, Silahisabungan

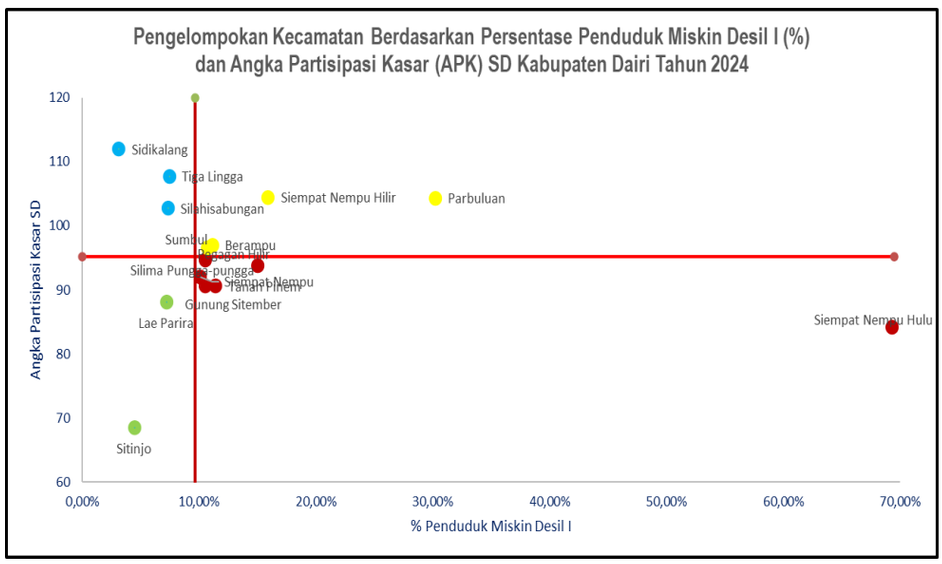
5.2. Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Pendidikan

5.2.1. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan APM SD dan APK SD



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Siempat Nempu Hulu, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu
Prioritas 2	Sumbul, Pegagan Hilir, Silima Pungga-pungga, Berampu, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir
Prioritas 3	Sitinjo, Lae Parira
Prioritas 4	Silahisabungan, Tiga Lingga, Sidikalang

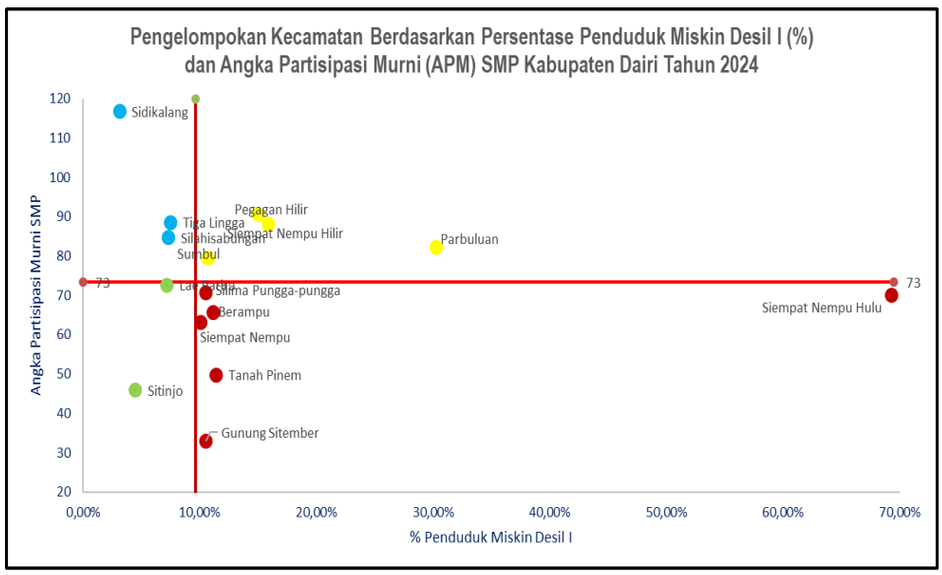


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

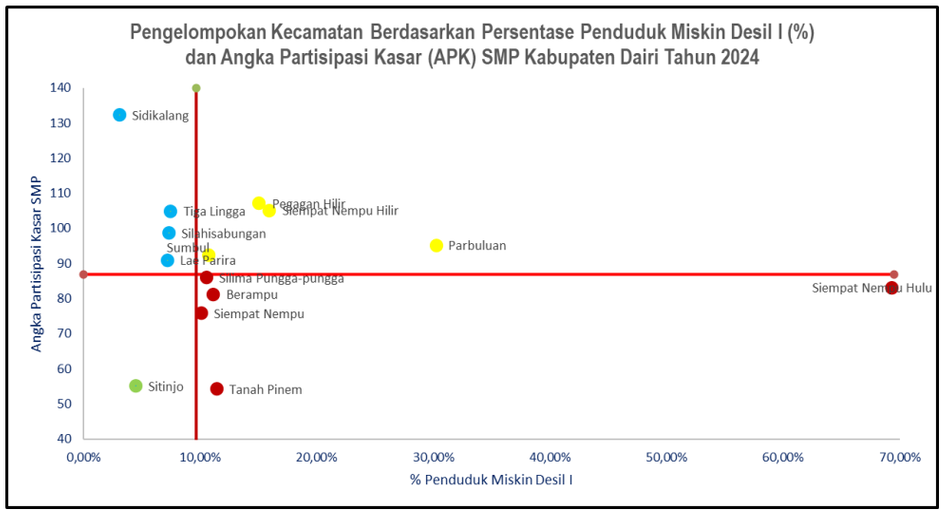
Prioritas 1	Siempat Nempu Hulu, Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu, Pegagan Hilir, Silima Pungga-pungga
Prioritas 2	Sumbul, Berampu, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir
Prioritas 3	Sitinjo, Lae Parira
Prioritas 4	Silahisabungan, Tiga Lingga, Sidikalang

5.2.2. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan APM dan APK SMP



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Gunung Sitember, Tanah Pinem, Siempat Nempu, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Silima Pungga-pungga
Prioritas 2	Sumbul, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Pegagan Hilir
Prioritas 3	Sitinjo, Lae Parira
Prioritas 4	Silahisabungan, Tiga Lingga, Sidikalang

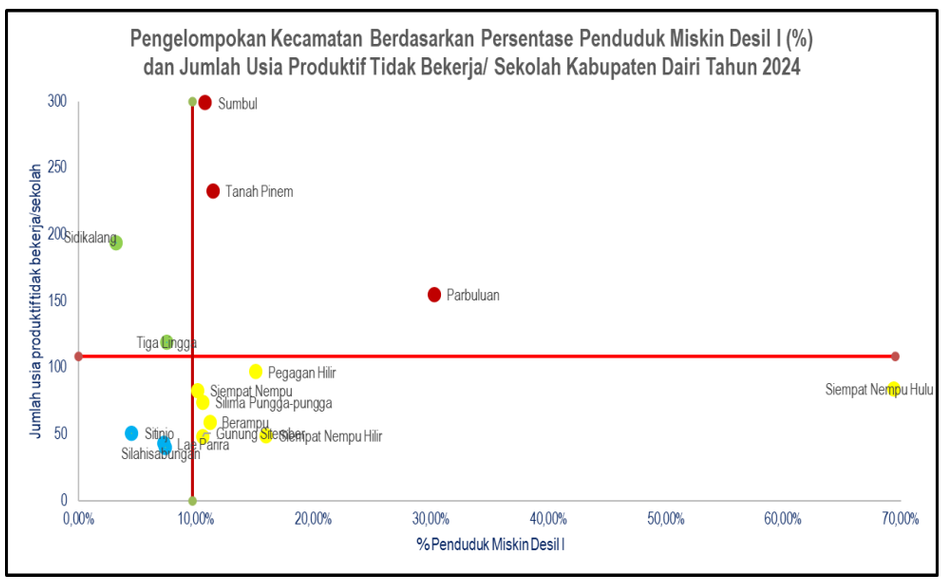


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Gunung Sitember, Tanah Pinem, Siempat Nempu, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Silima Pungga-pungga
Prioritas 2	Sumbul, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Pegagan Hilir
Prioritas 3	Sitinjo
Prioritas 4	Lae Parira, Silahisabungan, Tiga Lingga, Sidikalang

5.3. Wilayah prioritas persentase penduduk miskin Desil I dan Ekonomi

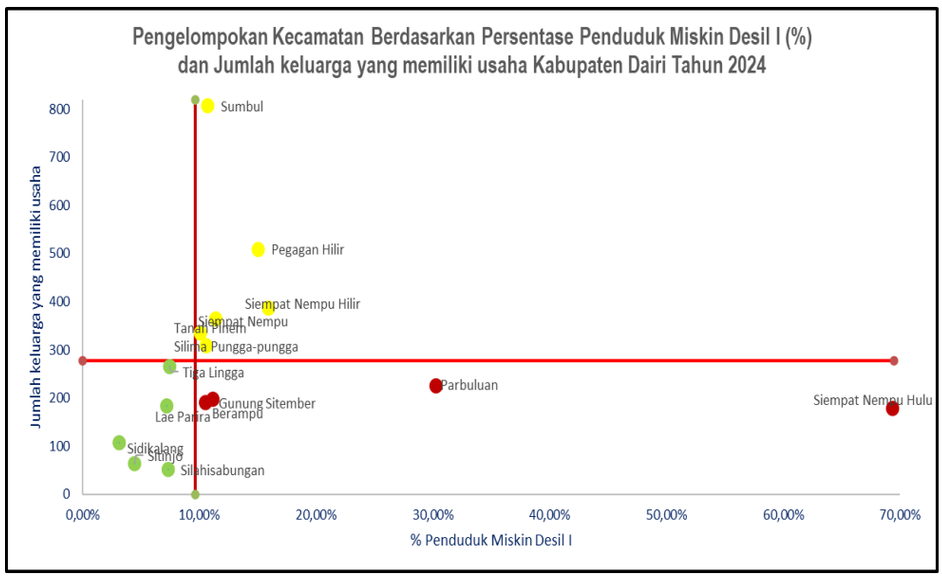
5.3.1. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Jumlah Usia Produktif Tidak Bekerja/ Sekolah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Jumlah Usia Produktif Tidak Bekerja/ Sekolah didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Sumbul, Tanah Pinem, Parbuluan
Prioritas 2	Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu, Silima Pungga-pungga, Berampu, Siempat Nempu Hilir, Gunung Sitember
Prioritas 3	Sidikalang, Tiga Lingga
Prioritas 4	Sitinjo, Lae Parira, Silahisabungan

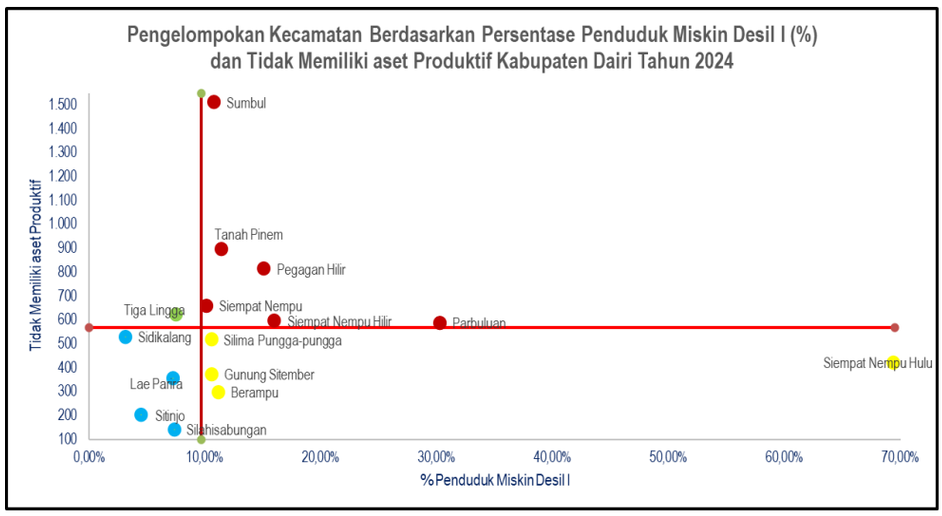
5.3.2. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Jumlah Keluarga Yang Memiliki Usaha



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Jumlah keluarga yang memiliki usaha didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Berampu, Parbuluan
Prioritas 2	Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Pegagan Hilir, Sumbul
Prioritas 3	Silahisabungan, Sitinjo, Sidikalang, Lae Parira, Tiga Lingga
Prioritas 4	-

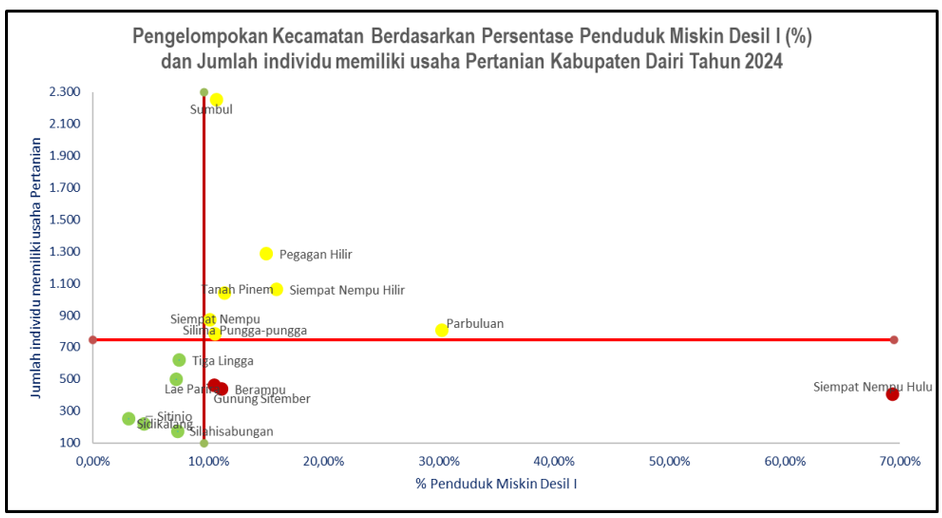
5.3.3. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Tidak Memiliki Aset Produktif



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Tidak Memiliki aset Produktif didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu, Pegagan Hilir, Tanah Pinem, Sumbul
Prioritas 2	Berampu, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hulu, Silima Pungga-pungga
Prioritas 3	Tiga Lingga
Prioritas 4	Silahisabungan, Sitinjo, Lae Parira, Sidikalang

5.3.4. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Jumlah Individu Memiliki Usaha Pertanian

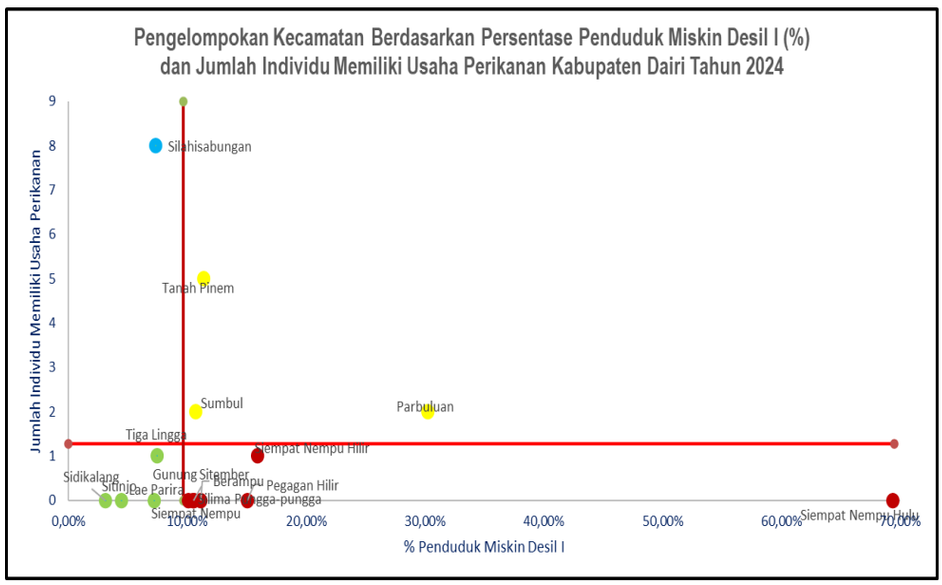


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Jumlah individu memiliki

usaha Pertanian didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Siempat Nempu Hulu, Berampu, Gunung Sitember
Prioritas 2	Silima Pungga-pungga, Parbuluan, Siempat Nempu, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Pegagan Hilir, Sumbul
Prioritas 3	Silahisabungan, Sitinjo, Sidikalang, Lae Parira, Tiga Lingga
Prioritas 4	-

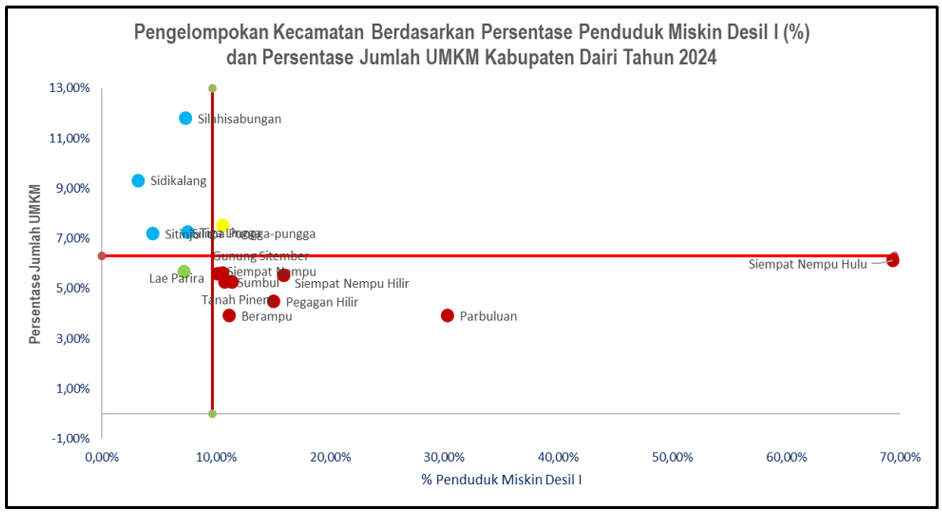
5.3.5. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Jumlah Individu Memiliki Usaha Perikanan



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Jumlah Individu Memiliki Usaha Perikanan didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Berampu, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hulu, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir
Prioritas 2	Parbuluan, Sumbul, Tanah Pinem
Prioritas 3	Sitinjo, Sidikalang, Lae Parira, Tiga Lingga
Prioritas 4	Silahisabungan

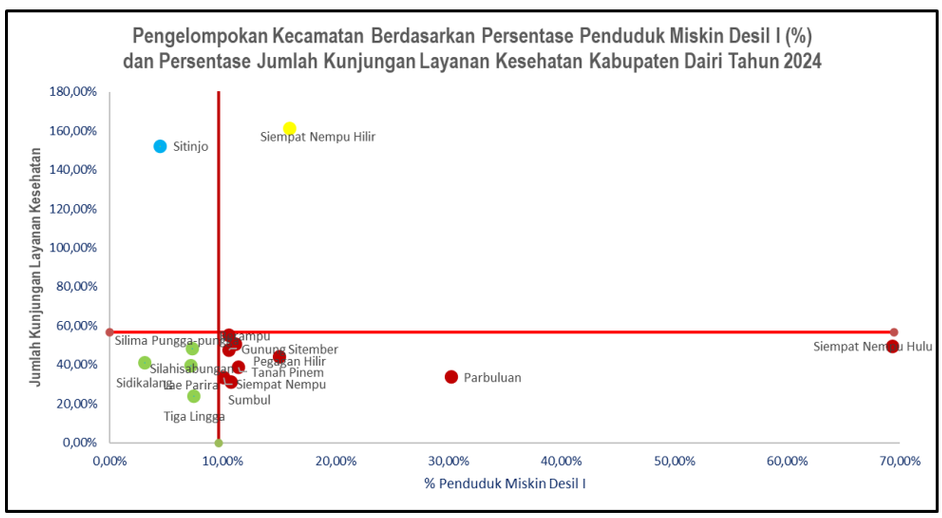
5.3.6. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Persentase Jumlah UMKM



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Persentase Jumlah UMKM didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Berampu, Parbuluan, Pegagan Hilir, Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hulu
Prioritas 2	Silima Pungga-pungga
Prioritas 3	Lae Parira
Prioritas 4	Sitinjo, Tiga Lingga, Sidikalang, Silahisabungan

5.3.7. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Jumlah Kunjungan Layanan Kesehatan

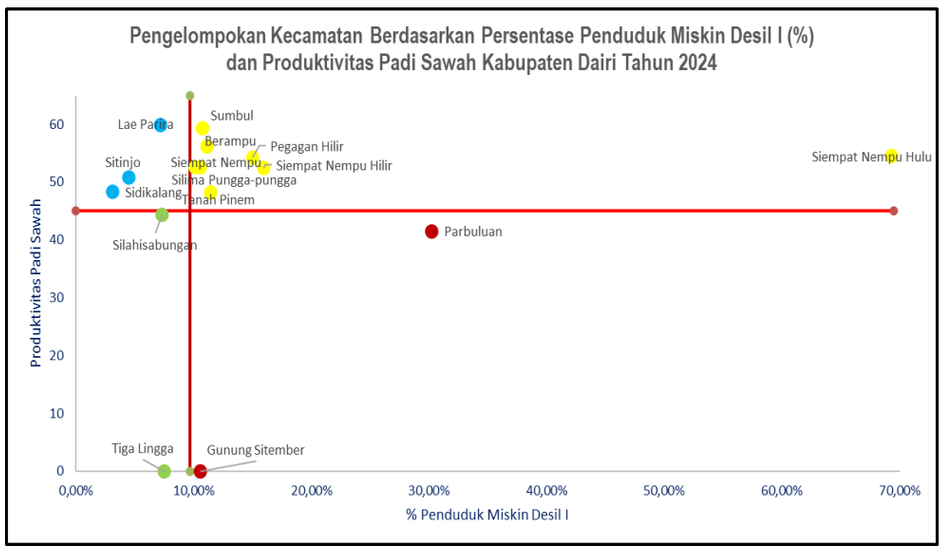


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Jumlah Kunjungan

Layanan Kesehatan didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Sumbul, Siempat Nempu, Parbuluan, Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hulu, Berampu, Silima Pungga-pungga
Prioritas 2	Siempat Nempu Hilir
Prioritas 3	Tiga Lingga, Lae Parira, Sidikalang, Silahisabungan
Prioritas 4	Sitinjo

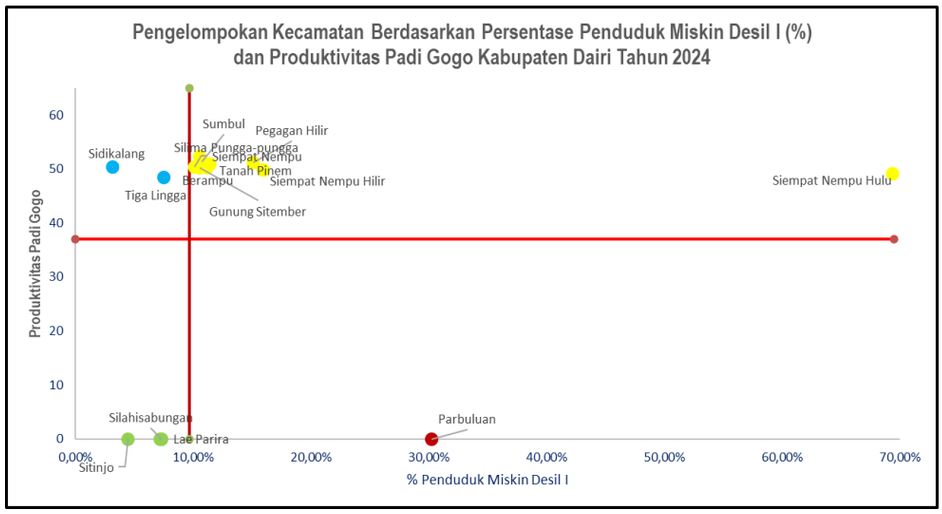
5.3.8. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Produktivitas Padi Sawah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Produktivitas Padi Sawah didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Gunung Sitember, Parbuluan
Prioritas 2	Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hulu, Berampu, Sumbul
Prioritas 3	Tiga Lingga, Silahisabungan
Prioritas 4	Sidikalang, Sitinjo, Lae Parira

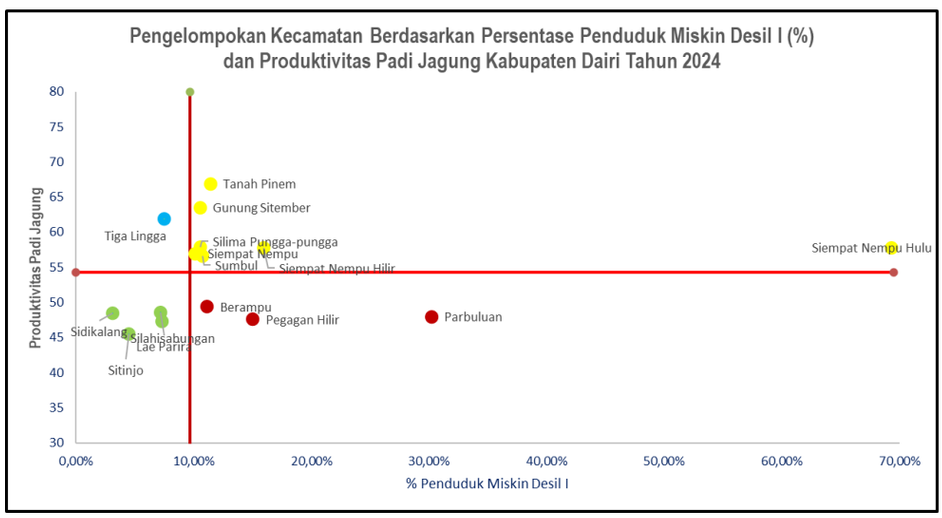
5.3.9. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Produktivitas Padi Gogo



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Produktivitas Padi Gogo didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Parbuluan
Prioritas 2	Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Gunung Sitember, Berampu, Siempat Nempu, Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Sumbul, Silima Pungga-pungga
Prioritas 3	Silahisabungan, Sitinjo, Lae Parira
Prioritas 4	Tiga Lingga, Sidikalang

5.3.10. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Produktivitas Padi Jagung

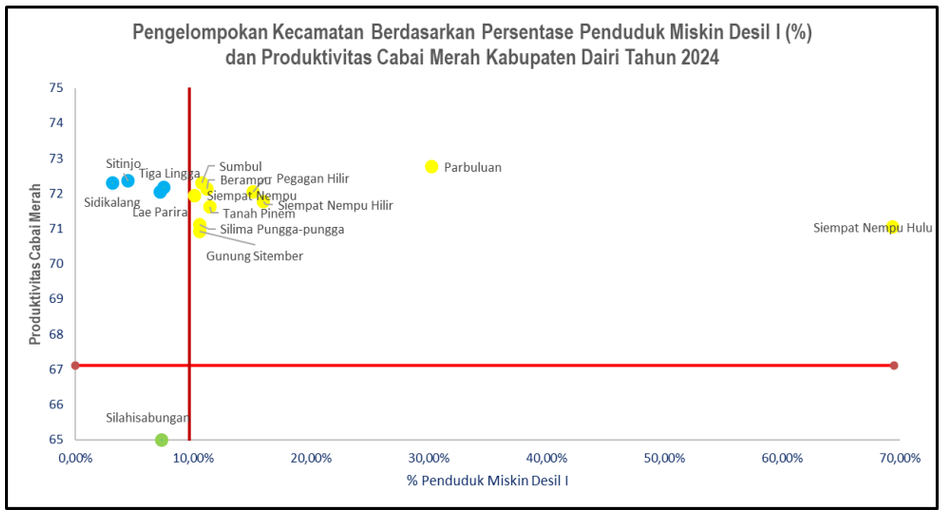


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Produktivitas Padi Jagung

didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Parbuluan, Berampu, Pegagan Hilir
Prioritas 2	Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Gunung Sitember, Siempat Nempu, Tanah Pinem, Sumbul, Silima Pungga-pungga
Prioritas 3	Sidikalang, Silahisabungan, Sitinjo, Lae Parira
Prioritas 4	Tiga Lingga

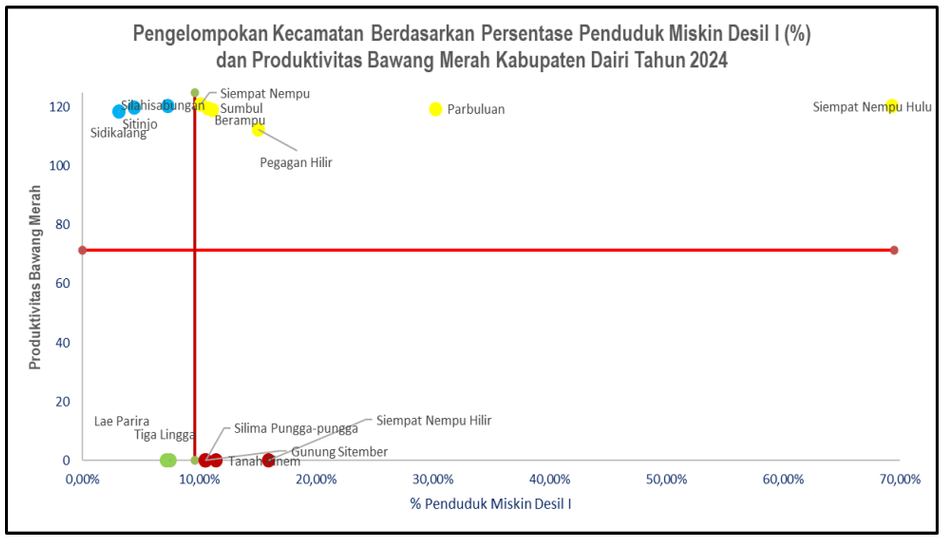
5.3.11. Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk miskin Desil I dan Produktivitas Padi Cabai Merah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Produktivitas Cabai Merah didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	
Prioritas 2	Gunung Sitember, Siempat Nempu Hulu, Silima Pungga-pungga, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu, Pegagan Hilir, Berampu, Sumbul, Parbuluan
Prioritas 3	Silahisabungan
Prioritas 4	Lae Parira, Tiga Lingga, Sidikalang, Sitinjo

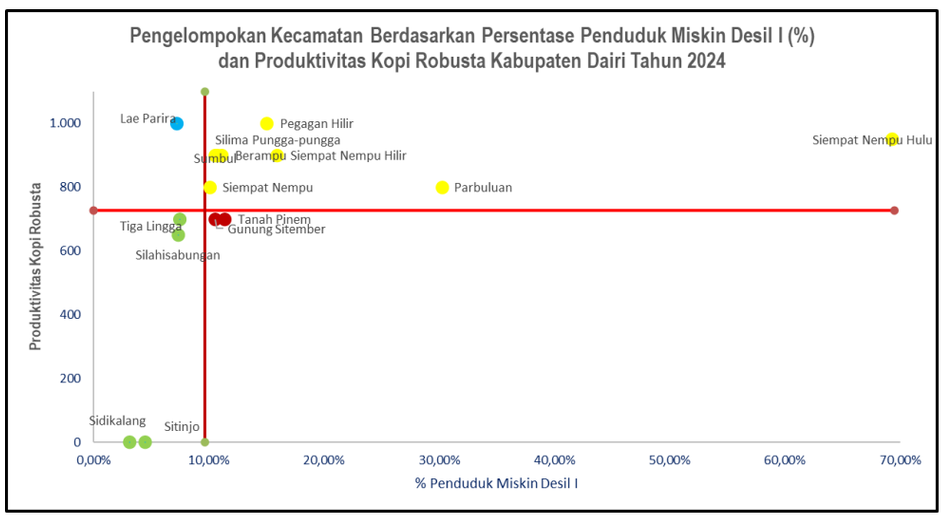
5.3.12. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I Dan Produktivitas Bawang Merah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Produktivitas Bawang Merah didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Gunung Sitember, Silima Pungga-pungga, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir
Prioritas 2	Pegagan Hilir, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu
Prioritas 3	Lae Parira, Tiga Lingga
Prioritas 4	Sidikalang, Sitinjo, Silahisabungan

5.3.13. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Produktivitas Kopi Robusta

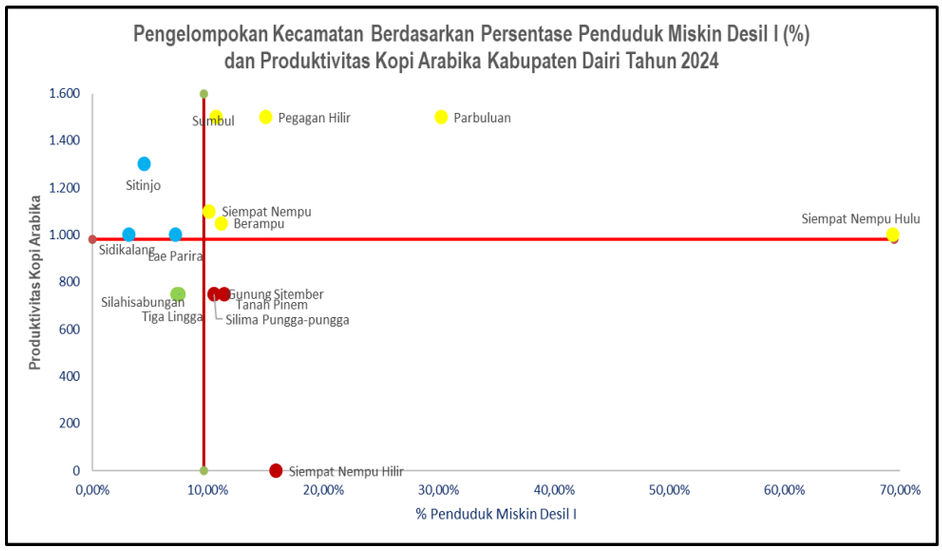


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Produktivitas Kopi Robusta

didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Gunung Sitember, Tanah Pinem
Prioritas 2	Parbuluan, Siempat Nempu, Berampu, Sumbul, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir
Prioritas 3	Sidikalang, Sitinjo, Silahisabungan, Tiga Lingga
Prioritas 4	Lae Parira

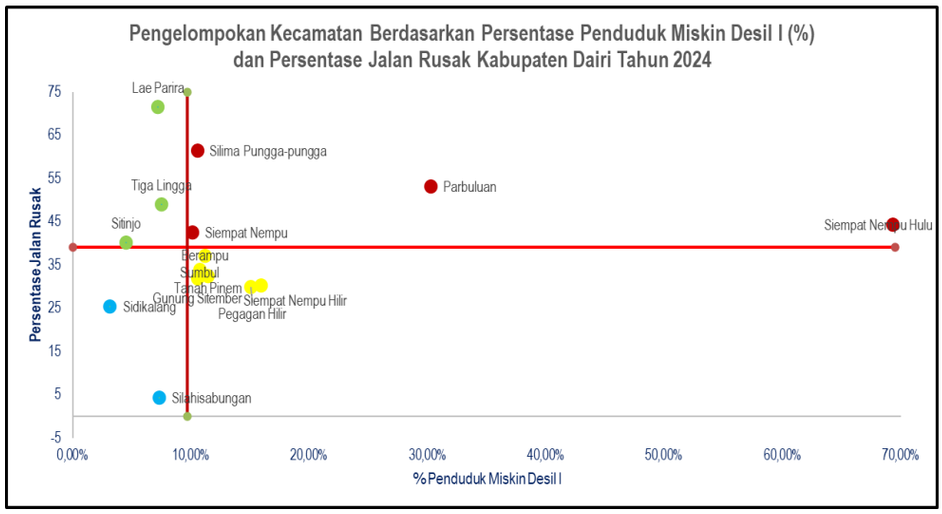
5.3.14. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Produktivitas Kopi Arabika



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Produktivitas Kopi Arabika didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Gunung Sitember, Tanah Pinem, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hilir
Prioritas 2	Parbuluan, Siempat Nempu, Berampu, Sumbul, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir
Prioritas 3	Silahisabungan, Tiga Lingga
Prioritas 4	Sidikalang, Sitinjo, Lae Parira

5.3.15. Kuadran Wilayah Prioritas Persentase Penduduk Miskin Desil I dan Persentase Jalan Rusak



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk miskin Desil I dan Persentase Jalan Rusak didapatkan prioritas wilayah kecamatan yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Parbuluan, Silima Pungga-pungga
Prioritas 2	Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir, Gunung Sitember, Tanah Pinem, Sumbul, Berampu
Prioritas 3	Sitinjo, Tiga Lingga, Lae Parira
Prioritas 4	Silahisabungan, Sidikalang

BAB VI
PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang harus diatasi melalui langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah dimaksud ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat serta diarahkan pula untuk peningkatan pendapatan. Dalam rangka penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD 2025-2029 Kabupaten Dairi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, maka dapat dilihat bahwa RPKD seharusnya dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan dan substansi dari setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD, Renstra-OPD dan dokumen tahunan RKPD dan Renja OPD.

Hal lain yang membuat RPKD sangat diperlukan karena masalah kemiskinan merupakan masalah khas sehingga setiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda. RPKD diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan ke dalam konteks penyelesaian lokal. Proses ini menjadi sangat strategis,

mengingat dokumen RPKD bukanlah dokumen yang eksklusif, RPKD merupakan living document yang diharap`kan memperkuat proses penajaman semangat otonomi daerah yang sedang berjalan menuju arah perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

Demikian dokumen ini disusun sebagai acuan dan masukan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Dairi untuk 5 (lima) Tahun yang akan datang.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010